ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PRAKTIK PREMANISME DI LINGKUNGAN PASAR

Studi Etnografi Kalangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Setonongulon Surabaya

SKRIPSI

Disusun oleh :

RAHKMAN ARDI

110110470

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

PRAKTIK PREMANISME DI LINGKUNGAN PASAR

Studi Etnografi Kalangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Setonongulon Surabaya

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Universitas Airlangga Surabaya

Disusun oleh :

RAHKMAN ARDI

110110470

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing Penulisan skripsi

Surabaya, 20 Juli 2005

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Suryanto, M.Si

NIP. 131 999 640

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2005

dengan susunan Dewan Penguji

Ketua,

Drs. Hawaim Machrus, M.Si
NIP. 130 701 135

Sekretaris,

Nur Ainy Fardhana, S.Psi,.M.Si
NIP. 132 205 662

Anggota,

Dr. Suryanto, M.Si
NIP. 131 999 640

HALAMAN MOTTO

BASED ON TRUE STORY

Aku tahu, aku tak akan pernah mau anak keturunanku jadi seperti mereka...
Aku iba dengan mereka, sekaligus bersyukur dan bangga dengan diriku

Tapi suatu saat... kulihat dengan kedua mataku.
Seorang yang berusia 20 menciumi anaknya yang berusia 3,5 tahun.
Anak itu mulai rewel, kecapean setelah seharian berjalan-jalan
Mereka berdua bersenang-senang dari kebon binatang hingga plasa tunjungan.
Anak yang rewel digendongnya.
Ia mengusap sambil menyanyikan lagu ninabobo.
Padahal anaknya adalah anak jadah, dan lahir tanpa bapak.
Ia mengeluarkan sebotol susu pada anaknya sambil mengambil tanda salib

"Orang-orang menganggapku tak punya kehormatan dan harga diri"
"waktu anakku besar, ia pun mungkin akan tahu siapa aku." Ujarnya lagi
Tapi ia tak peduli dengan apa yang terjadi besok,
"hidupku hanya untuk anakku ini."
Ia tak ingin menunjukkan air mata ataupun menyesali diri.
Kehormatan hanya untuk orang yang punya malu dan menjaga harga diri.
Atau mungkin sebaliknya.
"Orangtuaku tak mengakui anaknya sendiri karena malu dan harga diri."
"Orang-orang diam-diam datang kepadaku,
kemudian menjadikan aku bahan olok-olokan karena malu dan harga diri"
Ia tak minta dihargai dan dihormati.
"aku memang tak punya harga diri...
dan aku tak pernah meminta penghargaan dan penghormatan dari siapapun.
Tapi aku seperti kamu.... cuma manusia yang ingin dimengerti "

Aku tertegun dan menitikkan air mata... Aku merasa bahwa ibaku sia-sia
Ia memberitahu siapa aku.
Aku cuma manusia yang sama-sama lahir telanjang
Aku bukanlah siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi siapa-siapa

Lalu kupikir apa yang bisa kuperbuat
Dan kupahami ternyata aku tak akan pernah punya daya
Aku tak bisa berbuat apa-apa

(tengah malam setelah cangkruk, 7 Juli 2005)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Ibunda dan Ayahanda, sebagai senyuman untuk seluruh kisah yang penuh noktah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kepada kita semua, atas ijin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik semua pembaca.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak di bawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Zainuddin, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya
2. Dr. Suryanto, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Endah Mastuti S.Psi, M.Psi., selaku dosen pembimbing Akademik yang selalu sabar dalam memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Bpk. Dr. Jangkung karyantoro MBA, yang tak henti-hentinya mengajarkan penulis untuk selalu bersikap rendah hati.
5. Ilham Nur Alfian S.Psi, Budi Setiawan Muhammad S.Psi, M. Syafiq S.Psi, Iwan Wahyu Hidayat S.Psi, yang telah menjadi teman

berdiskusi, tempat berkeluh kesah, dan motivator penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Helmi Firdaus S.Psi, yang pernah memberikan *brainstorming* diawal penulis memasuki dunia kampus. Ganjar Nugroho S.Sos, yang berkenan membalas email-email penulis serta mengirimkan tulisannya walaupun berada jauh di negeri matahari terbit.

6. Kakakku Rakhmad Krisnawardana, kakak terbaik yang pernah dan selalu kumiliki. Jarak tak pernah menjadi penghalang untuk selalu berusaha saling memahami dan saling mengerti apa yang terjadi pada diri kita. Sudah saatnya kita menunjukkan bakti untuk diri kita sendiri dan kepada orang tua kita tercinta. Kakak Iparku, Tri Arini; dan keponakan-keponakanku Yudhistira Aremaputra Wardhana dan Adristi Batariputri Wardhani: atas sambutan yang hangat ketika penulis meluangkan waktu untuk berlibur.
7. Adik-adikku, Semangat dan perjuanganku juga untuk kalian semua. I Love U All: Andrey Fahrid, suatu saat matahari akan terbit dalam jendela masa depanmu kalau kamu jadi anak yang percaya diri dan berani; Adrey Fahriz, berbaktilah kepada kedua orangtuamu, kendalikan diri (jangan sering berantem sama saudara kandungmu ya...), Sesungguhnya kamu adikku yang cerdas dan berpotensi untuk menjadi orang besar nan hebat; Annisa Ika Novia, satu-satunya adikku yang paling centil dan cantik. Seringkali tidak sabar melihat kamu besar. Aku yakin suatu saat kamu akan jadi perempuan mandiri dan

dibanggakan keluarga; Adikku paling bungsu Anand Fahri yang karena kepintaran, keceriaan, dan kelucuannya selalu bikin kangen.

8. Agung Dewantoro S.Psi ; tidak ada orang yang benar-benar kuanggap seperti kakak kandung sendiri selain anda. Seorang yang sedang menjalani pragmatisme hidup namun penuh dengan idealisme dan kerendahan hati. Babat alas yang telah dan sedang anda jalani seringkali menjadi inspirasi dan pelajaran bagi penulis dalam melangkah dan memaknai hidup.
9. Ellis Juriawardani dan H.E Soepardi S.H., M.H. yang kehadirannya menambah makna dan dinamika dalam kehidupan penulis.
10. Saudara sepupuku Andika: mulailah berjuang untuk menghadapi kerasnya hidup. Jadilah pelita untuk keluargamu.
11. Rekan-rekan KSB: Gaguk, Rudi, Daus, Heri, dan Firman. Perbedaan jalan bukan menjadi penghambat bagi kita untuk selalu bersahabat. Dan generasi setelahnya Reza (02), Is (02), Novan(02), Toni (02), dan Mbah Yudha (02); Aryo (02) atas dokumentasi foto pasar yang artistik. Rekan-rekan LPM Retorika dan para tentornya yang pernah memanduku untuk menjadi seorang penulis.
12. Rekan-rekan Psychomountaineering: Ferry Hoyax (00) dan Gordon (00) atas pendakian yang tak kenal lelah dan beresiko. *Now I see the secret of the making of the best person. It is to grow in the open air and to eat and sleep with the earth* (Walt Whitman, song of the Open

Road). Aku yakin kita akan akan selalu ingat pengalaman manis kehabisan air di puncak Merbabu dan kekurangan logistik di Welirang.

13. Rekan-rekan angkatan 2001: Nina, Dian 'Golum', Widi, Cyrilla, Nurul, Arum, Ihda, Dana, Ella, Ika, Budi, Yeye, Heni, Ayu serta semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah mengisi hari-hari manis bersama penulis selama 4 tahun masa studi. Rekan-rekan angkatan 2000 dan 99: Ani (00), Ayu (00), Fahmi (00), Bre (00), Niken (99), Tarjo (99), dan Rahardian (99) yang pernah menjadi teman berbagi cerita peneliti selama masa kuliah.
14. Rekan-rekan KKN kelurahan kebonsari 2005 : Indah, Dian, Ayu, Arif, Ekki atas 28 hari yang penuh penderitaan, kegembiraan, serta keakraban. Pak Lurah Dewanto & Asistennya Mas Yus yang sangat memperhatikan urusan logistik dan kenyamanan psikis selama penulis menjadi juru kunci posko.
15. Rekan-rekan kos-kosan mulai dari di Pogung Lor Jogja (Mas Tamam, Mas Indra Warso, Mas Esa); Jln Karang Wismo IV (Mas Bucek, Pak Budi & keluarga); Bhaktihusada (Arif-FE), Mojo III (Ijul, Irul, Halim, Jose, Agus, Arif, Dian, Yusuf, Deni); dan kawan-kawan Mojo Tegal 16 (Bang Sis, Dik Wawan, Muktar Hendra 03) yang sudi meminjamkan sepeda motornya ketika peneliti harus terjun lapangan di malam hari; Aji yang sering 'direpoti' penulis dengan peminjaman printer.
16. Regu Aju PC 2002, KPU 2002, dan sie materi-acara *Psychocamp* 2003 atas *team work* yang tak pernah bisa di lupakan.

17. Rekan-rekan Fakultas MIPA ilmu Komputer Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2000 yang telah mengisi hari-hari manis penulis selama di Jogja.
18. Pak Parno dan Irul atas kerendahan hati dan usaha yang tak kenal lelah dalam membantu menurunkan tensi kecemasan penulis dalam proses pengerjaan penelitian ini; semua kawan-kawan wirausahawan kecil yang handal dan ulet, banyak sekali yang penulis dapat ketika mendengar kisah hidup kalian;
19. Pak Kun, Sinyo, Mbak Sum, Cak Jo, dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang telah menjadi teman dan selalu memberikan dorongan pada penulis untuk cepat lulus.
20. Seseorang yang pernah tak dikenal namun perbincangan singkatnya telah membagi makna kepada penulis dalam memahami hidup.
21. Terakhir, untuk adinda Apri Dwi Provytantini atas cinta, senyuman, perhatian, dan dukungan yang diberikan kepada penulis. *We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times. I'll take you just the way you are* (Billi Joel). *Cherie... My love for you is très, très fort.*

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang tidak dapat penulis balas dan memberi kemudahan kepada kita semua.

Surabaya, 18 Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
ABSTRAKSI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
A.1. Premanisme Sebagai Kontradiksi Kehidupan Kota 1
A.2. Gambaran Media Massa Tentang Praktik Premanisme 3
A.3. Wacana Historis Kolusi Preman-Aparat 7
A.4. Catatan Kritis 8
B. Fokus Kajian Penelitian 11
C. Ruang Lingkup Penelitian 11
D. Tujuan Penelitian 13
E. Manfaat Penelitian 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Gestalt dan Teori Medan 16
A.1. Teori Medan 18
A.2. *Life Sphere* 19
A.3. Catatan Kritis 21
B. Habitus dan Strukturalisme Generatif 24
B.1. Modal Kekuasaan 27

B.2. Pertarungan dan Strategi 29
B.3. Praktik Sosial 31
B.4. Medan *(Field)* 32
C. Kekuasaan 34
D. Pasar Tradisional 36
E. Preman 39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 43
A. Tipe Penelitian 43
B. Unit Analisis 46
C. Informan Penelitian 46
D. Metode Pengumpulan Data 49
D.1. Observasi 50
D.2. Wawancara 51
D.3. Studi dokumen 54
E. Analisis Data 54
F. Kredibilitas Penelitian 56
BAB IV PELAKSANAAN DAN SETTING PENELITIAN 58
A. Pelaksanaan Penelitian 58
A.1. Tahap Studi Pendahuluan 58
A.2. Tahap Studi Lapangan 60
A.2.1. Penentuan Lokasi.....60
A.2.2. Penentuan Informan 63
B. Keterbatasan Penelitian.....66
C. Setting Penelitian 67
C.1. Pasar di Surabaya 67
C.2. Pasar Setonongulon 70
BAB V HASIL PENELITIAN 75
A. Awal Pungutan Liar Bermodus Paguyuban 75
B. Kejatuhan Kepala Paguyuban 79
B.1. Teror terhadap PKL 79
B.2. Kekuasaan Anggota Marinir 83

B.3. Munculnya Paguyuban Baru 85
C. Aktivitas Paguyuban Baru 87
C.1. Memelihara Jaringan Kekuasaan 87
C.1.1. Interaksi dengan Kecamatan 88
C.1.2. Interaksi dengan Aparat Kepolisian 90
C.1.3. Interaksi dengan Aparat TNI 94
C.1.4. Interaksi dengan Anak Buah 95
C.2. Penarikan Iuran Pada Pedagang 97
D. Alasan Paguyuban Menarik Iuran pada Pedagang 99
E. Persepsi Pedagang atas Praktik Paguyuban 101
BAB VI PEMBAHASAN 104
A. Atribut Preman dalam Komunitas Pasar 105
B. Penyebab Munculnya Praktik Premanisme 110
B.1. Dinamika Psikologis PKL 112
B.2. Budaya Kekuasaan yang Korup 117
C. Pola interaksi antara Preman dan Jaringan Kekuasaan 120
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 125
A. Kesimpulan 125
B. Saran 129
DAFTAR PUSTAKA 132
LAMPIRAN 136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Reproduksi Atribut Preman..105
Gambar 2 : Bagan Penyebab Munculnya Praktik Premanisme..112
Gambar 3 : Bagan Pola Interaksi Preman dalam Jaringan Kekuasaan...121

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Garis Besar Topik Wawancara 53
Tabel 2 : Dasar Pemilihan Lokasi 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Istilah 136
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dan Analisis Data.....140
Lampiran 3 : Peraturan Daerah no 17 tahun 2003 229
Lampiran 4 : Foto Lokasi.. 231

ABSTRAKSI

Rahkman Ardi. 110110470. (2005) Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Praktik Premanisme Di Lingkungan Pasar: Studi Etnografi Kalangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Setonongulon Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik premanisme di lingkungan pasar. Praktik premanisme yang dimaksudkan adalah serangkaian tindakan hasil dinamika dialektis antara preman sebagai pelaku sosial dengan struktur dan budaya tempat dirinya berada. Beberapa kasus yang dilakukan oleh preman pasar didasari oleh struktur lingkungan yang labil sehingga memunculkan adaptasi berupa perilaku pemungutan liar dan teror terhadap pedagang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendasarkan prosesnya sesuai dengan paradigma konstruktivis. Tipe penelitian yang digunakan adalah etnografi. Informan penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat enkulturasi, keterlibatan, dan peran yang dimainkan informan dalam praktik premanisme. Data yang diperoleh dianalisis melalui 4 model yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Antara analisis satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik premanisme hanya merupakan wujud penyesuaian terhadap aturan main yang ditetapkan secara secara terselubung oleh pihak dominan, yaitu aparat yang berwenang. Pada fokus penelitian pertama diperoleh temuan bahwa relasi kekuasaan dan problematika sosial telah mereproduksi atribut preman dalam lingkungan pasar. Dengan reproduksi atribut tersebut maka preman tidak dapat dipahami dalam praktiknya sebagai pelaku pemungutan liar dan teror pada pedagang saja, namun lebih kepada tindakannya sebagai pengelola, pemimpin, pembantu aparat keamanan, serta penjembatan kepentingan pedagang dengan aparat berwenang. Pada fokus penelitian kedua diperoleh temuan bahwa praktik premanisme disebabkan celah dari budaya kekuasaan yang korup serta disposisi pedagang yang lebih mengutamakan sikap *safety first*. Pada fokus penelitian ketiga diperoleh temuan bahwa legitimasi dan lisensi atas praktik preman ditentukan oleh interaksinya dengan aparat yang memiliki modal kekuasaan. Modal kekuasaan dapat berupa kewenangan aparat secara legal formal atas lahan tertentu atau berwujud kekuasaan simbolik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di pulau Jawa, pekerjaan mencuri dikuasai oleh lembaga-lembaga desa..... dan memberi keuntungan yang begitu banyak kepada para pelindungnya.
Tak ada pemimpin desa yang menganggap desanya aman atau beres, jika ia tidak memelihara sekurang-kurangnya seorang maling atau beberapa orang yang bekerja di bawah komando maling tertua dan bijaksana, yang disebut jagoan

(Algemeen Rijksarchief Den haag (Arsip Nasional Den Haag, ARA), Arsip Ministerie Van Kolonien (MvK) Verbaal (V) 3 Juli, 1872/30: Surat C. Amand, 17 April 1872; dalam Nordholt, 2003:10).

A.1. Premanisme Sebagai Kontradiksi Kehidupan Kota

Kota sebagai situs terjadinya kemajuan dan perkembangan telah ditandai dengan ledakan penduduk; cepatnya pertumbuhan industri ekonomi dan urbanisasi; perkembangan pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya; perkembangan teknologi yang begitu cepat; pengikisan nilai tradisional serta perkembangan maupun hilangnya norma baru beserta sub kultur.

Perkembangan teknologi dan industrialisasi yang demikian massif telah menyedot perhatian manusia yang hidup di sekelilingnya. Ia telah membuat orang melupakan pemandangan laut di kampung nelayan dan pegunungan di desa. Kota membuat orang tergiur untuk beralih pekerjaan dari mencangkul menjadi buruh industri raksasa.

Perubahan cepat yang tidak terelakan telah merubah bentuk masyarakat kota secara besar-besaran, membawa ketidakteraturan dan kekacauan pada semua tingkat pengalaman maupun kebiasaan manusia; keluarga, masyarakat serta

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

individu. Ia tidak hanya menyentuh dan merombak aspek-aspek ekonomi, tetapi juga kultural, sosial, politis, dan terlebih teknologis (Priyono, 2002: 54).

Perubahan tersebut kemudian memunculkan bentuk kontradiksi, penindasan, dan alienasi. Bentuk-bentuk tersebut terlihat kabur dan tidak tampak kasat mata. Kehidupan perkotaan digambarkan seolah berjalan lancar, produktif, efisien, adil, wajar dan manusiawi. Padahal yang sebenarnya berlangsung adalah proses kekerasan dibalik persaingan ekonomi dan dehumanisasi. Kekerasan dapat dikatakan merupakan salah satu karakteristik kehidupan kota besar (Atmasasmita,1995:77). Namun akar dari kekerasan itu tidak lagi *an sich* pada pelakunya, ia berada di luar kekerasan pelaku, seperti soal kesulitan, kekurangan dan frustasi material-ekonomis.

Menjadi wajar bila dikatakan bahwa salah satu ciri denyut nadi masyarakat metropolis adalah kehidupan *struggling and survival* yang penuh dengan persaingan. Kehidupan semacam itu sering memunculkan bentuk pelembagaan dunia model Darwin *(the survival of the fittest)*. Gejala *homo homini lupus* atau makan-memakan antar manusia menjadi pemandangan biasa. Manusia telah bertarung mempertahankan dan memperjuangkan *need* dan *drive* masing-masing. Mereka yang berhasil untuk *survive* adalah yang berani mengambil risiko apapun termasuk melakukan tindakan yang menjurus pada digunakannya cara-cara di luar hukum, seperti suap menyuap, pungutan liar, premanisme dan penyelewengan lainnya untuk mencapai tujuan.

Maraknya premanisme dapat dikatakan merupakan kontradiksi dari kehidupan kota yang keras dengan persaingan. Eksistensinya semakin

bersimbiosis dengan kehidupan sosial, ekonomi dan politik, setelah ia secara tidak langsung mendapat tempat dan peran dalam kehidupan sebagian masyarakat. Modus operandinya tidak semata-mata dilakukan dengan praktik pungutan liar dan kekerasan, namun juga digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi media ancaman untuk berebut pengaruh dan kekuasaan. Geng-geng preman dan jagoan silat menjual jasa kepada partai-partai politik dan para pemilik modal secara *semi-legitimate*. Akibat maraknya kekerasan dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang berpotensi untuk melakukan kekerasan, media asing menyebut Indonesia sebagai negara kekerasan. Bahkan New York Times mengelompokkan negara kita dan Rusia sebagai negara preman *(messy states)* (Nordholt, 2002; Abidin, 2005:1)

Perkembangan kasus premanisme ini terutama tampak di kota-kota besar di Indonesia; seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan beberapa daerah lain di luar pulau Jawa (Atmasasmita, 1995:76). Tempat-tempat strategis di kota besar yang merujuk pada lokus tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politis telah menjadi lahan basah bagi preman untuk menunjukkan eksistensi kekuasaannya.

A.2. Gambaran Media Massa Tentang Praktik Premanisme

Berbeda dengan tindak kekerasan semacam penodongan atau perampokan, modus operandi preman umumnya lebih mengandalkan pada kekuatan ancaman, bersifat semi terorganisir seperti mafia, dan memiliki daerah kekuasaan tertentu yang relatif tetap. Seperti ulah begal zaman dahulu, uang pajak tidak resmi yang

diminta para preman sifatnya seperti upeti atau tanda pengakuan atas kekuasaan yang dimiliki preman setempat (Kompas, 25 April 2001).

Beberapa ulah preman dapat dilihat pada kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Ibukota. Mereka yang disebut preman tersebar di berbagai pelosok Jakarta; dari mulut-mulut gang, pasar, terminal, jalanan hingga berbagai kawasan lainnya. Beberapa lahan yang potensial untuk menghasilkan uang seperti Tanah Abang, Senen, Blok M, Jalan Hayam Wuruk-Gajah Mada, Mangga Besar sampai Kota tak luput dari praktik para *mafioso* berjuluk preman tersebut. Preman dituding menjadi produsen tindak kriminal dengan melakukan praktik pemajakan liar atas masyarakat.

Tempat-tempat potensial di Surabaya seperti pasar dan terminal juga tidak luput dari praktik penarikan pajak liar oleh preman. Modus operandinya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di ibukota. Namun, terdapat beberapa pemahaman menarik yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat terhadap aktivitas preman di Surabaya. Preman yang beroperasi di wilayah pasar disebut sebagai pengelola informal atau paguyuban PKL (Pedagang Kaki Lima). Mereka dapat bergerak bebas dikawasan pasar karena dianggap menjadi pelindung pedagang.

Harian jawa pos tanggal 27 maret 2004 menyebut para pengelola informal ini sebagai preman. Hal senada diungkapkan Dr, Ir Sumartono, Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat UPN Veteran, ia mengatakan bahwa beberapa paguyuban yang seolah-olah menjadi pahlawan bagi PKL sebenarnya seringkali memanfaatkan PKL (Jawa Pos, 9 mei 2004).

Aktivitas preman pasar kemudian terkesan berwajah ganda; di satu sisi melindungi, namun di sisi lain juga melakukan praktik pungutan liar, penyogokan dan penyuapan. Kadispol PP Surabaya, Kadri Kusuma lebih menekankan pada kekayaan yang dimiliki oleh paguyuban PKL dan bukannya pada praktik suap dan penyogokan terhadap aparat. Kadri mengatakan bahwa beberapa dari mereka bahkan naik haji lebih dari dua kali (Jawa Pos, 9 mei 2004). Pernyataan ini diungkapkan Kadri sebagai reaksi penolakan atas tudingan penyuapan paguyuban terhadap aparat untuk menjamin eksistensi perdagangan kaki lima (Jawa Pos, 9 mei 2004).

Pasar Keputran dapat dijadikan ilustrasi atas tindakan preman yang menyebut dirinya sebagai paguyuban atau pengelola informal. Kawasan Keputran dikuasai oleh lima kelompok preman yang memiliki wilayah sendiri-sendiri (Jawa Pos, 16 maret 2004). Setiap kelompok merupakan pengelola informal atas 300 sampai 400 pedagang. Pedagang yang ingin berjualan harus membeli lahan yang dijual oleh preman seharga antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta setiap lahan (Jawa Pos, 16 maret 2004). Pembayaran pedagang terhadap preman tidak sebatas pada pembelian lahan saja, namun juga pada penarikan iuran rutin per malam. Rata-rata iuran tersebut berkisar antara Rp 3 ribu sampai Rp 10 ribu. Besarnya iuran ini tergantung jenis dan lokasi berjualan pedagang tersebut (Jawa Pos, 16 maret 2004).

Berdasarkan data PD Pasar tahun 2004, jumlah PKL di kawasan Keputran sekitar 1.200 orang. Dengan asumsi seluruh pedagang ditarik iuran Rp 6 ribu, maka pendapatan kelima preman ini mencapai Rp 7,2 juta semalam. Artinya,

sebulan mereka bisa meraup uang sampai Rp 216 juta (Jawa Pos, 16 maret 2004). Penghasilan preman yang mencapai angka ratusan juta ternyata tidak hanya dipergunakan untuk membayar uang keamanan, listrik, dan gaji para centeng pasar. Sebagian penghasilan para preman pasar itu juga dipergunakan untuk menggaji para oknum pemkot, dan oknum aparat keamanan (Jawa Pos, 16 maret 2004).

Menarik untuk dicermati, pada tanggal 9 juni 2005, seseorang yang disebut-sebut oleh media massa sebagai preman penguasa pasar induk tersebut dipamiti seorang petinggi polwiltabes yang akan dimutasi ke daerah lain (Jawa Pos, 10 juni 2005). Preman tersebut dikenal sebagai pihak yang mengatur organisasi pedagang, baik PKL maupun pedagang asli di pasar induk tersebut.

Pedagang sendiri menganggap bahwa kebijakan preman atas pungutan uang yang dibebankan kepada pedagang dirasa lebih menguntungkan. Mereka beranggapan bahwa uang yang mereka bayar tidak hanya masuk ke kantong preman, namun juga masuk kepada pejabat yang memiliki jabatan strategis dan wewenang legal-formal atas lahan yang ditempati PKL. Uang yang disetor preman kepada pejabat-pejabat tersebut dianggap mampu menjamin eksistensi perdagangan kaki lima di pasar.

Pejabat yang terlibat dalam praktik suap tersebut disinyalir tidak hanya dari kalangan kepolisian, namun juga aparat kelurahan dan kecamatan. Sumartono (Jawa Pos, 9 mei 2004) menyatakan bahwa oknum pejabat seperti lurah dan camat telah menjadi mafia bagi para PKL dengan ikut menikmati hasil pungutan iuran yang dibebankan kepada pedagang.

Adanya pejabat tersebut kemudian menyebabkan pedagang yang berada dalam naungan preman menjadi tidak mengenal takut terhadap ultimatum pemerintah. Ultimatum aparat kepolisian dan Dispol PP untuk menertibkan Pasar Keputran pada akhir mei 2004 tidak menciutkan nyali para pedagang yang terlanjur berjualan di luberan jalan. Pihak preman pengelola pasar menunjukkan sikap lepas tangan dan enggan bertanggung jawab terhadap pedagang yang menolak pindah dari luberan jalan (Jawa Pos, 27 maret 2004).

A.3. Wacana Historis Kolusi Preman-Aparat

Modus praktik kolusi yang dipelihara antara preman dan pejabat kemudian hampir mirip dengan yang terjadi ketika sistem tanam paksa era kolonial berlangsung. Pada era tersebut secara tidak langsung terdapat kontinuitas antara bentuk premanisme dan kekuasaan lokal. Reorganisasi administrasi politik kolonial paska Perang Diponegoro melalui sistem tanam paksa telah memunculkan wilayah kekuasaan temang-remang di luar kontrol resmi dan memunculkan bentuk-bentuk kekerasan yang baru. Sejarah kekuasaan kolonial mencatat bahwa jago yang notabene adalah preman tidak berada di luar masyarakat. Mereka malah menjadi penghubung penting di dalam sistem politik. Para jago itu digunakan oleh para keluarga bangsawan untuk memobilisasi dan mengontrol penduduk lokal, sekaligus mereka juga memanfaatkan orde kolonial yang memberikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya (Nordholt, 2002:38).

Pada masa kolonial hubungan antara kepala desa dan jago menghasilkan modus operandi yang menyediakan ruang gerak yang cukup untuk masing-masing pihak, sedangkan biaya untuk kolusi ini harus ditanggung dengan menarik pungutan pada petani yang lemah. Sang jago dibebaskan dari kerja paksa dan pajak bumi oleh kepala desanya, namun ia juga membantu dana bagi kepala desa untuk membayar hutang-hutang kepala desa sebagai konsekuensi sistem tanam paksa. Para jago mendapatkan dana dari mencuri, namun ia tidak mencuri milik orang-orang sedesanya. Ia hanya mencuri di luar desanya, dimana desa tersebut tidak mempunyai orang kuatnya sendiri, atau dimana orang kuatnya tidak mempunyai perjanjian dengan dirinya (Nordholt, 2002:43).

Keberadaan para jago yang dianggap hanya memainkan peran marjinal dalam masyarakat kolonial ternyata mempunyai peran yang vital bagi kelanjutan kekuasaan kolonial di pedesaan Jawa. Para jago di jawa tidak menginginkan adanya pembaruan atau restorasi orde politik yang lama dikarenakan orde politik yang terakhir telah memberi banyak keuntungan kepada dirinya (Nordholt, 2002:70). Mereka hanya diberantas oleh pemerintah kolonial Belanda jika kepentingan orang eropa secara langsung terancam (Nordholt, 2002:71).

A.4. Catatan Kritis

Menarik dikaji dikarenakan interaksi yang bersifat mutual antara preman, masyarakat, dan penguasa juga terjadi hingga sekarang dan berlangsung dalam wilayah remang-remang. Preman diberikan stigma negatif oleh masyarakat dan penguasa, namun juga diberi tempat. Penguasa membasmi preman, sekaligus

membiarkan preman. Nordholt (2002:20) bahkan menyatakan hubungan antara preman dengan pemimpin atau penguasa mirip dengan hubungan pergundikan. Preman sebagai masyarakat rahasia *(secret society)* (Suhartono 1996: 92) yang mempunyai sistem, organisasi, jaringan, dan komunikasi, memungkinkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan elemen masyarakat lain dan dengan penguasa.

Pandangan masyarakat terhadap perilaku premanisme sendiri seringkali terkesan ambigu. Pada tingkat gagasan, tindakan kekerasan yang banyak dilakukan oleh preman senantiasa ditentang oleh masyarakat umum. Pemerasan dan pungutan liar dinilai sebagai gangguan terhadap kepentingan umum dan penyimpangan dari nilai moral yang berlaku. Masyarakat kemudian menempatkan pelaku tindakan ini dalam sudut pandang negatif. Paling tidak dapat dilihat dari sebutan yang digunakan terhadap pelaku kejahatan seperti bajingan, pemeras, preman dan sebagainya. Di sisi lain, masyarakat juga memberi kesempatan yang lebar kepada preman dalam menjalankan aktivitasnya yang berada di luar hukum. Para pedagang kaki lima atau pedagang pasar yang sudah biasa menyetor uang keamanan seringkali mendiamkan dan melindungi, untuk mengambil manfaat dari apa yang dilakukan preman.

Gambaran dunia preman di atas menemukan dayanya dari kesetiaan pada aturan main (*rule of the game)*. Pelembagaan semacam ini tidak akan berhasil sepenuhnya bila tidak ada persekongkolan dari *arena* dan *habitus* yang dibuat labil sebagai akibat dari rasa tidak aman yang diciptakan pada semua tingkat hierarki, bahkan sampai pada tingkat yang tertinggi.

Oleh karena itu, pengungkapan dan eksplorasi tentang praktik premanisme menjadi demikian penting. Jika preman demikian kuat pengaruhnya maka tentunya hal tersebut muncul dari strategi dan pertarungan dalam arena kekuasaan yang diperebutkan dari pihak-pihak lainnya, seperti aparat dan pedagang sendiri.

Pasar tradisional menjadi unit analisis yang menarik bagi peneliti, dikarenakan pasar tradisional merupakan sebuah tempat pertemuan yang *crowded.* Pasar tradisional walaupun becek dan terkesan kumuh, bagaimanapun masih memiliki tempat dominan di kalangan para pembeli. Di Indonesia, sebanyak 45 persen pembeli masih mendatangi pasar tradisional, sedangkan 34 persen berbelanja di pasar modern, dan 21 persen mendatangi kedua jenis pasar itu. Hal ini sebagaimana diungkapkan Direktur Eksekutif Retail Services Practice Asia Pacific AC Nielsen Bangkok, Peter Gale dalam seminar "*Changing Shopper Trends-How is Indonesia compared to the Rest of Asia*" di Jakarta (Kompas, 8 agustus 2003).

Keriuhan Pasar selalu membuka kesempatan bagi individu-individu untuk bergabung, membeli barang-barang kebutuhan, memperoleh penghasilan tambahan, atau untuk berkarir sebagai pedagang. Nugroho (2002:4) mengatakan pasar merupakan katup *(safety-falve)* bagi kelangsungan hidup orang-orang yang terlibat dalam interaksi pasar. Ruang interaksi yang dinamis dan riuh, serta intensitas jual-beli yang masih tinggi kemudian mengundang daya tarik bagi munculnya praktik premanisme dalam kehidupan pasar.

Berbagai fakta premanisme yang terjadi di pasar, memperlihatkan adanya dinamika interaksi antar berbagai aktor, terutama antara oknum aparat, preman dan bahkan pedagang sendiri. Munculnya preman yang mengatur para pedagang secara informal dengan mengutip uang dari mereka, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan formal petugas resmi yang tidak dapat mencakup seluruh kegiatan di tempat tersebut. Pasar dengan demikian terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan informal. Para petugas resmi seperti pengelola dan polisi menjadi penguasa formal di tempat itu, dan preman menjadi penguasa informal (Kompas, 6 Februari 1999). Di tempat yang *crowded* dan luas tersebut masing-masing penguasa tersebut dapat melakukan pekerjaannya tanpa saling mengganggu atau justru saling berkolusi dan memanfaatkan.

B. Fokus Kajian Penelitian

Berangkat dari sebuah rasa ingin tahu untuk memahami *bagaimana* praktik premanisme yang terjadi dalam lingkungan pasar di Surabaya, maka dipilih fokus kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah atribut preman pada komunitas pasar?
2. Bagaimanakah penyebab munculnya praktik premanisme di lingkungan pasar?
3. Bagaimanakah interaksi preman dalam jaringan kekuasaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak mengaburkan fokus kajian penelitian, maka perlu dibatasi pada aspek-aspek tertentu dari sebuah fenomena yang tergelar dalam laboratorium

sosial yang luas. Pembatasan itu dapat dilakukan baik pada level dan kelas masalah maupun dalam perspektifnya. Oleh karena itu, peneliti menetapkan ruang lingkupnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan maksud dan perhatian peneliti: untuk memahami Praktik premanisme. Praktik dipahami dalam kerangka strukturalisme generatif. Strukturalisme generatif mempertimbangkan struktur-struktur objektif yang tidak bisa dipisahkan dari analisis asal-usul struktur-struktur mental dalam individu-individu biologis yang sebagian merupakan produk penyatuan struktur-struktur sosial itu sendiri. Praktik premanisme dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan hasil dinamika dialektis antara preman sebagai pelaku sosial dengan struktur dan budaya tempat dirinya berada. Dinamika dialektis tersebut memunculkan bentuk-bentuk tindakan yang dapat diamati dalam hubungan relasional, ruang-ruang kekuasaan, sekaligus pemaknaan pelaku pada tempat dan waktu tertentu. Pelaku dalam hal ini adalah subjek yang secara relasional terlibat dalam aktivitas premanisme seperti pemungutan liar dan kekerasan.
2. Berdasarkan bahan yang ada di lapangan: Alasan dipilihnya lingkungan pasar adalah dikarenakan interaksi pasar merupakan interaksi yang *crowded*. Minat untuk membeli dan menjual di pasar tradisional yang masih tinggi menyebabkan pasar mengundang daya tarik bagi munculnya tindakan premanisme. Penelitian yang bersifat parsipatori di lingkungan tempat berkuasanya preman adalah langkah awal dalam membuka tabir praktek premanisme sembari menguji resistensi informan.

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

3. Berdasarkan kompleksitas asumsi-asumsi yang sudah dirumuskan: peneliti cenderung menetapkan perspektif kontruktivis sebagai paradigma penelitian. Schwandt (1994: 108) mengemukakan bahwa konstruktivis berupaya memahami dunia pengalaman hidup yang kompleks dari sudut pandang mereka yang hidup didalamnya. Tujuan utama dari pendekatan semacam ini adalah untuk memusatkan perhatian kepada ruang-hidup *(the life-world)*, sudut pandang *emic*, pemahaman makna, pencarian definisi aktor-aktor sosial atas suatu situasi serta pemahaman dalam arti *verstehen*.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam fokus kajian penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan atribut preman pada komunitas pasar
2. Mendeskripsikan penyebab munculnya praktik premanisme di lingkungan pasar
3. Mendeskripsikan interaksi preman dalam jaringan kekuasaan

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis, antara lain:

- Memperkaya kajian psikologi sosial yang bersifat dualitas antara pelaku dan struktur dalam memahami fenomena praktik premanisme di masyarakat.
- Memberi pengayaan bagi psikologi sosial, sosiologi, atau antropologi mengenai praktik premanisme.

2. Manfaat secara praktis, antara lain:
   - Memberikan gambaran tentang awal munculnya praktik premanisme di lingkungan pasar
   - Memberikan wawasan psikososial bagi para pengambil kebijakan sosial, maupun agen-agen kemasyarakatan yang peduli dan konsen terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian etnografi dituntut untuk memahami secara mendalam konteks yang diteliti, tanpa membawa prakonsep atau teori yang dimiliki. Peneliti dianjurkan untuk mengkonstruksi konsepnya berdasarkan proses induktif. Sebagaimana dikatakan Muhadjir (2001:131-132), konsep pada penelitian etnografi dikonstruksi sesuai dengan perspektif atau pola perilaku masyarakat yang menjadi objek penelitiannya, bukan dikonstruksikan menurut teori penelitian sendiri (Muhadjir, 2001:131-132).

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa peneliti etnografi secara tidak sadar atau setidaknya secara implisit mempunyai kerangka pikir tertentu sebelum terjun ke lapangan. Kerangka pikir tersebut akan berpengaruh secara eksplisit dalam sistematisasi penulisan laporan penelitiannya (Muhadjir, 2001:134).

Secara garis besar konseptualisasi teori dikelompokkan pada beberapa hierarki yaitu :

1. *grand theory* (termasuk model-modelnya)
2. teori-teori formal
3. teori-teori substantif

Eksplisitasi teori penelitian pada etnografi dilakukan berdasarkan temuan lapangan, yaitu pada waktu mengembangkan desain, sampel, analisis data, serta pemaknaan hasil temuan. Sesuai dengan sifat penelitian etnografi yang lebih

idiografik daripada nomotetik, teori yang banyak dieksplisitkan adalah teori jenjang ketiga, yaitu teori substantif.

Adapun *grand theory* yang dipilih oleh peneliti seringkali lebih implisit atau malahan tak disadari (Muhadjir, 2001:134). Contoh *Grand theory* adalah strukturalisme generatif, interaksionisme simbolik, behaviourisme, teori psikodinamik atau teori medan.

Bab ini menuliskan beberapa *grand theory* dan teori substantif yang secara subjektif dipercaya keberadaan dan kebenarannya oleh peneliti. Tidak dapat dipungkiri *grand theory* tersebut telah membentuk kerangka yang berpengaruh pada eksplisitasi pelaporan penelitian ini, namun hal tersebut telah berusaha diminimalisir dengan selalu mengkonfirmasi setiap hasil temuan lapangan pada informan penelitian.

Dapat dikatakan sifat dari penulisan teori ini bukan lagi ditujukan untuk perumusan konseptualisasi teoretik, melainkan sebagai pembanding yang memiliki nilai komparabilitas atau transferabilitas.

A. Gestalt dan Teori Medan

Kata Gestalt dalam bahasa Jerman menggambarkan sebuah bentuk konfigurasi yang sangat luas. Gestalt menunjukkan suatu sistem psikologi yang memiliki konsep bahwa suatu kejadian psikologi merupakan suatu kesatuan yang kompleks dan fenomena yang saling berhubungan. Psikologi gestalt memiliki karakter yang anti reduksionis (Brennan, 1991:187).

Pokok pikiran psikologi gestalt ialah bahwa tingkah laku ditentukan oleh medan psikofisis yang terdiri dari sistem tekanan-tekanan atau kekuatan-kekuatan yang terorganisasi yang sama dengan medan gravitasi atau medan elektromagnetik. Bagaimana kita mengamati suatu objek misalnya, ditentukan oleh seluruh medan dimana objek itu ada. (Hall & Lindzey, 1993:277).

Dalam perkembangannya, tokoh gestalt banyak menekankan pada *sense*, atensi, persepsi, asosiasi yang merupakan fungsi *high level cognition*. Hal ini kemudian memancing reaksi pada beberapa ilmuwan gestalt dikarenakan psikologi gestalt terlalu bersibuk diri pada penginderaan saja. Beberapa ahli kemudian lebih mengembangkan teori medan yang sangat dipengaruhi oleh semangat aliran gestalt yaitu mengutamakan keseluruhan daripada elemen atau bagian dalam studinya tentang jiwa manusia (Sarwono, 1998: 41).

Bagi Lewin, teori medan bukan suatu sistem psikologi baru yang terbatas pada suatu isi yang khas. Teori medan merupakan sekumpulan konsep dimana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep-konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku, dan sekaligus juga spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam situasi yang konkret (Hall & Lindzey, 1993 : 277).

Lewin juga menekankan kekuatan-kekuatan yang mendasari (kebutuhan-kebutuhan) sebagai penentu tingkah laku dan lebih menyukai gambaran-gambaran psikologis tentang medan daripada gambaran-gambaran fisik atau fisiologisnya.

A.1. Teori Medan

Teori medan sendiri merupakan bentuk pengaruh ilmu alam tentang konsep medan magnetik yang dikembangkan oleh Faraday, Maxwell, dan Hertz pada abad XIX. Akan tetapi, harus digarisbawahi apa yang dikatakan oleh Deutsch (1968) bahwa cara menyajikan dunialah dan bukan konsep-konsep dan fakta-fakta ilmu alam yang aktual itu sendiri yang telah diserap ke dalam psikologi (Hall & Lindzey, 1993).

Ciri-ciri utama dari teori medan Lewin dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi
2. Analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan dari mana bagian-bagian komponennya dipisahkan.
3. Orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. (Hall & Lindzey, 1993 : 278)

Salah satu ciri terpenting dari teori medan adalah bahwa teori ini menggunakan metode konstruktif. Metode konstruktif atau disebut juga metode genetik adalah metode yang digunakan Lewin untuk menggantikan metode klasifikasi yang dinilai Lewin sangat statis. Obyek studi Lewin adalah perilaku yang bersifat dinamis. Sifat dinamis ini ada pada metode konstruktif yang mengklasifikasikan obyek-obyek studinya berdasarkan hubungan antara satu obyek dengan obyek yang lain.

Metode konstruktif adalah konstruk-konstruk yang meliputi serangkaian konsep-konsep. Dengan kata lain, konstruk adalah bagian dari teori medan,

sedangkan konsep adalah elemen dari konstruk. Konstruk yang terpenting dari teori medan adalah medan itu sendiri yang dalam psikologinya diartikan sebagai medan kehidupan (*life sphere*).

Dalam psikologi, pendekatan teori medan semakin banyak diakui. Secara sederhana teori ini dapat dikemukakan dengan rumus : Tingkah laku atau lokomosi (*behaviour*) = Fungsi Person dan Lingkungan atau *Environment* = Fungsi *Life sphere* (Brown, 1936; Lewin, 1936; Waseso, 1986:29). Atau dengan persamaan matematika :

$$B = f(P.E) = f(L.p)$$

Oleh karenanya, dalam banyak hal, instabilitas lingkungan psikologis menyebabkan pula instabilitas pribadi (P) yang bersangkutan.

A.2. *Life sphere*

Life sphere dari seorang individu terdiri dari orang itu sendiri *(person)* dan lingkungan kejiwaan (psikologis) yang ada padanya. *Life sphere* adalah seluruh kenyataan psikologis. Ia mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku individu. Konsep *life sphere* meliputi segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami tingkah laku kongkret manusia individual dalam suatu lingkungan psikologis tertentu dan pada waktu tertentu. Singkatnya, tingkah laku adalah fungsi *life sphere*. Menurut Lewin (1936), tugas psikologi dinamik adalah menentukan secara tepat tingkah laku individu tertentu dari keseluruhan fakta psikologis yang ada dalam *Life sphere* pada suatu saat tertentu

(Hall & Lindzey, 1993:283). Dalam memahami *life sphere* terdapat perangkat konseptual yang harus dipahami yaitu energi, valensi, *tension*, daya dan lokomosi.

Jenis energi yang melakukan aktivitas psikologis disebut energi psikis. Energi psikis dilepaskan jika sistem psikis *(person)* berusaha kembali pada *ekuilibrium* setelah ia terlontar ke dalam suatu keadaan *disequilibrium* (Hall & Lindzey, 1993:300). *Disequilibrium* terjadi akibat meningkatnya *tension* dalam salah satu bagian sistem dibandingkan bagian-bagian sistem lainnya.

Tension dapat dipahami sebagai suatu keadaan dalam diri sang pribadi, atau lebih tepat, suatu keadaan dari suatu daerah dalam-personal dalam kaitannya dengan daerah-daerah dalam personal-lainnya. Manakala Lewin menunjukkan sifat-sifat dinamik dari suatu daerah atau sel dari daerah dalam-personal, ia menamakan daerah itu *sistem.*

Valensi (*valence*) dapat dikatakan sebagai suatu sifat konseptual suatu daerah dalam lingkungan psikologis (Hall & Lindzey, 1993:306). Valensi merupakan nilai daerah untuk seseorang. Ada dua macam nilai, yakni nilai positif dan negatif. Daerah yang bernilai positif merupakan daerah yang mengandung objek tujuan yang akan mereduksikan *tension* apabila individu memasuki daerah tersebut. Kebutuhan-kebutuhan memberikan nilai-nilai pada lingkungan. Kebutuhan mengatur lingkungan menjadi jaringan daerah-daerah yang menarik atau menolak.

Daya didefinisikan sebagai suatu hal yang yang menyebabkan perubahan. Perubahan dapat terjadi jika suatu wilayah ada valensi tertentu. Valensi dapat bersifat negatif atau positif tergantung pada daya tarik atau daya tolak yang ada

pada wilayah tersebut. Kalau suatu wilayah mempunyai valensi positif, maka ia akan menarik daya-daya dari wilayah lain untuk bergerak menuju arahnya.

A.3. Catatan kritis

Menarik dicermati, Lewin mengartikan segala tingkah laku selalu sebagai tingkah laku sadar yang dapat diprediksi sesuai dengan kecenderungan individu dan keseluruhan fakta psikologis. Dapat diprediksi dikarenakan tindakan selalu akan mengarah pada valensi. Suatu tingkah laku diterjemahkan Lewin merupakan interaksi antara pribadi dan faktor-faktor lingkungan sekitarnya (Schellenberg, 1997:68). Interaksi ini kemudian menjadi fungsi dari *life sphere*.

Suatu ciri yang jelas dalam teori medan adalah sifatnya yang tidak mementingkan peristiwa masa lampau. Secara sistematis, aspek kekinian dalam teori medan adalah berorientasi pada masa datang. Menurut Lewin, *life sphere* senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang akan berlaku, sehingga tindakan manusia dapat dikatakan selalu bertujuan. Walaupun tujuan itu tidak pernah menjadi suatu yang tetap *(fixed)*, namun selalu dipengaruhi kejadian masa kini dan oleh persepsi yang berubah-ubah mengenai apa yang mungkin berlaku (Schellenberg, 1997:81). Bagi Lewin, yang penting adalah faktor-faktor yang menggerakkan manusia pada satu masa dalam kehidupan mereka (Schellenberg, 1997:83). Masa lalu hanya berkaitan seandainya ia merupakan bagian dari kekuatan masa kini (Schellenberg, 1997:81).

Lewin tidak pernah menentukan tentang apa yang seharusnya menjadi bagian dalam suatu medan terutama tentang faktor yang berkaitan dengan

hereditas, pematangan dan belajar (Hall & Lindzey, 1993:338). Ia hanya menekankan pada kecenderungan situasional dan eksistensi personal sebagai pembentuk perilaku dalam perspektif kekinian. Perilaku hanya dimaknai sebagai pertimbangan-pertimbangan individu yang dianggap penting (Schellenberg, 1997:82) dengan mengesampingkan adanya perilaku habitual. Padahal sifat dari perilaku habitual seringkali tidak disadari.

Sebagai contoh; bagaimana Lewin menjelaskan seseorang yang secara bersamaan membaca partitur, bermain piano dan sambil berimprovisasi. Bila kemudian perilaku ini dimaknai sebagai pertimbangan-pertimbangan individu yang dianggap penting dan bersifat kekinian, bagaimana bisa secara bersamaan seseorang dapat membaca not balok, berimprovisasi sekaligus mempertimbangkan perilakunya.

Improvisasi seringkali berlangsung tak sadar dan tanpa memperhatikan pertimbangan. Seorang pianis baru bisa membuat improvisasi secara kreatif, setelah lama melatih diri dan menguasai aturan-aturan komposisi dan harmoni. Hanya setelah membatinkan tanda-tanda dan pembatasan-pembatasan musikal pianis itu dapat menyusun komposisi, mencipta dan mengimprovisasi.

Diakui bahwa teori Lewin merupakan satu teori psikologi yang paling formal yang dapat diterapkan pada hampir setiap keadaan. Pada saat tertentu, *life sphere*, dapat dikatakan sebagai konsep yang holistik dalam memandang cara individu bertingkah laku dengan perspektif kekinian, namun ia kemudian cenderung membawa siapapun pada perspektif yang hanya mengakui realitas yang bersifat parsial dan bukannya realitas yang kompleks.

Atas dasar ini maka konsep Lewin perlu diperkaya dan dikritisi. Sebagaimana dikatakan Leeper dan Garret (Hall & Lindzey, 1993:338), *Lifesphere* model Lewin, yang dikatakan sebagai konsep yang holistik ternyata masih meredusir konteks masa lalu. Ia hanya memandang perilaku dalam perspektif kekinian dan tak mampu menjelaskan kecenderungan perilaku habitual yang telah terinternalisasi oleh budaya dan sejarah.

Peneliti kemudian menghadirkan konsep habitus oleh Bourdieu. Walaupun secara permukaan antara teori Bourdieu dan Lewin mirip, namun terdapat perbedaan fundamental yang tidak dapat disatukan antara satu dengan yang lain. Secara tradisi filosofis teori Lewin dan Bourdieu adalah berbeda. Lewin lebih menekankan pada tradisi empirisme positivistik melalui eksperimen-eksperimen yang dilakukan (Schellenberg, 1997: 83), walaupun pemikirannya dapat dikatakan berbau organismik-fenomenologis. Bisa jadi bau fenomenologi dalam pemikiran Lewin dikarenakan kedekatan dan kerjasama yang pernah dijalin dengan Margaret Mead (Schellenberg, 1997:73&116) pencetus interaksionisme simbolik .

Sementara, walaupun Bourdieu pernah mengakui bahwa teorinya tentang medan (biasa disebut sebagai ranah) mirip dengan teori medan Lewin (Bourdieu: 1985; Mahaar, 2005:46), namun bukan berarti sama persis. Bourdieu bukanlah penganut tradisi empirik positivistik walaupun beberapa penelitiannya menggunakan data statistik. Tujuan Bourdieu menggunakan data statistik lebih bersifat deskriptif dan bukan menjadikannya spekulasi atas hubungan sebab akibat sebagaiman teknik analisis regresi (Jenkins, 1992). Secara pemikiran Bourdieu

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

berada di tengah, diantara strukturalisme dan fenomenologi. Ia kemudian dikenal sebagai strukturalisme generatif atau strukturalisme konstruktivis.

B. Habitus dan Strukturalisme Generatif

Pemikiran Bourdieu tumbuh pada masa pasca Perang Dunia II, ketika pertarungan dua mahzab besar berlangsung. Pada satu pihak Sartre meneguhkan pandangan eksistensialisme dan fenomenologi, yang menegaskan kebebasan penuh bagi subjek untuk berekspresi. Di pihak lain, strukturalisme Straussian menyuarakan determinisme tak sadar dari struktur atas subjek (Nugroho, 2002:21).

Bourdieu kemudian mengajukan kritiknya terhadap mahzab strukturalisme dan fenomenologi-eksistensialisme. Bourdieu menerima keberadaan struktur sebagai parameter implisit masyarakat untuk membuat pilihan strategis, namun menolak pernyataan bahwa pada masyarakat berlaku struktur objektif penentu setiap tindakan. Bourdieu juga menolak pandangan Sartre, dikarenakan subjek tidak hidup di alam kosong yang bisa berbuat sekehendak hati. Masih ada tekanan kondisi yang melatari seseorang untuk membuat pilihan-pilihan strategi tindakan atas apa yang ia hadapi (Nugroho, 2002:21).

Bourdieu lantas mengembangkan konsep habitus untuk menjelaskan realitas dan tindakan manusia sekaligus menengahi antinomi biner antara kedua mahzab tersebut. Konsep habitus menyatakan bahwa manusia masih memiliki intensi pilihan/improvisasi yang diregulasi dalam struktur yang terstruktur

(*structured and structuring structure*), yang menaungi hidupnya (Bourdieu,1994; dalam Giddens, 1994: 96).

Bourdieu (1979; dalam Mahar, dkk, 1990:13) menyebut habitus sebagai suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah *(durable, transposable dispotition)* yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Yang dimaksud sebagai disposisi adalah sikap, kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan, dan berpikir, yang diinternalisasikan oleh individu berkat kondisi objektif eksistensi seseorang. Secara mudah, habitus kemudian diindikasikan oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari segala sesuatu yang ada dalam realitas sosial. Dalam perjalanan hidupnya, manusia memiliki sekumpulan skema yang terinternalisasi. Melalui skema-skema itu mereka mempersepsi, memahami, menghargai, serta mengevaluasi realitas sosial. Skema-skema itu berhubungan sedemikian rupa membentuk struktur kognitif yang memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup kesehariannya bersama orang-orang lain (Takwin, 2005: xviii).

Adanya habitus merupakan bentuk dari ketidaksadaran kultural, yakni pengetahuan kultural yang secara tak sadar dianggap alamiah. Artinya habitus bukan pengetahuan bawaan, bukan kategori seperti dalam pengertian Immanuel Kant, bukan juga ide-ide bawaan dari dunia ide seperti dimaksudkan plato dan Kaum rasionalis. Habitus merupakan produk dari sejarah, kebiasaan, atau budaya yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus merupakan hasil pembelajaran yang

terjadi secara halus tak disadari dan tampil sebagai hal yang wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam atau 'sudah dari sananya'. Habitus memungkinkan manusia hidup dalam keseharian mereka secara spontan sekaligus meminimalisir kemungkinan penyimpangan (Takwin, 2005: xix). Sifat spontan tersebut menjadikan makna-makna awal ketika habitus terbentuk hanya menjadi rutinitas. Selanjutnya dalam habitus terdapat disposisi yang menyediakan pilihan tindakan pragmatis yang bersifat *now and here*, serta untuk masa depan.

Myles (1999; dalam Ritzer, 2003: 523-524) mengatakan bahwa walau habitus adalah sebuah struktur yang diinternalisasikan dan mengendalikan pikiran serta pilihan tindakan, namun habitus tidak menentukannya. Pembentukan dan berfungsinya *habitus* seperti lingkaran yang tidak diketahui dan tidak pernah berhenti ujung-pangkalnya karena berlangsung di dalam diri pelaku sepanjang hidupnya dan berubah-ubah sesuai dengan arena dan posisi dalam konteks ruang dan waktu. Habitus selalu dalam proses restrukturisasi, jadi praktik-praktik dan representasinya tidak sepenuhnya deterministik namun juga tidak sepenuhnya bebas.

Habitus bagaimanapun tidak lepas dari suatu bentuk determinisme yang seakan-akan memenjarakan tindakan-tindakan dalam kerangka pembatas-pembatas; di lain pihak, habitus memberi peluang bagi konsep individu otonom untuk melakukan improvisasi (Haryatmoko, 2003: 11).

Ilustrasi seorang pianis yang diberikan oleh Haryatmoko pada sub bab sebelumnya akan mempermudah pemahaman kita mengenai Habitus.

Sebagaimana improvisasi kreatif dari seorang pianis baru dapat dilakukan, setelah ia lama berlatih dan menguasai aturan komposisi dan harmoni. Hanya setelah membatinkan tanda-tanda dan pembatasan-pembatasan musikal (struktur-struktur yang dibentuk) pianis itu dapat menyusun komposisi, mencipta dan mengimprovisasi (struktur-struktur yang membentuk. Jadi habitus menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran, dan representasi (Haryatmoko, 2003:10).

Di samping dari diskursus antara kesadaran serta struktur objektif, kemungkinan dinamika habitus juga dapat dilacak dari oposisi internal yang berlangsung di dalamnya. Habitus sebagai struktur mengandaikan pluralitas elemen juga posisi. Tiap-tiap posisi, baik vertikal maupun horisontal, membedakan satu elemen dari elemen lain. Posisi berkait dengan tingkat kontrol atas kapital (*capital*), yang darinya pembedaan kekuasaan (*power*) serta pembedaan kesempatan lahir. Pilihan-pilihan yang secara objektif disediakan bagi tiap-tiap strata golongan dalam satu habitus pun berbeda (Nugroho, 2002:25).

B.1. Modal Kekuasaan

Para pelaku dalam ruang sosial menempati posisi masing-masing yang ditentukan oleh dua dimensi: pertama, menurut besarnya modal yang dimiliki, dan kedua, sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka. Beragam jenis modal kemudian dapat dipertukarkan dengan jenis modal lainnya. Pertukaran modal yang sering terjadi adalah pertukaran modal simbolik, sebab dalam pertukaran modal ini terdapat legitimasi untuk masuk dalam posisi tertentu. (Mahar, dkk, 1990:17)

Konsep modal Bourdieu berbeda dengan konsep modal Marxian yang mendasarkan pada ekonomi formal. Modal tidak hanya mencakup hal-hal material, namun juga terkait atribut yang memiliki signifikansi. Bourdieu mengatakan terdapat empat macam modal yang memungkinkan untuk membentuk struktur lingkup sosial, yaitu (Haryatmoko, 2003: 11-12):

1. modal ekonomi, yaitu kepemilikan atas aset-aset ekonomi seperti tanah, alat produksi, uang, tenaga kerja, dll;
2. modal budaya, yaitu meliputi berbagai pengetahuan yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Yang termasuk modal budaya ialah ijazah, pengetahuan yang sudah diperoleh, kode-kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, sopan santun, cara bergaul;
3. modal sosial, yaitu hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-keudukan sosial. Modal sosial dapat dikatakan sebagai hubungan sosial yang bernilai antar individu;
4. modal simbolik terwujud dalam dari kehormatan dan prestise seseorang. Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun bisa juga petunjuk-

petunjuk yang tidak kasat mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya.

Modal oleh Bourdieu juga dilihat sebagai basis dominasi, meskipun keberadaannya tidak selalu disadari atau disembunyikan oleh pelaku-pelaku. Hasil yang dicapai dalam pembesaran dan diversifikasi modal ini menentukan posisi dan status di dalam masyarakat (*social trajectory dan class distinction*) (Widjojo, 2003: 44; dalam Audifax, 2004:19).

Modal bersifat *convertible* atau dapat dipertukarkan satu sama lain. Konversi yang penuh dengan nilai kekuasaan adalah konversi dari berbagai modal ke modal simbolis, karena di dalam bentuknya yang berbeda dipersepsikan dan diakui sebagai absah (*legitimate*). Dalam konsteks ini, legitimasi adalah salah satu unsur penting dari modal simbolis. Dipandang sebagai seseorang dari kelas, status dan prestise tertentu, adalah pasti diterima sebagai absah. Posisi semacam itu memberikan kuasa pada seseorang atau suatu kelompok untuk memberi label, kuasa untuk merepresentasi akal sehat (*common sense*) dan di atas segalanya adalah kuasa untuk menciptakan 'versi resmi dunia sosial'(Widjojo, 2003:45; dalam Audifax, 2004:20).

B.2. Pertarungan dan Strategi

Mobilitas sosial dapat dijelaskan melalui berbagai strategi yang digunakan untuk mempertahankan dan mendapatkan berbagai bentuk modal. Pelaku selalu berusaha mempertahankan atau menambah jenis dan besarnya modal untuk memperbaiki posisi sosial. Mereka yang berada dalam posisi dominan biasanya

cenderung memilih strategi untuk mempertahankan kekuasaan, sementara bagi pelaku yang terdominasi berusaha mengubah distribusi kapital dan posisi-posisinya dalam medan atau arena perjuangan (Haryatmoko, 2003:15).

Persaingan antara pelaku dalam arena perjuangan tersebut biasa disebut sebagai permainan. Antara pihak-pihak yang bermain terdapat aturan main yang disepakati. Aturan main biasanya dibuat oleh pihak-pihak yang mendominasi. Sehingga tidak mengherankan bahwa hubungan-hubungan dominasi sering bersifat cukup tersembunyi karena sudah dibatinkan secara dalam oleh individu-individu (Haryatmoko, 2003:15). Namun, apabila pelaku yang terdominasi mengalami perubahan posisi dan pemilikan modal yang lebih besar, maka dapat dimungkinkan hasil persaingan yang tidak hanya akumulasi modal tetapi juga perubahan aturan-aturan main di dalamnya.

Konsep Bourdieu tentang strategi adalah bahwa pemikiran mengenai strategi layaknya suatu orientasi praktis, bukan kesadaran, bukan pula diperhitungkan atau dideterminasi secara mekanis. Strategi lebih bersifat produk yang dibatinkan berkaitan dengan pemahaman *rule of the game* yang kontekstual dengan ruang dan waktu (Widjojo, 2003:46; dalam Audifax, 2004:22).

Terdapat beberapa jenis strategi, yaitu strategi investasi ekonomi dan strategi investasi simbolis. Strategi investasi ekonomi merupakan upaya untuk mempertahankan atau menambah modal dari berbagai jenisnya. Modal disini bukan hanya modal ekonomi tetapi juga modal sosial, yang bermanfaat untuk melanggengkan hubungan-hubungan sosial, yang berjangka pendek maupun jangka panjang. Agar terpelihara kelangsungannya, hubungan-hubungan sosial itu

dijadikan sebagai suatu kewajiban yang berkelanjutan dalam bentuk pertukaran uang, kerja sama, penyediaan waktu, dan sebagainya. Sedangkan Strategi investasi simbolik adalah upaya mempertahankan atau meningkatkan pengakuan sosial, tujuannya untuk mereproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekhasannya, misalnya pewarisan nama. (Haryatmoko, 2003:15)

B.3. Praktik Sosial

Bourdieu mengajukan konsep praktik untuk memperlihatkan bahwa praktik sosial adalah hasil dinamika dialektis antara pelaku sosial dengan struktur dan budaya tempat dirinya berada (Jenkins, 1992:7). Bourdieu punya alasan ketika memilih kata praktik (*practice)* dan bukan *action* atau *behaviour*. Terdapat pengertian determinasi sosial dan ada pemaknaan di dalam kata praktik. Praktik adalah hasil relasi diskursif antara struktur dan diri.

Dalam kenyataan, habitus berhadapan dengan struktur dominan yang ada dalam sistem kehidupan. Pada dasarnya, habitus selalu berhubungan dengan strategi yang dilakukan individu untuk berusaha memenangi pertarungan makna menghadapi kehidupan sosial. Interaksi antara habitus dan struktur nantinya yang akan terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. Meskipun praktik adalah serangkaian tindakan yang bisa jadi tidak disadari, namun tersirat pertarungan-pertarungan politis antara pelaku dan struktur yang ada.

Jadi aktivitas kekerasan dan pungutan liar yang dilakukan preman bukan hanya sekedar aktivitas yang tanpa arti, tetapi merupakan hasil relasi diskursif antara struktur dan diri. Melihat aktivitas premanisme sebagai praktik sosial

membuat seseorang harus memandang perilakunya sebagai aktivitas yang tidak netral. Ia kental dengan muatan politis baik dalam diri pelaku maupun dalam sistem yang berlaku, meskipun aktivitas itu terjadi dalam ketidaksadaran pelaku.

Orang tidak serta merta secara mekanis menjadi preman dan kemudian berkuasa atas pedagang, seolah tindakan tersebut telah terprogram. Seseorang lebih sering menimbang-nimbang serta memilih-milih apa yang hendak ia lakukan, sebelum ia benar-benar berkuasa. Tenggang waktu yang diperlukan sampai membuat keputusan menunjukkan eksistensi kesadaran untuk memahami persoalan yang ia hadapi, walau dengan bersandar pada pengetahuan habitual masa lalu (Nugroho, 2002:24).

B.4. Medan (Field)

Bourdieu melihat medan *(Field)* sebagai sebuah medan perjuangan atau arena pertarungan (*champ*) (Bourdieu & Wacquant, 1992:101; dalam Ritzer, 2003: 525). Medan berada dalam ruang sosial yang menjadi tempat perjuangan antar individu dan atau antar kelompok. Seperti halnya medan magnet, medan perjuangan dipahami sebagai medan kekuatan. Medan perjuangan itu sering didefinisikan sebagai suatu jaringan atau konfigurasi hubungan-hubungan objektif antara berbagai posisi sosial (Haryatmoko, 2003: 11). Dalam sebuah medan perjuangan, posisi-posisi tersebut berinteraksi dengan habitus untuk mendapatkan posisi yang berbeda dari sebelumnya.

Pelaku yang masuk dalam suatu medan (politik, seni, intelektual, paguyuban pedagang) harus menguasai kode-kode dan aturan-aturan

permainannya. Setiap bidang memiliki aturan-aturan permainannya sendiri. Tanpa penguasaan kode-kode dan aturan-aturan tersebut orang dengan mudah akan terlempar keluar dari permainan.

Medan perjuangan kekuasaan merupakan lingkup hubungan-hubungan kekuatan antara berbagai jenis modal, atau lebih tepatnya antara para pelaku yang memiliki jenis-jenis modal (ekonomi, sosial, budaya, simbolik) tertentu sehingga mampu mendominasi medan perjuangan yang terkait (Bourdieu, 1994:56; Haryatmoko, 2003: 15). Kepemilikan kekuasaan yang mengandalkan modal ini menentukan akses keuntungan-keuntungan tertentu yang dipertaruhkan dalam pertarungan. Dalam hal ini, medan perjuangan mirip dengan pasar, artinya ada penghasil dan konsumen. Penghasil adalah mereka yang memiliki modal-modal tertentu yang saling berhadapan. Pertaruhannya terletak pada akumulasi bentuk modal tertentu yang memungkinkan untuk mencapai dominasi. Dengan demikian, semakin besar dan beragam modal yang dikuasai, pelaku dapat menduduki posisi yang lebih tinggi daripada yang lain. Modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana tetapi sekaligus sebagai tujuan.

Ruang sosial (*espace social*) mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Konsep ini memandang realitas sosial sebagai suatu topologi (ruang). Hierarki di dalam ruang sosial ditentukan oleh distribusi diferensial modal-modal. Ruang sosial individual dihubungkan dari waktu (*life trajectory*) kepada serangkaian medan, yang di dalamnya orang berjuang untuk memperbesar dan memperoleh modal-modal baru. Dalam konteks medan, dunia sosial, dan pertarungan perebutan modal, terdapat koalisi-koalisi (kelompok politik, dll.)

yang diciptakan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dalam ruang sosial (Widjojo, 2003:43; Audifax, 2004:19).

C. Kekuasaan

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu (Poloma, 1979:52; Santoso, 2002:163).

Menurut Amitai Etzioni, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi (Poloma, 1979; Santoso, 2002:163).

Dari dua definisi di atas kita dapat dilihat adanya perbedaan pandangan antara Weber dengan Etzioni. Definisi Weber nampak lebih netral, sedangkan Etzioni memperlihatkan hubungan yang agak negatif dan kurang diinginkan, karena mereka yang dikuasai merasa kehilangan kebebasan.

Menurut Etzioni, aset/milik/modal yang ada pada seseorang (misal uang, benda berharga, kekuatan fisik, dan pengetahuan) dapat dipergunakan oleh pemiliknya untuk menunjang kekuasaan. Aset sering juga disebut kekuasaan potensial atau sumber kekuasaan. Hal ini membedakan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan yang sudah terwujud dalam bentuk tindakan. Aset bersifat stabil, sedangkan kekuasaan bersifat dinamik atau prosesual. Gejala kekuasaan adalah menerjemahkan aset-aset ini ke dalam kekuasaan akan menghasilkan pelbagai sanksi, imbalan, dan alat-alat (instrumen) untuk menghukum mereka yang

menghalangi dan memberikan fasilitas kepada mereka yang mengikuti kemauannya. Sanksi, imbalan dan alat-alat ini dapat bersifat fisik, materiil, atau simbolik (Santoso, 2002:163).

Ada tiga jenis kekuasaan menurut Etzioni, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuasaan utilitarian

   Kekuasaan utilitarian akan muncul dari aset utilitarian apabila aset-aset ini (pemilikan ekonomi, teknik administratif, tenaga kerja) digunakan oleh mereka yang memilikinya, sehinggap perlawanan itu dapat diatasi. Misal dalam kasus penyuapan, berarti orang yang punya uang mempunayai kekuasaan utilitarian;

2. Kekuasaan koersif

   Kekuasaan koersif muncul jika orang menggunakan aset (berupa senjata, tenaga manusia) dengan kekerasan untuk mengubah orang lain, atau menghukum mereka yang menghalanginya;

3. Kekuasaan persuasif

   Aset (berupa nilai, perasaan, kepercayaan) digunakan untuk memiliki kekuasaan. Sehingga bila ada perlawanan akan mudah diatasi tanpa kekerasan, misalnya dengan memuji seseorang. (Santoso, 2002:164)

Bila Etzioni mengenal istilah aset untuk kekuasaan yang bersifat potensial, maka Bourdieu mengenal konsep modal sebagai bentuk kekuasaan. Konsep modal Bourdieu lebih mencakup kemampuan untuk melakukan kontrol dan kekuasaan. Kontrol dan kekuasaan tersebut dapat terhadap masa depan, diri sendiri, dan orang lain. Bourdieu menjelaskan modal dalam hubungannya dengan logika posisi-

posisi kekuasaan dalam masyarakat. Modal merupakan hubungan sosial, artinya suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam medan perjuangan di mana ia memproduksi dan mereproduksi (Bourdieu,1979:127; dalam Haryatmoko, 2003:11). Posisi berbagai pelaku dalam lingkungan ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif dari modal yang mereka miliki (Anheier, dkk, 1995; dalam Ritzer, 2003:525).

Dari Weber, Bourdieu mengembangkan apa yang disebut sebagai tindakan bermakna. Tindakan manusia diarahkan pada makna dalam arti tindakan terkait dengan reaksi orang lain atau perilaku orang lain. Dimensi Simbolis yang oleh Weber dikaitkan dengan legitimasi kekuasaan (tradisional, kharismatik, legal-rasional), oleh Bourdieu digunakan untuk menjelaskan mekanisme-mekanisme dominasi. Bourdieu melihat bahwa dalam kekerasan simbolis yang dikuasai justru menerima dan merasa solider dengan yang menguasai dalam konsensus yang sama tentang tatanan yang ada. Bagi Bourdieu dominasi tidak melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan *(habitus)*

D. Pasar Tradisional

Sebagaimana dipahami banyak orang, istilah "pasar" menunjukkan "lokus.". Pasar sebagai lokus merujuk tempat tertentu yang digunakan orang untuk berjual-beli komoditas secara tradisional, tanpa administrasi serta perhitungan yang cermat, tanpa dilengkapi teknologi modern, dan lain-lain (Longman, 1983:643; dalam Nugroho, 2002:41).

Pasar awalnya hanya menempati suatu lahan seadanya di tepi jalan. Mereka menggelar koran untuk alas dengan jumlah dagangan yang terbatas, namun kemudian terjadi rutinitas transaksi dalam periode yang cukup lama. Ketika transaksi perdagangan sudah cukup mapan yang ditandai oleh rutinitas transaksi, kemudian pasar akan cenderung dibangun permanen. Nugroho (2002:42) menjelaskan terdapat beberapa tujuan untuk mempermanenisasi pasar, pertama, untuk melindungi para pelaku yang bertransaksi berikut barang dagangannya dari kendala cuaca seperti panas atau hujan. Kedua, untuk mendorong berlangsungnya transaksi yang lebih intens. Dan ketiga, yang agak jauh dari logika pasar, yaitu untuk mempercantik kota.

Batas lokus pasar kemudian akan semakin diperjelas ketika pasar sudah dipermanenisasi. Namun pada kenyataannya permanenisasi pasar ini tidak pernah menyurutkan pedagang kaki lima yang berjualan di luar areal pasar permanen. Penyebabnya bisa jadi dikarenakan dua hal, pertama, stan pasar tak lagi dapat menampung aktivitas perekonomian mereka Kedua, di luar pasar tersebut mempercepat pertemuan dengan pembeli. Mereka kemudian dituding aparat menjadi biang macet, kumuh, dan merusak estetika kota, serta dituduh merusak harga oleh para pesaingnya. Dengan alasan demi nafkah hidup, mereka bertahan bila mereka terancam diusir atau diobrak oleh aparat yang berwenang. Nugroho (2002:22) menyatakan secara *de facto*, keberadaan para pedagang tersebut menyatakan perluasan lokus-pasar. Lokus-Pasar Blackwell Hall di London yang berdiri tahun 1397 dan diperluas tahun 1558, dan dikembangkan lagi menjadi berukuran raksasa di tahun 1672 menjadi bukti adanya perluasan tersebut

(Braudel, 1992:31,33; Nugroho, 2002:42). Membludaknya pedagang kaki lima di sekitar Pasar Keputran juga menunjukkan bahwa bangunan permanen pasar tidak dapat menjadi pembatas yang mampu menghalangi perkembangan arus perdagangan di lokus-pasar.

Pasar kemudian menjadi milik pedagang dikarenakan mereka telah menjadi penggerak dan penghidup lokus pasar. Lokus pasar kemudian mengakumulasikan volume setiap penjualan bernilai kecil dalam frekuensi yang sangat tinggi guna menciptakan kapitalisasi yang besar. Kata Geertz, "*The* pasar *trader is a true marginal businessman,*" yang mengalirkan "*goods... through the market channels at a dizzying rate, not as broad torrents but as hundreds of little trickles, funneled through an enormous number of transactions.*" (Geertz, 1968; 31,41; Nugroho, 2002:43)

Bila demikian, apa yang disebut kepadatan serta kepenuhsesakan adalah wajar untuk menjadi ciri lokus-pasar. Pasar kemudian menjadi kegaduhan orang banyak (Moehammad, 1996:110). Bersama dengan mantri pasar, tukang parkir, kuli angkut, penjaga malam atau centeng, preman, pembunga uang (atau bank plecit), pemungut sisa-sia serta peminta-minta, bandar judi gelap, para pedagang dan konsumen menciptakan pasar yang penuh dengan keramaian riuh rendah (Nugroho, 2002:43).

Transaksi yang terjadi dalam pasar kemudian tak hanya melibatkan uang dan barang, tetapi juga pertukaran informasi tentang banyak hal, termasuk politik. Pasar kemudian menjadi ruang publik yang penting dalam perkembangan kota. Di kancah pasar pula dapat terjadi tipu daya, persuasi, tekanan, dan pengisapan.

Moehammad (1996:124) menyatakan bahwa dari tengah pasar terdapat daya dorong yang bisa menggairahkan dan menciptakan dinamika, sambil mengeliminir mereka yang rugi dan menyenangkan mereka yang menang.

Di Indonesia kegiatan ekonomi informal melalui pasar tradisional memegang peranan hampir 70 persen, paling tidak jika dilihat dari segi penyerapan tenaga kerjanya (Kompas, 18 Juli 2001). Mereka hidup bergantung pada pasar dan sebagian bahkan menemukan kesejahteraannya dalam pasar. Di Lima, Peru, kecenderungan tersebut bahkan tampak secara menyolok. Sektor informal yang banyak dihuni oleh rakyat jelata menjadi kunci perkembangan perekonomian negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok golongan penduduk yang melarat. Penelitian Hernando De Soto pada tahun 1985 dan 1986, di bidang komersil atau perniagaan ditemukan bahwa 42,2% dari tenaga yang terlibat dalam perniagaan, mengalokasikan kurang dari 60% bahan pangan di kota. Kekuatan wirausaha informal juga tidak hanya terbatas dalam bentuk perdagangan kaki lima. Para pedagang kaki lima bahkan berupaya keras meninggalkan jalan-jalan menuju pasar dan pusat perdagangan. Selama 35 tahun, terdapat 274 pasar informal yang dibangun oleh pedagang yang bernilai US$40,9. Pasar tersebut sekaligus mempekerjakan 40.000 orang. Jumlah ini menjadi lebih berarti bila melihat hanya 57 buah pasar yang dibangun oleh pemerintah selama periode yang lebih panjang (De Soto, 1991: 42-43).

E. Preman

Preman semula diartikan partikelir atau swasta namun kemudian diartikan sebagai sebutan kepada orang jahat (KBBI, 1990: 700). Istilah preman kemudian

secara khusus ditujukan kepada tindakan dua atau lebih pemuda-pemudi yang dipandang tercela, menjengkelkan dan merugikan kepentingan perorangan dan masyarakat dalam arti luas (Atmasasmita, 1995: 77). Kata preman sendiri berasal dari kata *vrij-man* artinya adalah orang yang bebas dari kerja paksa. Arti ini [illegible] samaran' menjadi 'perantara kekerasan politik' (Ryter, 1998; dalam Nordholt, 2002: 22).

Dalam artikel "Vrijman" yang preman (Kompas, 2 September 2000) disebutkan bahwa asal kata preman berlatar belakang sejarah hampir 400 tahun. Beberapa bulan setelah Jan Pieterszoon Coen van Hoorn meresmikan Jayakarta menjadi Batavia pada 30 Mei 1619, ia mengeluarkan ordonansi memilah-milah penduduk Batavia, dikarenakan kesulitan ransum. Dalam Batavia hidup lima kelompok masyarakat. Kelompok pertama adalah orang Eropa. Kedua, orang Timur Asing yang bekerja untuk VOC. Ketiga, istri dan budak. Keempat, anak-anak karyawan VOC. Yang kelima adalah golongan warga biasa atau *burghers*, atau disebut juga warga bebas alias *vrijman*. Kelompok *vrijman* sendiri pada mulanya adalah karyawan VOC yang sudah bebas dari kontrak kerja dengan VOC. Kelompok *vrijman* diijinkan tinggal di dalam kota, namun tidak diperbolehkan bekerja dan berdagang. Akibatnya mereka luntang-lantung dan terpaksa bekerja apa saja, meski melawan hukum (Kompas, 2 September 2000).

Dalam perkembangannya di masyarakat, kata-kata preman merujuk pada berbagai macam arti, yaitu preman penjahat, preman berandalan (Kompas, 2 September 2000), preman pengelola informal (Jawa Pos, 27 maret 2004), atau

preman yang merujuk pada arti mafia. Penggunaan kata preman pun merujuk pada berbagai macam tindakan kekerasan oleh pihak tertentu Tidak heran perilaku anggota DPR yang berjibaku ketika sidang dianggap setali tiga uang dengan perilaku preman. Penyerangan Amerika pada Irak disebut Herry Priyono sebagai tindakan preman (Kompas, 22 April 2003). Jagoan yang berkuasa dan melakukan pungutan liar dan teror juga tidak luput dari julukan preman (Abidin, 2005). Walaupun tidak ada makna tunggal atas preman, namun dapat digeneralisir bahwa istilah preman selalu berkonotasi buruk, dikarenakan mengacu pada perilaku-perilaku kekerasan.

Modus operandi preman pada umumnya lebih mengandalkan pada kekuatan ancaman, bersifat semi terorganisir, dan memiliki daerah kekuasaan tertentu yang relatif tetap (Kompas, 25 april 2001). Mengacu pada konteks pasar, penguasaan preman atas pedagang seringkali dilakukan dalam bentuk pemerasan secara berkala. Pedagang dijadikan komoditas atas tindakan preman yang menguasai lahan tertentu dengan label paguyuban atau pelindung pedagang. Menurut Mustofa (Kompas, 6 Februari 1999), hal ini merupakan penghalusan bentuk dari pemerasan. Komoditas yang ditawarkan satu kelompok preman biasanya adalah perlindungan dari penggusuran aparat berwenang atau penjagaan dari serangan kelompok preman lain.

Menurut kriminolog Universitas Indonesia Johannes Soetoyo, pengaturan secara formal oleh petugas resmi di tempat keramaian, seperti pengelola dan polisi, tidak dapat mencakup seluruh kegiatan di tempat tersebut. Akibatnya, muncullah preman-preman yang mengatur para pedagang dengan mengutip uang

dari mereka. Pembagian kekuasaan di pasar atau terminal terjadi secara tersembunyi. Para petugas resmi menjadi penguasa formal di tempat itu, dan preman menjadi penguasa informal. Di antara keduanya terjadi interaksi yang membiarkan masing-masing penguasa melakukan pekerjaannya tanpa saling mengganggu, namun tidak tertutup kemungkinan juga terjadi kolusi di antara keduanya (Kompas, 6 Februari 1999).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peran paradigma sangat penting untuk memberi gambaran mengenai apa yang penting (dan tidak penting), apa yang dianggap mungkin (dan tidak mungkin) dan sah (dan tidak sah) untuk dilakukan, serta apa yang dapat diterima (dan tidak diterima) oleh akal sehat (Patton, 1990: dalam Poerwandari, 2001 :10).

Paradigma merupakan rangkaian kepercayaan dasar (atau metafisik) berkenaan dengan prinsip-prinsip utama dan pokok yang merupakan cara-pandang-terhadap dunia *(world-view)*. Cara pandang terhadap dunia ini mendefinisikan hakekat dari dunia, tempat individu di dalamnya serta rentang hubungan yang mungkin dengan dunia serta bagian-bagiannya (Guba & Lincoln, 1994:105-106).

Guba dan Lincoln (1994:109) mengemukakan bahwa tiap-tiap paradigma akan selalu berkaitan dengan tiga pertanyaan mendasar dalam penelitian, yakni ontologis, epistemologis dan metodologis. Pertanyaan dalam dimensi ontologis akan berkenaan dengan : 'apakah sebenarnya hakekat hubungan antara pencari-tahu (*knower*) dengan obyek yang diketahui (*known*)?'. Sedangkan pertanyaan dalam dimensi metodologis akan berkenaan dengan : 'bagaimana cara pencari-tahu (*knower*) mencari tahu tentang apa yang dipercayainya dapat diketahui (*can be known*)'.

Denzin dan Lincoln (1994; Poerwandari:11, 2001) menggolongkan adanya empat (sub) paradigma yakni

1. Positivistik dan post-positivis
2. Konstruktivis-interpretif
3. Kritikal (marxist, emansipatoris)
4. Feminis-poststruktural

Berkenaan dengan rangkaian penjelasan di atas, penelitian ini mendasarkan prosesnya sesuai dengan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis jika merujuk kepada tiga pertanyaan paradigmatik Guba dan Lincoln sebagaimana disebutkan diatas memiliki ciri-ciri dimensional sebagai berikut:

1. Ontologi Relativis

   Secara ontologis, paradigma Konstruktivis memandang bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

2. Epistemologi transaksional dan Subyektivis

   Secara epistemologis, paradigma Konstruktivis memandang bahwa pemahaman tentang realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.

3. Metodologi Hermeneutik dan Dialektik

   Secara metodologis, paradigma Konstruktivis menekankan kepada empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas yang diteliti.

Berdasarkan paradigma yang dipilih peneliti, maka peneliti menggunakan tipe penelitian etnografi. Penelitian tipe etnografi menurut Guba & Lincoln merupakan sebuah penelitian naturalistik *(naturalistic inquiry)* yang menekankan pada realitas subjektif sebagai fokus perhatian peneliti. Pendekatan yang dibangun dalam penelitian naturalistik ini memiliki begitu banyak persamaan dengan filsafat naturalisme yang mengakui bahwa realitas bersifat ganda (multiple realities) dan konstruksinya-terutama-berada dalam pikiran manusia (Guba & Lincoln, 1994:81).

Ciri substansial penelitian etnografi menurut Atkinson Hammersley (1994:248) adalah sebagai berikut :

1. Lebih menekankan kepada penjajagan terhadap hakekat fenomena sosial tertentu daripada pengujian hipotesis terhadap fenomena sosial tersebut.
2. Cenderung mengutamakan kerja dengan data yang "tidak terstruktur", yakni data yang tidak tersusun menurut kategori analisis yang bersifat tertutup
3. Lebih menekankan pada penyelidikan terhadap sejumlah kecil kasus –bisa jadi hanya satu kasus- secara rinci
4. Analisis datanya melibatkan interpretasi eksplisit atas makna-makna dan fungsi-fungsi tindakan manusia yang berupa deskripsi dan penjelasan verbal, dimana peran kuantifikasi dan analisis statistik dapat dikesampingkan.

B. Unit Analisis

Tellis (1997) mengungkapkan bahwa unit analisis merupakan analisa khas yang bekerja dalam sebuah kerangka sistematik dan bukan kekhasan dari individu atau kelompok. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah praktik premanisme dalam konteks lingkungan pasar.

C. Informan Penelitian

Miles dan Huberman, seperti dikutip Sarantakos (1993; Poerwandari, 2001:56) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sedikit banyak dapat dianalogikan dengan proses penyelidikan (investigasi), tidak banyak berbeda dengan kerja detektif yang harus mendapat gambaran dan *sense* tentang fenomena yang diselidikinya. Penentuan siapa yang menjadi sampel yang bergerak mengikuti temuan-temuan di lapangan. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel seringkali diperdebatkan. Hal ini terkait dengan istilah sampel dalam penelitian kuantitatif yang berkonotasi dengan jumlah. Beberapa peneliti kualitatif kemudian menggantinya dengan istilah subjek atau sasaran penelitian.

Berdasarkan hal diatas, Glaeser dan Strauss (Muhadjir, 2001:166) menggunakan sampel teoritik yang hampir mirip dengan sampel purposif, yakni memenuhi kriteria tertentu. Mengangkat pemikiran sampel teoritik dari Glaeser dan Strauss, Guba mengetengahkan empat karakteristik sampel purposif, yaitu :

1. desain sampel bersifat sementara. Spesifikasi sampel memperhatikan konteks;

2. seleksi berkelanjutan unit-unit sampel. Unit-unit sampel diseleksi secara berkelanjutan sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan;
3. penyesuaian atau pemfokusan sampel secara berkelanjutan. Dari informasi dan pemahaman lebih dalam di lapangan memungkinkan peneliti untuk merevisi pengambilan sampelnya;
4. seleksi sampel menuju ke kejenuhan informasi. Bila dengan sampel yang telah diambil, ada informasi yang masih diperlukan, dikejar lagi sampel yang diperkirakan memuat informasi yang belum diperoleh; sebaliknya bila dengan menambah jumlah sampel hanya diperoleh informasi yang sama, berarti jumlah sampel sudah cukup, karena informasinya sudah jenuh. (Muhadjir, 2001:166-167)

Meskipun demikian, di dalam studi etnografi lebih sering menggunakan istilah informan sebagai istilah sepadan untuk istilah sampel/subjek. Spradley membedakan istilah tersebut. Penelitian ilmu sosial yang menggunakan subyek/sampel biasanya mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis. Peneliti biasanya tidak tertarik untuk menemukan pengetahuan budaya dari subyek; mereka berupaya untuk menegaskan atau membatalkan suatu hipotesis tertentu dengan mempelajari respon atau jawaban individu; sehingga dengan demikian subyek tidak mendefinisikan sendiri hal-hal penting yang harus ditemukan peneliti (Spradley, 1997:38). Di sisi lain, penelitian etnografi yang menggunakan informan mensyaratkan etnografer untuk meminta mereka berbicara dalam bahasa atau dialeknya sendiri; informan memberikan model untuk dicontoh etnografer;

informan merupakan sumber informasi bagi etnografer, atau secara harfiah mereka adalah guru bagi etnografer (Spradley, 1997: 35).

Untuk lebih menghasilkan data yang baik dan akurat, maka diperlukan pemilihan informan yang baik pula. Spradley (1997: 61-70) lima persyaratan minimal untuk informan yang baik, diantaranya:

1. informan yang mempunyai tingkat enkulturasi penuh;
2. informan yang masih mempunyai keterlibatan langsung dengan suasana budaya;
3. informan yang mengetahui suasana budaya yang tidak dikenal oleh peneliti;
4. informan yang mau menyediakan cukup waktu bagi peneliti;
5. informan yang memberikan serta menganalisis pengetahuannya berdasarkan perspektif dirinya sendiri atau budayanya sendiri, tidak menganalisis berdasarkan perspektif luar seperti ilmu sosial.

Berdasar rujukan di atas, pemilihan informan dalam penelitian ini ditentukan sesuai konteks dan situasi penelitian yang berkembang di lapangan. Meskipun demikian, kiranya perlu disebutkan beberapa kriteria awal informan penelitian berdasarkan kepekaan isu-isu teoritis dan sebagaimana fokus penelitian, diantaranya ialah:

1. Mereka yang masuk dalam kategori preman yang melakukan praktik pungutan liar dan kekerasan serta memiliki daerah kekuasaan tertentu yang relatif tetap;

2. Pelaku yang mempunyai hubungan relasional, baik penguasa yang terlibat dalam aktivitas preman, maupun pelaku yang menjadi objek tindakan preman di lingkungan pasar;
3. Mempunyai pengalaman hubungan relasional dalam praktik premanisme dalam kurun waktu yang cukup lama; diasumsikan minimal sekitar satu tahun terlibat langsung dalam praktik premanisme;

Kriteria-kriteria tersebut hanya sebagai panduan awal saja, yang berarti tidak dipancang secara kaku terutama jika ada temuan-temuan yang berkembang di lapangan nanti.

D. Metode Pengumpulan Data

Sifat penelitian kualitatif yang belum dapat diprediksi sejak awal dan dapat berubah seiring dengan perkembangan dan proses penelitian menyebabkan penelitian ini sangat mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian. Manusia sebagai instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.

Peneliti sebagai instrumen penelitian memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Guba dan Lincoln, 1994; Nasution, 1996: 55-56):

1. peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian;
2. dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengunpulkan aneka ragam data sekaligus;
3. tiap situasi merupakan suatu keseluruhan;

4. tidak dapat memahami suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia dengan pengetahuan semata-mata;
5. dapat segera menganalisis data yang diperoleh;
6. dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan segera menggunakannya sebagai klarifikasi untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan;
7. dapat menggunakan respons yang aneh daripada perilaku kebanyakan, bahkan yang bertentangan untuk dipakai mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diselidiki.

Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, etnografi mengumpulkan datanya dengan menggunakan tiga metode, yakni observasi partisipatori, wawancara mendalam, dan studi dokumen (lihat Banister, dkk., 1994: 36).

D.1. Observasi

Data observasi menurut Patton (1980; Nasution, 1996:59-60) merupakan suatu deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Pengamatan secara langsung di lapangan memungkinkan peneliti untuk:

1. lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi, sehingga ia dapat memperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh;

2. menggunakan pendekatan induktif yang tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan (*discovery*);
3. melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap "biasa" dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara;
4. menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh subjek dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi;
5. menemukan hal-hal di luar persepsi subjek, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif;
6. memperoleh kesan-kesan pribadi, misalnya merasakan suasana situasi sosial;

Dengan berada secara pribadi dalam lapangan, peneliti mempunyai kesempatan mengumpulkan data yang kaya, yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih terinci dan lebih cermat. Spradley (1997:64) mengemukakan tentang tiga komponen dalam situasi sosial yang dapat dijadikan fokus pengamatan, yakni ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas).

D.2. Wawancara

Secara umum terdapat tiga pendekatan dasar dalam memperoleh data kualitatif melalui wawancara (Patton, 1990; Poerwandari, 1998:75-76) :

1. Wawancara informal: Proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah. Tipe wawancara demikian umumnya dilakukan peneliti yang melakukan observasi partisipatif. Dalam situasi demikian, orang-orang yang diajak bicara mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai secara sistematis untuk menggali data. Nasution (1996:74) mengatakan bahwa wawancara ini mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
2. Wawancara dengan pedoman umum : Proses wawancara ini dapat berbentuk wawancara terfokus, yakni wawancara yang mengarahkan pembicaraan pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan/pengalaman subjek. Menurut Nasution (1996:74), pada wawancara ini, peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, yaitu menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok, topik-topik atau masalah-masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.
3. Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka : Dalam bentuk wawancara ini pedoman wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan wawancara sekuesi yang tercantum, serta menanyakannya dengan cara yang sama pada responden-responden yang berbeda (Poerwandari, 1998:76).

Dalam penelitian ini, pendekatan pertama dilakukan sebagai langkah awal untuk perkenalan peneliti, membangun *raport* dengan informan, dan persiapan

wawancara lebih lanjut. Setelah berjalan lancar, baru digunakan pendekatan kedua dengan garis besar topik wawancara yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan.

Adapun garis besar topik wawancara penelitian dirancang dan dikembangkan sebagai berikut:

Tabel 1

Garis Besar Topik Wawancara

NO	ASPEK PERTANYAAN	EKSPLORASI AWAL
I	Atribut preman	1. Atribut yang diberikan aparat kepada preman 2. Atribut yang diberikan pedagang kepada preman 3. Atribut preman atas aktivitasnya 4. Tujuan pemberian atribut
II	Penyebab munculnya praktik premanisme di lingkungan pasar	1. awal aktivitas pemungutan liar 2. motif pendorong preman melakukan pungutan liar 3. Sikap pedagang atas pungutan liar
II	interaksi preman dalam jaringan kekuasaan	1. wewenang aparat atas lahan 2. wewenang aparat atas tindakan preman 3. keterlibatan aparat atas preman 4. sikap preman terhadap aparat

Panduan pertanyaan wawancara tersebut disusun berdasarkan tesis penelitian yang landasannya adalah teori-teori yang relatif sudah mapan *(established)*. Meskipun demikian, dalam praktek, panduan pertanyaan itu bersifat sangat fleksibel dan terbuka. Artinya, wawancara yang dilakukan dengan para informan di lapangan tidak dibatasi sepenuhnya oleh panduan wawancara tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan konteks di lapangan. Dengan cara ini, peneliti

berharap bisa menemukan fakta atau gejala baru di lapangan, yang belum ada dalam teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

D.3. Studi Dokumen

Menurut Bogdan selain observasi partisipan dan wawancara, dokumen sebagai kata-kata tertulis dari responden dapat pula digunakan. Bogdan membedakan dua macam dokumen, yaitu dokumen pribadi dan dokumen formal (Muhadjir, 2001:141). Dokumen pribadi seperti diari, surat pribadi, otobiografi dapat digunakan untuk mengetahui *emic* seseorang tentang dunia sekitarnya. Dokumen resmi biasanya dibuat oleh organisasi. Dokumen tersebut dapat bersifat publik, tetapi juga ada yang bersifat intern dan konfidensial.

Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data (Nasution, 1996:86). Dokumen yang banyak dipelajari dalam penelitian ini adalah dokumen yang bersifat publik.

D. Analisis Data

Penelitian etnografi mengenal dua macam desain penelitian, yaitu: desain studi kasus dan desain *multiple site and subject studies*. Studi kasus merupakan pengujian yang mendalam dan merinci dari satu konteks, dari satu subjek, dari satu kumpulan dokumen, atau dari satu kejadian khusus. Umumnya studi kasus cenderung merupakan studi deskriptif yang memiliki ragam tujuan dan bentuk yang dapat dipilih, seperti teoretik, abstrak, atau kongkret operasional. Bila

peneliti menggunakan dua atau tiga subjek atau kasus disebut sebagai *multi-case studies*. Tujuan dari multi case studies adalah deskriptif atau komparatif.

Logika yang digunakan oleh *multiple site and subject studies* berbeda dengan *multicase studies*. *Multiple site and subject studies* diarahkan pada pengembangan teori dan biasanya memerlukan banyak lokasi dan subjek lebih daripada *multicase studies*. *Multiple site and subject studies* dikenal dua pendekatan untuk menganalisis data, yaitu induksi analitik dan metode komparatif konstan (*the constant-comparative method*) (Muhadjir, 2001:178-180).

Penelitian ini menggunakan desain *multicase studies* dengan menggunakan metode analisis data yang sejalan dengan alur penelitian maju bertahap Spradley, yaitu:

1. Membuat analisis domain, yaitu dengan membuat penyelidikan terhadap unit-unit pengetahuan budaya yang lebih besar yang disebut domain. Domain tersebut dapat terlihat dari transkrip wawancara atau catatan lapangan. Dalam melakukan jenis analisis ini, etnografer akan mencari simbol-simbol budaya yang termasuk dalam kategori (domain). Setelah melakukan analisis domain etnografer dapat memformulasikan pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain untuk diujikan lagi kepada informan penelitian;
2. Membuat analisis taksonomi, yaitu dengan pencarian struktur internal domain serta membentuk identifikasi susunan yang bertentangan. Setelah melakukan analisis ini etnografer dapat memformulasikan pertanyaan kontras yang akan diujikan lagi kepada informan. Tujuan dari pertanyaan

kontras adalah untuk menemukan makna bagaimana sebuah simbol berbeda dari simbol yang lain;

3. Membuat analisis komponen, yaitu melakukan pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan diantara simbol-simbol dalam sebuah domain;
4. Analisis tema, yaitu meliputi pencarian hubungan di antara domain dan bagaimana domain-domain itu dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan.

E. Kredibilitas Penelitian

Kredibilitas merupakan istilah yang lebih familiar dengan penelitian kualitatif, ketimbang validitas dalam penelitian kuantitatif (Poerwandari, 1998:116). Guba (dalam Muhadjir, 2001:172) mengetengahkan ada tiga teknik untuk mendukung kredibilitas penelitian, yakni:

1. Memperpanjang waktu tinggal di lokasi;
2. Melakukan observasi lebih tekun;
3. Menguji secara triangulasi.

Berkenaan dengan pengujian triangulasi, Denzin (dalam Muhajir, 2001:172) menyarankan empat modus:

1. Menggunakan sumber ganda (multiple sources);
2. Menggunakan metode ganda (multiple method);
3. Menggunakan peneliti ganda (multiple researcher);

4. Menggunakan teori yang berbeda-beda, pada poin ini Guba menambahkan bahwa teori yang berbeda-beda dapat digunakan sejauh semua teori tersebut tetap menggunakan aksioma naturalistis.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data; observasi berperan-serta, wawancara mendalam, dan studi dokumen (metode ganda), serta melibatkan beberapa informan lebih dari satu (sumber informasi ganda). Cara-cara tersebut merupakan 2 bentuk dari metode triangulasi, sehingga diharapkan dapat memenuhi persyaratan kadar kredibilitas penelitian.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN SETTING PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yakni tahap studi pendahuluan *(preliminary study)* dan tahap studi lapangan *(field study)*.

A.1. Tahap Studi Pendahuluan

Tahap Studi pendahuluan dilaksanakan pada bulan Maret 2005 – April 2005. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama,* melakukan studi dokumentasi mengenai kasus-kasus preman pasar dari data-data yang berasal dari media massa. Untuk tujuan itu, dilakukan *browsing* internet di beberapa surat kabar terkemuka mulai detik.com, kompas.com, search. jawapos.com, tempo.co.id. Peneliti juga melakukan *scanning* majalah prisma dan tempo di perpustakaan pusat unair. Dari studi dokumentasi tersebut diperoleh sejumlah dokumentasi yang berupa kliping berita (koran dan majalah) tentang praktik premanisme mulai dari tahun 1995-2005.

Kedua, dipelajari juga beberapa hasil penelitian empiris yang berkaitan dengan kasus-kasus preman dan kriminal pada umumnya. Sumber data untuk kasus-kasus tersebut diperoleh baik dari internet, penelitian sebelumnya, atau buku terkait dengan tema premanisme. Salah satu temuan terpenting dari studi pustaka ini adalah penjelasan logis dan empiris tentang hubungan antara faktor-faktor sosial, sejarah, politik, dan ekonomi atas modus operandi dan praktik.

Dari studi dokumen tersebut, ditemukan satu peneliti yang berhasil melakukan *depth interview* terhadap preman yaitu Muhammad Farhan Burhani (mahasiswa antropologi Unair), namun penelitian tersebut lebih menggeneralisasikan antara preman dengan pelaku kriminal biasa, seperti pencopet dan penodong, sehingga dapat disimpulkan belum pernah ditemukan sebuah studi ilmiah dimana dilakukan *depth interview* terhadap preman pasar yang beroperasi di Surabaya.

Ketiga, dilakukan wawancara awal dengan seorang PKL bernama LI. Selain itu, diminta pula bantuan seorang tokoh masyarakat bernama PO. Dari mereka didapatkan informasi tentang aktivitas preman di beberapa pasar di Surabaya. LI banyak menceritakan tentang aktivitas preman di kawasan timur Surabaya, seperti Pasar Setonongulon, Pasar Sepurkobong dan Pasar Tengahkutho. LI juga berdagang di areal luar Pasar Setonongulon. Dari PO didapatkan informasi tentang aktivitas preman pasar di bagian selatan surabaya, seperti Pasar Weton dan Pasar Lori.

Semua pasar tadi bukanlah nama pasar yang sebenarnya. Tempat dan lokasi penelitian sengaja disamarkan untuk melindungi identitas, privasi, dan hak-hak informan yang rawan dipublikasikan. Beberapa informan yang didapat dalam penelitian ini merupakan informan kunci bahkan pelaku dari praktik premanisme tersebut.

A.2. Tahap Studi Lapangan

Tahap penelitian berikutnya adalah studi lapangan. Tahap ini sebetulnya telah dimulai pada bulan April 2005, jadi hampir bersamaan dengan tahap studi pendahuluan, tetapi intensitas penelitian baru meningkat pada awal Mei 2005 sampai awal Juli 2005.

Tahap ini diawali dengan observasi lapangan, yakni mengamati beberapa pasar tempat berlangsungnya praktik premanisme. Terdapat tiga lokasi di tiga kecamatan dalam wilayah kota Surabaya yang diobservasi. Informasi mengenai lokasi-lokasi tersebut bersumber dari kesaksian LI dan PO serta pemberitaan media massa. Dari 3 lokasi tersebut kemudian ditentukan 1 lokasi, yakni pasar Setonongulon.

Pada tahapan ini, didatangi lokasi-lokasi kejadian untuk mengetahui setting fisik *(physical setting)*, sekaligus dilakukan wawancara pada pelaku utama yang memungkinkan seperti pedagang, polisi setempat dan preman.

A.2.1 Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah tingkat kemudahan di lapangan. Kasus premanisme adalah kasus yang sangat sensitif dan relatif tertutup bagi orang luar *(outsider)*. Sensitivitas ini disebabkan oleh fakta bahwa premanisme merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak termasuk oknum aparat. Pengalaman terjun di Pasar Tengahkutho selama sebulan, mulai dari bulan Maret hingga April, adalah tidak adanya satupun pedagang yang berani untuk menceritakan apa yang pernah dilihat

dan dirasakan atas aktivitas preman di lokasi tempat ia berdagang. Pedagang seakan menutupi bahwa tidak terjadi apa-apa di Pasar Tengahkutho. Peneliti selalu dianggap *stranger* dan *outsider* oleh pedagang tersebut.

Pada pertengahan bulan Mei, mulai dilakukan observasi awal di Pasar Lori. Oleh PO, peneliti diperkenalkan dengan salah seorang preman bernama WT. Sebelum bertemu dengan WT, PO secara implisit berkali-kali memberitahukan peneliti bahwa lebih baik untuk memberitahukan kepada WT untuk meneliti tentang keamanan sipil di wilayah pasar. Istilah keamanan sipil dirasa lebih aman dibandingkan dengan istilah preman. Setelah kenal dengan WT, peneliti kemudian dibawa WT dan PO ke rumah HMK. HMK merupakan kepala preman atau jagoan di pasar Lori. Perkenalan tersebut berlangsung pada tanggal 13 Mei 2005.

Setelah mendengarkan maksud penelitian tentang 'keamanan sipil di lingkungan pasar', HMK menyambut baik dan bersedia memberikan bantuannya. Keesokan harinya, peneliti diajak berkeliling pasar oleh HMK. Situasi ini dikemudian hari disadari telah menimbulkan *halo effect* terhadap tingginya resistensi pedagang terhadap peneliti. Resistensi pedagang umumnya ditunjukkan secara halus. Selain itu, dirasakan bahwa gerak-gerik peneliti selalu berada dalam pengawasan.

Observasi kemudian dialihkan ke Pasar Setonongulon. Di pasar tersebut disusun strategi untuk mengorek keterangan pada pedagang terlebih dahulu. Pedagang di pasar Setonongulon tidak lain adalah LI. Ayah LI memulai berdagang kaki lima di pasar Setonongulon sejak tahun 1980-an, sedangkan LI melanjutkan usaha dagang ayahnya sejak tahun 1996. Setelah mendapatkan

keterangan dari LI, peneliti menghubungi PU dan AN. PU dan AN adalah aparat kepolisian. Kebetulan sektor tugas PU mencakup wilayah Pasar Setonongulon, sedangkan AN pernah juga pernah bertugas di sektor tersebut.

Tinggi rendahnya resistensi informan yang berada di lokasi pasar menjadi dasar penentuan lokasi. Dari tiga lokasi yang diobservasi, dua lokasi menunjukkan resistensi yang tinggi, sedangkan satu lokasi menunjukkan resistensi yang agak rendah. Lokasi yang terakhir inilah akhirnya ditentukan sebagai lokasi penelitian.

Pertimbangan kedua berkaitan dengan keberadaan informan di lokasi-lokasi penelitian. Sensitivitas kasus premanisme membuat para pelaku merasa khawatir, takut dan curiga kepada *outsider* yang hendak mengeksplorasi kasus tersebut. Sensitivitas ini sebagaimana disebutkan diatas, disebabkan oleh fakta bahwa premanisme merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak termasuk oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan. Informan pedagang takut untuk mengungkap hal ini, dikarenakan hal tersebut beresiko terhadap *sandang-pangan* mereka. Dasar pemilihan lokasi akan digambarkan dalam tabel 2 :

Tabel 2

Dasar Pemilihan Lokasi

	Pasar Tengahkutho	Pasar Lori	Pasar Setonongulon
Observasi	13 Maret -5 April 2005	25 April -13 Mei 2005	20 Mei-1 Juli 2005
Informan	FZ	HMK	LI, KA, PN, PU, AN
Profil informan	Pedagang	jagoan/preman pasar setonongulon	Pedagang (LI) Polisi (PN,PU,AN) Preman (KA)
Model Investigasi	- informan dikenalkan oleh IP - diakui sedang dilakukan penelitian tentang preman - peneliti sering membantu pedagang berjualan di pasar.	- informan dikenalkan oleh PO - dalih penelitian adalah meneliti keamanan pasar	- dimulai dengan membelanjakan uang berlebih pada pedagang - Investigasi terhadap preman dilakukan dengan dalih penelitian 'adaptasi PKL'
Tingkat resistensi informan	Resistensi pedagang tinggi	Resistensi pedagang tinggi	- Resistensi pedagang rendah - Resistensi Polisi agak tinggi - Resistensi preman agak tinggi
Kesulitan peneliti	- kedekatan yang coba dibangun antara peneliti dengan informan tetap membuat pedagang bungkam - Peneliti tidak dapat mencari informan yang lain karena tidak adanya informasi signifikan tentang pelaku.	- Peneliti tidak dapat memperoleh keterangan dari pedagang dikarenakan anggapan kedekatan dengan HMK. - peneliti diawasi oleh anak buah HMK	- Investigasi pedagang tidak ada kesulitan - aparat polisi berusaha menjaga nama baik rekan-rekannya - preman sempat menganggap sebagai wartawan yang mau mempolitisir berita

A.2.2. Penentuan Informan

Seorang informan kunci adalah LI. Ia dikenal peneliti kurang lebih setahun terakhir. Namun hubungan yang cukup lama ternyata tidak menjadi jaminan untuk bisa mendapatkan informasi yang tergolong sensitif terkait aktivitas preman. Usaha-usaha pendekatan dilakukan dengan cara membantunya berdagang dan juga dengan lebih banyak membelanjakan uang di warung miliknya; mulai dari

rokok, kopi, atau camilan kecil yang lain. Selain itu, peneliti sempat membelikan buku tentang investasi pengembangan usaha kepada LI.

Setelah berhasil meyakinkan LI, eksplorasi aktivitas preman di Pasar Setonongulon mulai dilakukan. Namun eksplorasi awal atas kasus justru berlangsung tegang ketika LI melihat recorder yang digunakan untuk merekam wawancara. Untuk meyakinkan LI bahwa perekaman dilakukan hanya untuk mempermudah pembuatan transkrip *verbatim*, maka keesokan harinya ditunjukkan hasil *verbatim* dan analisis sementara atas keterangan LI sehari sebelumnya. Setelah meyakini bahwa kaset tersebut tidak akan masuk pada lampiran penelitian, dan hanya digunakan untuk mempermudah pembuatan transkrip, ia kemudian bersedia untuk dilakukan perekaman atas proses wawancara.

Informasi yang diberikan LI sangat sensitif, dikarenakan terkait dengan masalah jaringan preman yang melibatkan aparat hukum dan pemerintahan. Walaupun hanya pedagang biasa, LI ternyata juga mempunyai kedekatan hubungan dengan preman tempat ia berdagang. Ia pernah diminta anak buah preman untuk menghitung uang hasil setoran PKL.

Dari keterangan LI, diketahui bahwa KA adalah orang yang disebut-sebut sebagai preman di Pasar Setonongulon. KA tidak lain adalah kepala paguyuban PKL di pasar tersebut. Peneliti kemudian sendirian mendatangi stan daging tempat ia berjualan, namun KA selalu tidak pernah ada di tempat. Setelah berulangkali mendatangi stan tersebut, akhirnya KA dapat ditemui.

Semula KA dan juga keluarganya dapat dikatakan mempunyai resistensi yang tinggi, namun KA akhirnya bisa sedikit terbuka dengan proses penelitian ini. Untuk membuka tabir aktivitas KA di pasar tersebut, digunakan dalih penelitian tentang 'dinamika adaptasi PKL'. Selain itu sempat ditunjukkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) terhadap KA untuk mempertegas identitas peneliti dan membangun kepercayaan.

Ketika proses wawancara pertama kali dilakukan dengan KA, secara tidak sengaja datang seorang pejabat polres bernama PN dan anggota koramil bernama PJ. Perekaman secara diam-diam kemudian dilakukan dalam pembicaraan antara peneliti, PN dan KA. Dalam kesempatan yang lain, peneliti juga sempat berbicang-bincang dengan anak buah KA yaitu SKR.

Selain informan LI, KA, dan PJ; dihubungi juga dua orang informan aparat kepolisian yang bernama PU dan AN. Hubungan antara peneliti dan informan tersebut (PU dan AN) dimulai sejak dua tahun terakhir. Namun hubungan yang telah berlangsung lama tidak menjadi jaminan untuk dapat memperoleh data yang cukup signifikan, PU cukup resisten dengan penelitian bertajuk preman. Walaupun telah dijelaskan hak-hak, kepentingan, privasi, dan kerahasiaan informan, tetap saja PU sulit untuk dimintai keterangan. PU hanya mengakui bahwa teman-temannya memang mempunyai hubungan dan keterlibatan terhadap aktivitas preman, namun ia berkeberatan untuk mengungkap lebih jauh keburukan-keburukan yang dilakukan oleh teman-teman sejawatnya. Keterangan yang diberikan PU memang terbatas, namun beberapa cukup

signifikan untuk memperkuat data dari informan lain. Berbeda dengan PU, Sementara AN lebih bersikap terbuka terhadap penelitian ini.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini terkait dengan beberapa kendala sejak dimulainya penggalian data hingga penulisan akhir laporan ini. Berikut akan dipaparkan keterbatasan penelitian:

1. Informan dalam penelitian ini memiliki resistensi yang cukup tinggi. Resistensi tersebut terkait dengan sensitivitas kasus yang beresiko terhadap keselamatan akan pekerjaan dan kehidupan informan. Sensitivitas kasus menjadikan peneliti kesulitan dalam melakukan triangulasi data. Data yang sulit untuk dilakukan triangulasi adalah terkait dengan awal mula praktik premanisme yang dilakukan Sy di pasar tersebut, serta besarnya uang yang diberikan oleh preman kepada aparat-aparat yang menjadi bekingnya. Berkaitan dengan awal mula praktik dan besaran uang, peneliti hanya menggunakan keterangan satu sumber yaitu informan pedagang, namun informan tersebut dianggap memenuhi karakteristik atas pengungkapan kasus.
2. Sensitivitas kasus menyebabkan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap praktik premanisme hanya disampaikan kepada informan pedagang dan 2 orang informan polisi (AN dan PU). Dalih penelitian tentang adaptasi PKL disampaikan kepada Informan preman dan seorang pejabat polres. Hal tersebut terpaksa dilakukan dengan

mempertimbangkan keselamatan peneliti dan untuk mencegah penolakan informan dalam memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

C. Setting Penelitian

C.1. Pasar Tradisional di Surabaya

Modernisasi bangunan pasar dan bermunculannya supermarket serta pusat-pusat perbelanjaan modern, tidak menggoyahkan keberadaan pasar tradisional di Surabaya. Pasar tradisional di Surabaya masih menggeliat dan mempunyai konsumen tetap. Eksisnya kehidupan pasar tradisional ini adalah seperti di Pasar Keputran, Pasar Pabean-Cantian, Pasar Bong-Kapasan, Pasar Tambakrejo, Pasar Turi, Pasar Blauran, Pasar Loak, Pasar Pucang, Pasar Kedurus dan lain-lain. Selain area pasar tersebut terdapat tempat pedagang kaki lima seperti di "pasar kaget Sabtu-Minggu" di Jalan Pahlawan, seputar Taman Surya, halaman Masjid Agung, lapangan Karah, Jalan Gembong, Jalan Tunjungan, Jalan Demak, di ruang-ruang terbuka di sejumlah terminal, stasiun kereta api atau di areal pasar.

Pada tahun 1993, jumlah pasar tradisional di wilayah Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 174, dan 96 di antaranya adalah pasar tidak resmi PKL (pedagang kaki lima). Kini setelah dua belas tahun berjalan tentu jumlahnya kian membengkak.

Di satu sisi, kota Surabaya telah menjadi tempat pelabuhan urbanisasi berlebih, di samping ledakan penduduknya sendiri yang pada tahun 1993 saja sudah mencapai 3,5 juta. Membludaknya PKL kemudian menjadi tidak dapat dipungkiri adalah akibat daya hisap kota yang demikian megah dengan iming-

iming kapitalnya. Gedung-gedung pencakar langit beserta gemerlap pembangunan industri kota semakin menyedot para penduduk dari desa-desa tertinggal atau dari daerah sekeliling Surabaya, seperti Lamongan, Gresik, Sampang, Bangkalan, Sumenep atau daerah sekitar Padalungan.

Namun kedatangan sebagian besar dari masyarakat pendatang ini seringkali tak proporsional dengan iming-iming kapitalisme yang terlihat di permukaan. Bagi sebagian warga pendatang bahkan tak ada kemampuan yang bisa dilakukan selain kemampuan yang mengandalkan otot dan kerja fisik. Padahal kebutuhan perut tetap harus dipenuhi. Berdagang kaki lima kemudian menjadi salah satu pilihan hidup untuk dapat mengais rejeki. Lahan-lahan yang padat penduduk dan menjadi pusat perekonomian, seperti bahu jalan utama, dan areal luar pasar menjadi pilihan untuk menyambung hidup dengan berdagang.

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk serta semakin kompleksnya kebutuhan hidup, permasalahan pasar tradisional kemudian menjadi kian pelik. Sejumlah pasar yang terkenal di Surabaya, ternyata bukan hanya memicu terjadinya kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas, tetapi juga makin lama makin kumuh, kotor, bahkan berubah fungsi menjadi sekadar tempat tidur bagi para pedagang. Pasar Keputran kemudian menjadi satu contoh, dimana lantai dua dalam pasar induk ini kebanyakan justru dijadikan tempat tidur bagi pedagang. Bahkan pada pertengahan tahun 2004 membludaknya pedagang kaki lima di sekitar pasar ini memaksa petugas kepolisian untuk mengambil tindakan tegas dengan melindas dagangan yang terlanjur meluber di jalan utama Surabaya.

Pada tahun 2004, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Perusahaan Daerah (PD) pasar berusaha untuk mengubah citra pasar tradisional yang kumuh dengan menggandeng investor untuk membangun pasar. Sebagaimana Pasar Wonokromo yang kini menjadi pasar modern, kini hendak dibangun dua pasar modern yang lain. Upaya ini dimaksudkan Pemkot sebagai proyek monumental untuk mengubah citra Surabaya menjadi kota yang bersih.

Upaya untuk membangun pasar tetap saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan kota Surabaya. Pemkot berusaha untuk memodernkan pasar-pasar tradisional namun melupakan bahwa aktivitas ekonomi PKL sudah terlanjur meledak seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan data dari bagian perekonomian pemkot, jumlah PKL di Surabaya diperkirakan mencapai 25 ribu orang. Sementara stan kosong di dalam pasar hanya sekitar 1.170 unit, dan tersebar di 60 pasar milik Pemkot (Jawa Pos, 27 januari 2004).

Pemkot sendiri pernah menghalalkan keberadaan PKL melalui SK Walikota nomor 18/1999 PKL. Dalam SK walikota tersebut, PKL diijinkan untuk hidup di radius 100 m wilayah pasar. Ketika SK tersebut telah dicabut, keberadaan PKL dalam radius 100 m sudah terlanjur membludak.

Kini telah dikeluarkan Perda no 17 tahun 2003 terkait pengelolaan PKL dari Dinas Koperasi. Namun Dinas Koperasi sendiri masih menganggap bahwa teknis pengelolaan PKL melalui perda tersebut masih mentah dan hanya sebatas wacana (Jawa Pos, 12 April 2004).

Pasar tradisional sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, adalah pasar tradisional dengan dagangan utama berupa barang-barang awet dan

produk pabrik seperti garmen, peralatan elektronik, perkakas rumah tangga, beras, gula, garam, ikan asin, dan sebagainya. Contoh pasar yang masuk pada kelompok ini adalah Pasar Turi, Pasar Genteng, dan Pasar Pabean.

Kelompok kedua adalah pasar tradisional yang menjual barang dagangan tidak awet seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan ikan segar. Yang termasuk pada jenis pasar ini adalah Pasar Tambakrejo dan Pasar Keputran. Pasar kelompok kedua memiliki kadar permasalahan yang jauh lebih tinggi daripada kelompok pertama.

C.2. Pasar Setonongulon

Pasar Setonongulon berada di lokasi yang sangat strategis, terutama karena letaknya yang berada di lingkungan padat penduduk. Sejak ludesnya bangunan pasar akibat kebakaran pada tahun 2002, ia seringkali disebut-sebut sebagai tiga pasar yang berpolemik di surabaya. Polemik semakin memuncak pada akhir tahun 2004. Saat ini, areal pasar sedang dalam tahap pembangunan menjadi pasar modern.

Sebelum kebakaran, pasar ini adalah pasar yang ramai. Bangunannya ada dua lantai dan terdiri dari beberapa blok. Pedagang yang berada di dalam pun terhitung beragam mulai dari yang berjualan properti seperti kosmetik, kain, palen atau juga yang berdagang kebutuhan rumah tangga lainnya. Pasar yang luasnya mencapai 1.000 meter persegi itu mempunyai sekitar 2.103 kios. Pada tahun 2002, 1.900 kios telah yang diisi oleh sekitar 2.150 pedagang.

Untuk jumlah PKL yang berada di luar pasar sebelum dikeluarkan SK walikota no 18/99 awalnya hanya sebatas kurang lebih 15 orang dan terbatas pada pedagang kopi dan warung makanan. Namun pasca dikeluarkannya SK tersebut pelan-pelan jumlah pedagang semakin bertambah hingga pada tahun 2002 sebelum kasus kebakaran jumlah mereka mencapai 20-30 PKL. Pertambahan ini nampaknya tidak cukup signifikan dan merambat begitu pelan dalam kurun waktu hampir 3 tahun. Pasca kebakaran pasar tahun 2002, hampir semua pedagang sayur, ikan, daging dan buah-buahan yang semula berjualan di dalam pasar (pedagang-dalam) kemudian berjualan disekitar luar pasar.

Kurang lebih sebulan paska kebakaran, PD pasar membenahi pasar alakadarnya. Beberapa pedagang-dalam kemudian menempati tempat yang disediakan PD pasar, namun tetap menyisakan beberapa pedagang-dalam yang justru memilih untuk berjualan di luar pasar dan bergabung dengan PKL.

Pada akhir tahun 2004, beberapa pedagang-dalam yang menempati lahan darurat ini dipindahkan ke tempat penampungan sementara yang terletak kurang lebih 1 km dari pasar tersebut. Beberapa dari mereka menolak untuk pindah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan memilih bergabung dengan PKL yang meluber di jalan.

Aktivitas pasar luberan tersebut berlangsung setiap hari, mulai jam 3 sore sampai dengan jam 7 pagi. Pada jam 3 sore, aktivitas perdagangan lebih didominasi oleh jenis dagangan kaki lima yang menjajakan kopi giras atau warung-warung makanan. Sedangkan jenis dagangan yang dijual pada malam hari adalah sayur mayur, buah-buahan, ikan, ayam, daging, toko-toko sembako,

warung-warung kopi dan makanan, jasa pemarutan kelapa, serta penjual jasa yang lain seperti becak. Pada malam hari, penjual terbesar adalah pada jenis dagangan sayur mayur. Antara jam 12 pagi hingga jam 7 pagi pasar tersebut menempati 300 m panjang jalan. Aktivitas transaksi paling ramai dimulai pada jam 2 hingga jam 5 pagi. Pada jam 06.30, disaat aktivitas kendaraan mulai padat, pedagang yang berjualan masih belum surut, sehingga seringkali menimbulkan kemacetan di ruas jalan. Ketika aktivitas perdagangan mulai ramai dan arus truk pembawa material dan penggiling semen lalu lalang, pengguna kendaraan tak jarang dibuat merambat.

Ketika toko-toko mulai buka, maka aktivitas pasar otomatis juga harus ikut tutup. Beberapa toko yang ada di jalan tersebut adalah toko emas, toko elektronik, toko film (tempat cuci cetak), dan lain-lain. Biasanya toko buka jam 8 pagi.

Saat ini, areal yang ditempati pedagang tidak hanya pada jalan utama saja, namun juga beberapa gang di sekitar jalan utama seperti Gang Setonokembang, Setonokayu, dan Setonokali. Mulut gang tersebut seringkali dijadikan tempat parkir oleh pelanggan ataupun pedagang sekitar, sedangkan Gang Setonokembang seringkali tertutup oleh stan kagetan pedagang. Akibatnya, warga seringkali tidak dapat keluar masuk dengan bebas karena mulut gang telah tertutup oleh pedagang dan tempat parkir.

Pedagang rata-rata datang dengan berjalan kaki, menggunakan becak, sepeda atau dengan menggunakan sepeda motor. Mereka tidak menyimpan barang dagangannya dalam kotak-kotak penyimpanan yang diinapkan di trotoar jalan.

Barang dagangan tersebut dijual murah ketika pagi hari, atau bila masih ada sisa akan dibawa pulang. Secara umum, barang-barang dagangan mereka itu adalah barang-barang yang mudah busuk terutama bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Para pedagang sebagian besar membeli barang dagangannya dari Pasar Tengahkutho, dan hanya sebagian kecil yang membeli langsung dari para petani. Mereka menjualnya secara eceran kepada para pelanggan. Hal ini berarti bahwa mereka harus membeli komoditi mulai pagi-pagi sekali sebelum aktivitas Pasar Setonongulon dimulai. Tipe pedagang ini adalah termasuk pedagang los dan pedagang lesehan.

Para pelanggan tidak hanya penduduk di sekitar kelurahan itu saja, namun juga datang dari kecamatan-kecamatan yang ada di sekitarnya. Ada dua kategori pelanggan yang biasanya berbelanja di Pasar Setonongulon, yaitu ibu rumah tangga dan pedagang eceran. Tipe pelanggan yang pertama membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, garam, sayuran, kelapa, buah-buahan, bumbu, minyak dan lain-lain. Seorang ibu rumah tangga biasanya pergi berbelanja sekitar pukul jam 5 sampai dengan jam 7.

Tipe pelanggan yang kedua adalah para pedagang yang membeli komoditi di pasar yang kemudian dijual di pasar lain sebagai pedagang eceran. Kadang-kadang aktivitas pengecer adalah sebagai tukang sayur keliling. Mereka biasanya adalah pergi ke Pasar Setonongulon sekitar jam 2 pagi hingga aktivitas pasar berhenti.

Terdapat 158 pedagang di Pasar Setonongulon. Penghasilan bersih mereka setiap hari minimal adalah Rp. 50.000. Hal tersebut terjadi ketika pasar sedang

sepi pembeli. Namun biasanya mereka bisa mendapatkan Rp100.000 permalam. Untuk pedagang yang sudah mempunyai 'nama' dan ramai pembeli maka penghasilan bersih yang mereka dapatkan bahkan bisa lebih dari Rp 200.000 permalam. Untuk tukang becak yang mengambil barang dagangan dari Pasar Tengahkutho biasanya mendapat penghasilan Rp. 25.000 untuk sekali angkut.

Aktivitas pengambilan sampah oleh petugas kebersihan biasanya dilakukan pada jam 7 hingga jam 8 pagi. Pada jam tersebut rata-rata pedagang sayur sudah membubarkan diri dikarenakan toko yang halamannya mereka tempati sudah mulai buka. Namun masih terdapat beberapa pedagang yang berjualan diantaranya adalah warung-warung giras dan beberapa warung-warung makan. Warung-warung yang masih berjualan umumnya berada di seberang toko, sehingga aktivitasnya tidak mengganggu toko tersebut.

Para preman yang menarik uang keamanan seringkali berkumpul di warung giras untuk berdiskusi ataupun bercanda dengan teman atau dengan pedagang. Kepala preman juga seringkali berbaur dengan mereka di warung ini. Anggota polisi atau anggota koramil tidak jarang ikut mampir dan berbincang-bincang dengan preman ataupun pedagang di warung tersebut.

Kepala preman juga mempunyai stan berjualan. Ia berjualan daging di pasar tersebut. Ukuran stannya tidak terlalu luas hanya meja seukuran 1,5 m x 1,5 m. Urusan perdagangan daging lebih sering diberikan kepada istrinya, sedangkan ia sendiri lebih sering duduk-duduk di warung giras sebelahnya stannya, sembari sesekali melakukan kontrol terhadap para pedagang.

BAB V

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian naturalistik, fakta dibiarkan untuk berbicara apa adanya melalui deskripsi yang bersifat idiografik dengan menggambarkan keseluruhan esensi. Sebagaimana dikatakan Muhadjir (2001:160), dengan menentukan keseluruhan esensi, maka kita dapat memahami keseluruhan tersebut. Suatu esensi yang bersifat holografik memungkinkan kita menangkap esensi dari satuan yang lebih besar.

Deskripsi idiografik digambarkan untuk meminimalisir subjektivitas dalam penelitian naturalistik. Deskripsi ini diharapkan dapat menggambarkan realitas yang kompleks sekaligus dapat menghindarkan peneliti dari generalisasi yang bersifat universal.

Pada bab ini akan dideskripsikan beberapa keterangan hasil wawancara dari informan yang dipadukan dengan hasil observasi dan catatan harian peneliti. Deskripsi ini berusaha menggambarkan secara lugas setiap peristiwa yang berhubungan dengan praktik premanisme di lingkungan Pasar Setonongulon.

A. Awal Pungutan Liar Bermodus Paguyuban

Diberlakukannya SK Walikota no 18/99 adalah awal praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai pasar bernama Sy. Sehari-harinya, Sy bertugas sebagai petugas kebersihan Pasar Setonongulon. Sebelumnya, bukan berarti PKL (Pedagang Kaki Lima) Setonongulon tidak mengalami pungutan liar. Disela-sela

aktivitas perdagangannya terkadang sekelompok pemuda berandalan, pengangguran, ataupun tukang mabuk mendatangi dan memaksa pedagang untuk memberikan sejumlah uang. Namun, pemalakan dari pemuda-pemuda tersebut tidak bersifat periodik dan juga tidak dilakukan secara massal. Pedagang menganggap bahwa mereka yang terkena pemalakan adalah yang sedang terkena *apes* (sial) saja.

Sy mengatasnamakan paguyuban PKL dalam melakukan praktiknya. Organisasi tersebut dibentuk atas restu dari beberapa petugas keamanan pasar yaitu K dan M. K adalah seorang anggota koramil dan M adalah aparat Bimas. Sy kemudian dibantu oleh beberapa orang yang cukup disegani oleh pedagang, yaitu SKR dan D. Pertimbangan Sy merekrut SKR dan D, dikatakan LI, salah satunya berdasarkan atas faktor kesukuan. Sy, SKR dan D sama-sama berasal dari Madura. Sy sendiri tak pernah secara langsung menarik pungutan pada PKL. Tugas ini selalu dibebankan kepada SKR dan D.

PKL semula menganggap bahwa apa yang dilakukan Sy adalah perpanjangan kebijakan dari pihak PD pasar. Persepsi ini didasarkan oleh dua hal, pertama, Sy adalah pegawai pasar. Kedua, hal ini adalah dampak dari kebijakan turunnya SK Walikota no 18/99 yang menyebutkan bahwa radius 100 m dari wilayah pasar juga termasuk dalam pengelolaan pasar. Selain itu, Sy selalu berdalih pada pedagang bahwa iuran yang ditarik oleh paguyuban ditujukan untuk kebersihan dan keamanan PKL itu sendiri.

Awalnya, beberapa PKL menyambut baik terbentuknya paguyuban tersebut. Mereka menganggap aktivitas perdagangan PKL akan terjamin dan

terlindungi. Namun tak sedikit PKL yang menggerutu, dikarenakan sejak dari awal tahun 80-an tak pernah ada pungutan atas aktivitas perdagangan mereka. Dalih paguyuban untuk melindungi keamanan pedagang dari pemalakan liar dianggap pedagang hanya mencari-cari, dikarenakan pemalakan atas pedagang sebetulnya jarang terjadi.

Alasan pedagang yang menggerutu tersebut kemudian terbukti. Pemungutan yang dilakukan Sy pada PKL masuk dalam kantong pribadi dan tidak masuk dalam kas pasar. Pada saat yang bersamaan, PD pasar juga menarik iuran resmi berupa karcis untuk kebersihan pedagang yang berada di luar pasar. Selain masuk kantong sendiri, uang yang masuk juga digunakan untuk menggaji anak buahnya, SKR dan D. K dan M juga mendapat bagi hasil atas penarikan iuran pada pedagang.

Dikatakan LI bahwa paguyuban di bawah Sy tidak pernah memperhatikan kebutuhan PKL. Ia hanya sekedar menarik iuran tapi tidak pernah mengatur PKL. Beberapa permasalahan yang terjadi diantara PKL, seperti perebutan tempat berjualan antar PKL tidak pernah digubris oleh paguyuban. Padahal masalah tempat berjualan adalah masalah yang sensitif bagi PKL. Penyabotan lahan dari PKL tertentu tidak jarang memicu kemarahan PKL yang jauh hari sebelumnya telah menempati lahan tersebut. Selain itu, beberapa PKL yang datang lebih lambat seringkali berjualan seenaknya. Mereka menggelar dagangannya persis di depan PKL yang lebih dulu membuka dagangannya, sehingga dagangan PKL tersebut menjadi tertutup oleh pedagang yang baru datang. Kasus-kasus tersebut akhirnya lebih banyak diselesaikan antar PKL sendiri.

Pada awal tahun 2002, K menyarankan kepada Sy untuk menghentikan sementara penarikan iuran pada para PKL. K khawatir dikarenakan Bambang DH, Walikota Surabaya, sedang gencar-gencarnya memberikan instruksi untuk mengobrak PKL liar. Pertimbangan K juga didasari oleh wewenang satpol PP untuk menertibkan dan mengatur PKL yang telah diamanahkan pada pihak kecamatan masing-masing.

Di depan K, Sy seakan-akan turut dengan saran tersebut. Namun, Sy tetap menarik iuran pada PKL. Mengetahui hal tersebut, K mengatakan kepada Sy, " *nek ono opo-opo jangan libatkan aku!*" K memutuskan tidak mau menerima uang bagi hasil pungutan pedagang dari Sy. Sedangkan M kemudian lebih sering beroperasi di Pasar Layang. Sampai disini peneliti tidak mengetahui apakah sampai sekarang M juga masih mendapatkan setoran bagi hasil atau tidak.

Iuran yang ditetapkan oleh paguyuban pada PKL semula adalah Rp. 300 kemudian naik Rp. 500 dan pada tahun 2001 menjadi Rp. 1000. Iuran tersebut dikenakan pada PKL setiap hari. Selain menarik iuran pada PKL, paguyuban juga mengelola parkir di luar areal pasar.

Bagi pedagang, apapun namanya, paguyuban identik dengan preman. Hal ini mengingat paguyuban mempunyai kekuasaan secara informal atas lahan yang ditempati PKL. Kekuasaan paguyuban atas lahan tersebut menjadikan mereka berhak menarik pungutan pada pedagang. Namun istilah preman tak pernah muncul ketika pedagang melakukan aktivitasnya di pasar. Istilah ini hanya muncul dalam pergunjingan antar sesama pedagang atau orang luar yang tidak berkaitan dengan aktivitas pasar. Ketika interaksi masih dilakukan di dalam pasar, sesama

pedagang akan menyebut preman sebagai paguyuban, panitia, pengurus, atau pengelola swasta.

B. Kejatuhan Kepala Paguyuban

B.1. Teror terhadap PKL

Pada tahun 1999 terdapat seorang PKL pindahan dari Pasar Tengahkutho bernama KA. Sejak awal berjualan hingga sekarang, ia adalah satu-satunya PKL yang berjualan daging di areal luar pasar. Setelah terjadi kasus perusakan pedagang-dalam atas PKL pada tahun 2002, namanya tiba-tiba terangkat dengan menjadi kepala paguyuban PKL.

Paska pembenahan seadanya akibat kebakaran pasar, pedagang-dalam yang meluber ke jalan dimasukkan lagi di halaman pasar. Namun hal ini tidak mengurangi jumlah PKL di sekitar luar pasar yang terlanjur membludak. Bibit kecemburuan antar pedagang yang terpisah teritori luar dan dalam pasar mulai timbul.

Kecemburuan ini bukan tanpa alasan, dikarenakan pedagang-dalam lebih banyak mengeluarkan modal untuk mendapatkan stan berjualan. Pungutan pedagang-dalam pun jauh lebih besar dibandingkan pungutan PKL. Untuk berjualan di dalam pasar, mereka harus membayar iuran resmi dari PD pasar sebanyak Rp 7.500 per hari. Iuran tersebut dialokasikan untuk keamanan, kebersihan, sampah, listrik dan sewa tempat. Sementara pedagang luar atau PKL hanya membayar Rp. 1000 untuk PD pasar dan Rp. 1000 untuk paguyuban. Padahal, pedagang-dalam menganggap bahwa fasilitas yang disediakan PD pasar

tidak cukup layak untuk aktivitas perdagangan. Tempat yang disediakan PD pasar dianggap terlampau sempit dan mudah becek bila terkena guyuran hujan. Sementara PKL, selain menempati jalan aspal, juga mempunyai *space* yang lebih longgar dikarenakan menempati lahan terbuka.

Menjelang jam 6 pagi, PKL juga seringkali membanting harga atas barang dagangan yang tidak habis. Banting harga tersebut lantaran dua hal. Pertama, dagangan yang mereka jajakan seperti daging, ayam, dan sayur rawan busuk. Kedua, batas mereka berjualan hanya sampai jam 7 pagi, dan bila lebih dari itu maka PKL harus bersiap untuk menghadapi *obrakan* Satpol PP.

Pedagang-dalam kemudian menuding PKL mencegat konsumen yang seharusnya menjadi pembelinya. Pedagang-dalam menganggap PKL tidak ikut *babat alas* untuk mencari pelanggan. Merekalah yang semula mempunyai pelanggan dan bukan PKL. Tidak hanya itu, PKL juga dianggap merusak harga. Tudingan tersebut bagi PKL sangat tidak beralasan. LI sebagai seorang pedagang yang berjualan di luar areal pasar mengatakan bahwa PKL sama sekali tidak berhak memaksa konsumen untuk membeli di tempatnya atau tidak, hak membeli sepenuhnya ada pada pedagang. KA juga mengatakan bahwa garis pemisah antara pedagang dalam dan luar bukan pedagang yang menentukan namun pembeli sendiri. Permasalahan pembeli yang memutuskan untuk membeli pada PKL sama sekali bukan urusan pedagang manapun. Namun, tanggapan PKL ini tidak dikeluarkan secara frontal kepada pedagang-dalam. Mereka memilih untuk diam dan menggunjingkan antar sesama PKL sendiri.

Kecemburuan pedagang-dalam mulai memuncak dan menimpa pada PKL yang berdagang ayam. Pedagang ayam dalam yang dimotori oleh A meminta PKL ayam untuk tidak merusak harga. Sebelumnya pedagang ayam dalam sempat menawarkan solusi bagi PKL untuk membeli ayam pada distributor yang sama dengan pedagang ayam dalam. Distributor tersebut tidak lain adalah A sendiri yang juga berjualan di dalam pasar. Pembelian ayam terhadap A diharapkan dapat mengontrol dan meminimalisir perbedaan harga antar pedagang dalam dan PKL. PKL yang berjualan ayam tersebut berjumlah kurang lebih 30 orang. Selama ini, PKL tersebut mendapatkan distribusi ayam dari daerahnya sendiri dikarenakan harganya jauh lebih murah.

PKL yang berdagang ayam tersebut menolak dikarenakan harga ayam yang ditawarkan distributor terlalu mahal. Walaupun begitu, penolakan tersebut tidak diungkapkan secara verbal dan frontal namun diwujudkan dengan perilaku PKL yang terus membeli ayam pada distributornya sendiri. Sikap PKL ayam yang berada dalam ancaman tersebut cenderung diam ketika menghadapi pedagang ayam dalam yang lebih bersifat frontal. Mereka hanya mempergunjingkan antar sesama PKL.

Pedagang ayam dalam merasa bahwa tindakan yang ditunjukkan oleh PKL tersebut sebagai sikap *mokong* atau membangkang, dan merugikan semua pedagang ayam yang berjualan di dalam pasar. Pedagang ayam dalam yang dimotori oleh A mengambil langkah dengan menggalang massa. Orang-orang yang digalang tidak sebatas pada pedagang ayam saja namun beberapa pedagang dalam pasar yang mau bergabung untuk menciduk PKL ayam. Pedagang ayam

dalam melalui A memberikan ultimatum pada PKL untuk mengakhiri aktivitas perdagangan di pasar tersebut. PKL ayam diberikan kesempatan berjualan sampai besok pagi, kalau besok malam masih berjualan maka dagangan mereka akan dihancurkan.

Ultimatum itu membuat, PKL ayam segera meminta perlindungan pada pihak PD pasar. Tidak diketahui siapa yang dimaksud oleh pihak PD pasar ini. Namun menurut keterangan LI, beberapa PKL ayam telah memasuki kantor PD pasar untuk melaporkan ancaman pedagang-dalam tersebut. Jawaban atas laporan pada PD pasar itu adalah saran agar PKL tidak berjualan sementara. Mereka kemudian menghubungi Sy. Sebagai ketua paguyuban yang menaungi PKL, ia justru menyatakan hal yang senada dengan PD pasar, *"sementara ojo dodol sek"*, atau untuk sementara jangan jualan dulu.

Hal ini membuat PKL ayam tersebut kecewa, dikarenakan tuntutan pedagang-dalam adalah mereka tidak diperbolehkan berdagang untuk seterusnya dan bukan untuk sementara. Pedagang ayam luar merasa bahwa pihak PD pasar dan juga paguyuban "tidak bertanggung jawab!" dikarenakan pedagang tersebut merasa sudah membayar iuran kepada mereka. Bagi PKL semestinya ada kompensasi atas iuran yang telah mereka bayar dalam bentuk perlindungan atas aktivitas perdagangan mereka.

Pagi hari setelah mereka berjualan, beberapa PKL ayam melaporkan ancaman tersebut kepada kepolisian sektor (polsek) setempat. Mereka meminta agar nanti malam polisi bersedia untuk melindungi dan menjaga aktivitas perdagangan mereka. Jawaban polisi ketika itu adalah, *"ya nanti kalau ada apa-*

apa lapor saja!" Kalimat ini membuat PKL gusar, yang mereka butuhkan adalah tindakan polisi untuk menjaga dan bukannya melapor setelah ada kejadian. Beberapa PKL merasa pesimis terhadap polsek, karena diantara mereka pernah melihat aparat polsek sering *disangoni* (diberi uang) oleh pedagang-dalam. Pemberian *sangu* tersebut sering diberikan ketika aparat polisi tersebut patroli melewati pasar tersebut. Lagi-lagi hal ini hanya sekedar menjadi bahan pergunjingan antara sesama PKL sendiri.

Malamnya, beberapa PKL ayam memilih untuk tidak berjualan namun separuh lebih tetap nekat berjualan. Tidak lama berselang, hampir 100 orang pedagang-dalam menyerbu dan merusak dagangan PKL ayam, meja-meja dagangan dibalik, ayam pun berceceran. Sebagaimana dijelaskan tadi, massa yang menyerang ini tidak hanya pedagang ayam dalam saja tapi pedagang-dalam yang bercampur. PKL yang dirusak dagangannya hanya diam saja, mereka pasrah dan tidak melawan.

B.2. Kekuasaan Anggota Marinir

Seorang PKL ayam yang dagangannya dirusak kemudian menuju ke tempat familinya yang juga seorang anggota marinir. Anggota marinir tersebut bernama HU. Mengetahui bahwa ada dagangan familinya dirusak maka HU dengan menggunakan jaket marinirnya segera pergi ke pasar tersebut.

Sesampainya HU dipasar, massa penyerbu dan perusak sudah tidak ada, namun ceceran ayam dan sisa-sisa perusakan tersebut masih dapat terlihat jelas. HU kemudian berteriak *"sopo sing nggarai iki!"* (siapa yang menyebabkan ini!).

Ia segera masuk ke dalam pasar dan mendatangi A yang juga seorang pedagang sekaligus distributor ayam. Ia mengatakan pada A dengan nada mengancam, *"sampek ono opo-opo meneh anak buahmu dadi korban pisan!"* A tidak bisa berbuat apa-apa melihat HU yang berjaket marinir tersebut.

HU kemudian menghubungi kepolisian setempat untuk datang di tempat kejadian perkara. Setelah mendengar laporan HU, beberapa anggota polsek kemudian menangkap beberapa orang yang terlibat dalam kasus perusakan. Berdasarkan keterangan LI, yang ditangkap oleh polisi kebanyakan adalah anak pedagang-dalam dan preman pengangguran, namun A yang dianggap memotori penyerangan justru tidak ditangkap. Menurut LI, ini dimungkinkan karena A sudah mengenal polisi yang datang.

Setelah penangkapan tersebut, marinir tadi memberikan *sangu* (uang) kepada polisi tersebut. *Sangu* tadi ditujukan sebagai ucapan terimakasih atas tindakan cepat kepolisian setempat.

Kejadian yang disaksikan oleh puluhan pedagang dan PKL ini membuat mereka menaruh hormat dan segan dengan HU. Setelah kejadian tersebut, atas permintaan para 4 orang PKL ayam, HU diminta untuk menjaga keamanan aktivitas perdagangannya. PKL ayam tersebut kemudian *urunan* untuk menggaji HU Rp 500.000 setiap bulan. Menurut keterangan LI, HU tidak pernah mematok atau meminta sesuatu kepada PKL ayam. Apa yang dilakukan PKL semata-mata sebagai kompensasi atas kerelaan HU untuk melindungi aktivitas perdagangan ayam di luar pasar. Sejak kejadian tersebut, hampir setiap malam HU berada berada di wilayah pasar tersebut.

Sejak kecil, HU dibesarkan di daerah sekitar pasar Setonongulon, sehingga HU tidak hanya dikenal oleh komunitas pasar setempat, namun juga oleh warga daerah Setonongulon. Menarik dicermati bahwa HU bukanlah seorang perwira. Ia hanyalah seorang Bintara dengan pangkat sersan. Namun sejak kejadian itu, sebagian PKL menjadi segan dan hormat kepada HU.

B.3. Munculnya Paguyuban Baru

Walaupun kasus perusakan tersebut sudah selesai, namun hampir seluruh PKL yang berada di luar pasar risau apabila kasus perusakan akan terulang lagi. Perusakan dikhawatirkan akan merembet tidak hanya terbatas pada PKL ayam tapi juga pada PKL-PKL lainnya. Kehadiran HU dianggap membawa angin perubahan. Hal yang tidak bisa dilakukan pedagang atau paguyuban PKL adalah melakukan seperti apa yang dilakukan HU. Polisi ataupun Koramil juga dianggap pedagang tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan HU.

Paska kejadian tersebut, penarikan iuran tetap dilakukan oleh anak buah Sy. Beberapa PKL masih membayar pungutan tersebut, namun beberapa PKL yang melihat begitu hebatnya aksi dan gertakan HU pada malam sebelumnya mengambil sikap tidak mau membayar pada paguyuban lagi. Para anak buah Sy seakan menyadari posisinya berkaitan dengan keberadaan HU sejak malam aksi teror. Sejak kejadian itu, mereka tidak mengambil sikap represif terhadap PKL yang tidak membayar iuran paguyuban.

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, HU berbincang-bincang dengan KA di warung LI. Disini KA mengungkapkan kekhawatirannya kepada HU kalau-

kalau kasus perusakan dan teror terjadi lagi. Kekhawatiran KA beralasan, apalagi ia adalah satu-satunya PKL yang berjualan daging. KA menyadari, setiap saat ia bisa dijadikan sasaran tuduhan dan ancaman oleh pedagang-dalam terkait perdagangan daging. HU kemudian memberikan bimbingan kepada KA tentang cara berdagang aman. Menurut HU, jalan keluarnya adalah KA harus melobi beberapa aparat muspika dan juga pihak lantas. Dalih yang dilakukan adalah meminta petunjuk kepada aparat tersebut tentang pengelolaan PKL.

KA kemudian melobi camat setempat. Camat memberikan restu, namun dengan syarat KA bisa mengatur dan menertibkan PKL. Malam harinya KA memberitahukan kepada HU tentang apa yang dikatakan camat kepadanya. Kebetulan dalam kesempatan itu hadir pula K, seorang anggota koramil yang semula menjadi pelindung Sy. K kemudian menceritakan bagaimana sepak terjang Sy selama ini, termasuk peringatan K agar Sy tidak meminta iuran pedagang untuk sementara. Pertemuan antara K, HU, dan KA inilah yang menjadi titik awal KA menjadi ketua paguyuban PKL. Setelah KA mendapatkan legitimasi dari K dan KA, ia kemudian mendekati kapolsek setempat.

Pertemuan antara KA, HU, dan K, disebut-sebut pedagang sebagai rapat. Dalam rapat tersebut, mereka bertiga membicarakan tentang pengaturan dan pengelolaan PKL. Atas usul K, KA diminta untuk merekrut D dan SKR, pertimbangannya mereka adalah orang yang disegani dan sudah tahu tentang seluk beluk pasar. D dan SKR sendiri sebenarnya merupakan tukang tarik Sy.

D dan SKR dipanggil oleh ketiga orang tersebut. SKR dan D kemudian resmi masuk dalam paguyuban PKL dibawah koordinasi KA. Di luar rapat

tersebut, KA kemudian merekrut orang baru sebagai anggotanya yaitu MT. Rapat tersebut juga memutuskan untuk membagi edaran kepada PKL tentang program paguyuban baru.

Beberapa hari kemudian, disebar edaran pada seluruh PKL tentang program yang telah dibuat oleh KA. Isinya menyangkut alokasi iuran yang harus dibayar oleh PKL terutama untuk kebersihan dan keamanan. Paguyuban KA juga membagikan karcis setiap harinya sebagai tanda bukti bahwa PKL sudah melakukan pembayaran uang kebersihan dan keamanan. Namun bagi pedagang, karcis tersebut hanyalah formalitas. Pedagang dapat meminta, namun kalau tidak meminta juga tidak apa-apa. Yang penting bagi pedagang adalah membayar.

Kekuasaan Sy dengan sendirinya berakhir, tanpa ada konfirmasi dan pemberitahuan kepadanya. Sy sama sekali tidak punya kekuatan. K yang semula menjadi pelindungnya berpihak kepada HU. HU sendiri bersimpati dengan kekhawatiran KA. HU bahkan lebih merasa cocok bila KA menjadi ketua paguyuban baru. Sementara anak buah Sy, yakni D dan SKR, juga sudah tunduk dalam kekuasaan KA. Sehari-harinya Sy kemudian hanya menjalankan aktivitasnya sebagai petugas kebersihan pasar.

C. Aktivitas Paguyuban Baru

C.1. Memelihara Jaringan Kekuasaan

Selain berhasil mendekati para aparat muspika, diantaranya camat dan kepolsek dan anggota koramil. KA juga berhasil mendekati salah satu pejabat polres. Oleh KA hubungan dengan berbagai pejabat yang memiliki kewenangan

legal formal dikatakan sebagai hubungan yang dilandasi oleh tenggang rasa dan saling mengerti atas tugas dan tanggung jawab masing-masing.

C.1.1. Interaksi dengan kecamatan

KA mengakui bahwa kecamatan mempunyai tanggung jawab yang besar atas ketertiban dan tata kota di daerahnya, terutama pasca tahun 2002 dimana wewenang Satpol PP telah didesentralisir pada kecamatan masing-masing. Selain terkait dengan wewenang kecamatan atas Satpol PP, PD pasar juga selalu berkoordinasi dengan aparat muspika, terutama camat, sehubungan dengan masalah masalah penertiban PKL dan rencana strategis terhadap pedagang yang akan dimasukkan ke dalam pasar modern yang sedang dibangun.

KA mengerti pentingnya untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan terutama camat. KA menginginkan agar PKL tetap diberikan kesempatan berjualan di wilayah tersebut bila pasar modern tersebut jadi. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat menghadapi PD pasar sendiri. Ia berharap suatu saat dapat dibantu oleh camat dalam menghadapi PD pasar. Menurut KA, camat bersedia membantu dan akan selalu menyampaikan perkembangan terbaru terkait kebijakan PD pasar. Hubungan antara dirinya dengan pihak kecamatan berlangsung secara informal. Kutipan di bawah ini menunjukkan bagaimana sifat hubungan di antara mereka.

> *Artinya diambil mudahnya, ngikuti PKL, karena keberadaan PKL itu memang sudah diatur dan dibina. Dalam artian, bukan dibina secara otomatis ya, bukan secara langsung ndak ya. Dalam artian diketahui.(KA0906WG:L145)*

Untuk memperkuat hubungan antara dirinya dan kecamatan, KA selalu berinisiatif untuk membantu setiap *hajatan* yang diadakan oleh kecamatan. Bantuan yang diberikan KA seringkali dalam bentuk uang atau buah-buahan untuk membantu *hajatan* tersebut. KA juga mengakui bahwa ia kerapkali menyumbang kepada pihak kecamatan sampai tingkat RT apabila ada acara 17 agustusan. Berdasarkan keterangan yang diberikan LI, KA juga melakukan praktik salam tempel pada aparat kecamatan. Salam tempel ini dimaksudkan sebagai ucapan terimakasih KA terhadap kecamatan. Tidak jelas siapa aparat kecamatan yang diberi oleh KA. Namun pada tahun 2002, KA pernah bercerita kepada LI bahwa kecamatan tidak mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak daripada polisi ataupun koramil. Hal ini dikarenakan seringnya bantuan hajatan yang diberikan oleh KA kepada kecamatan.

Terkait dengan tindakan satpol PP, PN mengakui bahwa Satpol PP memang seringkali bertindak arogan kepada PKL, namun tindakan itu biasanya hanya dilakukan diawal saja. Lama-kelamaan hubungan antara PKL dan satpol PP bahkan bisa menjadi layaknya 'sahabat'. Hal tersebut lantaran keberadaan ketua paguyuban dianggap Satpol PP dapat dipercaya untuk mengatur dan mengkoordinasikan PKL, sehingga membantu tugas satpol PP sendiri. Pernyataan PN ini diamini oleh KA.

Seorang aparat kecamatan yang dikonfirmasi peneliti tidak banyak memberikan keterangan yang berarti tentang aktivitas KA. Ia hanya mengatakan bahwa orang-orang kecamatan memang mengenal KA.

C.1.2.Interaksi dengan Aparat Kepolisian

Untuk aparat kepolisian, KA menjalin hubungan dekat dengan kapolsek, pejabat polres, serta petugas lantas yang bertugas di daerah Setonongulon. Bahkan KA sendiri sempat diajak oleh kapolsek untuk hadir di acara pergantian kapolres.

> *Makanya kemarin saya tanya berkaitan dengan acara ini. Kan kapolsek jadi panitia saya pikir. (KA0906WG :L252) ..... Saya diajak ke sana. Waduh Dan (istilah komandan) saya repot (sambil tertawa) (KA0906WG :L254)*

Menurut KA, kedekatan antara dirinya dengan pejabat polres dan kapolsek lebih didasarkan atas toleransi, saling mengerti, dan tenggang rasa. PN dan KA mengakui bahwa polisi memahami keberadaan PKL yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun di satu sisi polisi juga mempunyai tanggung jawab terhadap atasan terkait kebijakan yang harus ditegakkan *(PN0906WG:L 408)*. Aparat kepolisian kemudian memberikan restu atas aktivitas PKL melalui KA, dengan syarat KA harus dapat mengontrol para PKL, sehingga menjadi lebih tertib dan tidak memacetkan jalan *(PN0906WG:L 292)*. KA sendiri mengakui bahwa pemberian ijin tersebut sebenarnya beresiko karena aktivitas PKL dapat dikatakan ilegal. KA mewujudkan rasa terimakasihnya kepada aparat yang telah memberikan restu atas aktivitas PKL dengan memberikan sebagian iuran pedagang. Biasanya pemberian ini diwujudkan dalam bentuk salam tempel.

Di pasar Setonongulon praktik salam tempel ini sempat disaksikan oleh peneliti sendiri. PN didepan KA, sempat bercerita kepada peneliti bahwa bagaimanapun ia bekerja ujung-ujungnya juga ketemu dengan KA. Dengan nada bergurau PN mengatakan bahwa dirinya sering malu ketika harus ke pasar karena pasti *disangoni* oleh KA. Seusai berbincang-bincang dengan peneliti dan KA, KA

memberikan amplop kepada PN. Amplop ini diberikan KA ketika PN akan mengendarai sepeda motornya.

> *Pokoknya seluruh TK mungkin sudah saya kelilingi. Program siapa? ya kalau mau bekerja ya begitu. Akhirnya ketemu pak KA juga. Ketemu dengan tukang parkir. PK lima semua.* ***Saya sering malu kemari karena kalau kemari pasti disangoni. Malu saya*** *(sambil tertawa).(PN0906WG: 277)*

Besar uang yang diberikan KA belum bisa dipastikan. Menurut LI, bila pada waktu iuran yang dibebankan kepada pedagang masih Rp 1000 setiap aparat kepolisian yang menjadi beking dalam aktivitas PKL mendapatkan Rp 300.000, sehingga bila sekarang iuran paguyuban adalah Rp. 2000, dimungkinkan seorang aparat akan mendapatkan Rp 500.000. per bulan. LI mengatakan bahwa pembagian ini sama rata tanpa memandang jabatan polisi tersebut.

Seorang aparat kepolisian yang dikenal peneliti bertugas di sektor tersebut tidak menafikkan adanya setoran terhadap oknum kepolisian. Walaupun PU tidak mengatakan besarnya uang dan siapa saja yang terlibat, namun ia sempat mengatakan seorang aparat Bimas yang mempunyai hubungan dekat dengan para preman pasar, yakni M. Preman-preman pasar tersebut lazim disebut KM. PU juga mengatakan bahwa kelakuan oknum kepolisian tersebut tidak hanya sebatas pemberian setoran uang oleh KM, kadang mereka disuplai minum gratis ataupun obat gratis (narkoba) oleh bandar. M memang bukan orang yang suka mengkonsumsi obat (narkoba) tapi ia seringkali diajak minum oleh KM setempat. Merujuk pada keterangan LI, M adalah pelindung aktivitas Sy, ketika ia masih menjadi kepala paguyuban PKL di Setonongulon. Saat ini M dikatakan lebih banyak beroperasi di Pasar Layang.

KM sendiri adalah sebutan aparat kepolisian atas preman. KM adalah kepanjangan dari Keamanan. Baik AN maupun PU mengakui bahwa paguyuban sebenarnya adalah preman yang oleh polisi disebut KM. Mereka meyakini disetiap pasar pasti mempunyai KM. Setiap KM tersebut pasti mempunyai beking aparat Polisi ataupun TNI.

AN sebagai polisi yang setahun lalu pernah bertugas di sektor tersebut mengaku pernah mendapatkan setoran dari pasar. Namun setoran tersebut bukan dari pasar Setonongulon namun di daerah pasar Layang. Setoran yang diterima AN tidak sebatas pada setoran KM, Ia juga kerapkali juga mendapatkan setoran dari bandar judi togel sebanyak Rp. 500 ribu.

Menurut AN, penyebutan istilah KM tidak lepas dari aktivitas awal yang dilakukan oleh preman. Semula istilah preman pasar selalu identik dengan modus operandi praktik *pemajakan liar* atau pemalakan. Praktik pemajakan sebenarnya merupakan tindakan di luar hukum yang harus diproses oleh kepolisian. Namun oknum kepolisian setempat mengambil jalan tengah dengan mendekati preman sebagai pihak pemajak dan pedagang yang merasa dirugikan. Preman diperbolehkan untuk memungut uang terhadap pedagang, tetapi harus ada pengaturan dan perlindungan terhadap pedagang tersebut. Hasil penarikan uang terhadap pedagang juga semestinya disetor sebagian kepada aparat atas dasar saling mengerti. Asumsinya, semua pihak dapat mendapatkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Kutipan di bawah ini akan memperjelas pemahaman terhadap deskripsi tersebut :

> *"Kan begini... polisi yo.. polisi luas yo. Biasae kan premane kan bergerak dhisik. Koyok pajek. kan pertama bien istilahe kan gak KM, majek-majek ngono. Kan otomatis sing dipajekkan merasa dirugikan, lapor polisi. Polisi turun... "sopo bikin (masalah)"...*

ditangkep. Terus digalang, "gak po-po awakmu ngono." Terus iki Korbane mau iku diomongi, "Gak papalah! kalau memang ada apa-apa, silahkan komplain ataupun apa." opo istilahe lah. "kalo merasa aman ya nggak suah komplain lah. Wong uang segitu aja." Yok opo carane ngomonglah..... Biasae ngono kan umpama aku yo premane yo iku mau yo, "terusno gak po-po.. tapi ojo kasar". "Engkok podo-podo jalan, tapi kon tiap bulan yok opo caramu awakmu aman, awakmu enak, awakmu iso kerjo terus.. tapi awakmu gak usah macem-macem neng kene." Terus yo setor neng polisi. (AN3005LH: L190)

Kalau ada koorrdinasi yang baik kan enak. Dalam artian bukan berarti polsek itu nanti koordinasi kita terus, "kamu harus setor sekian," itu nggak. ***Kita hanya sebagai kepengurusan hanya tolerensi, tenggang rasa, pengertianlah dalam artian... "ya sih ini memang lahan negara." Dan lahan negara itu ada yang berkompeten****... (KA0906WG : L212)*

"Ooo... tawar-tawaran antara polsek ambek paguyuban pedagang iku yo. yo podho ngertine lah. Tawaran piro yo entuk bagian piro. (LI2705 WG : L250)

Setelah itu, uang pemajakan atau pemalakan disebut sebagai uang keamanan. Preman sendiri kemudian disebut dengan istilah KM. Keberadaan KM dapat dikatakan bermanfaat sekaligus dimanfaatkan aparat. Aparat dapat memperoleh informasi secara informal atas pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan warga secara terang-terangan seperti curanmor dan tindakan kriminal yang lain *(PU3005LH :L235)*.

Walaupun yang dijelaskan oleh AN ini tidak dapat digeneralisasikan pada apa yang terjadi di Pasar Setonongulon, namun setidaknya terdapat gambaran bahwa polisi juga membutuhkan KM terutama untuk membantu pekerjaannya sekaligus menambah penghasilannya.

KA menganggap bahwa PN dan juga aparat kepolisian lainnya seperti Kapolsek sebagai seorang pembimbing dan pemberi petunjuk. Hal tersebut diungkapkan KA langsung kepada PN. Ia mengatakan bahwa PN adalah tempat belajar dan bukannya pedagang dikarenakan pedagang itu tidak tahu apa-apa. Kutipan di bawah ini akan memperjelas penjelasan tadi.

Ya seperti yang kita omong. Ya kita kan perlu binaan wawasan kan. Kalau kita nggak belajar sama pak PN yang punya statement-statement yang demikian, belajar sama siapa. Belajar sama pedagang ya nggak ngerti apa-apa saya. Untungnya pak PN selalu memberikan masukan. Selalu koordinasi selalu koordinasi ya memberikan petunjuk bimbingan kan. Secara nggak langsung kan bimbingan kan (KA0906WG: L281).

C.1.3 Interaksi dengan aparat TNI

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Anggota marinir, HU, adalah orang pertama yang memberikan petunjuk kepada KA agar ia dapat berjualan dengan aman. Setelah KA berhasil melobi camat, KA bahkan masih meminta petunjuk HU.

Kehadiran HU sendiri tak lepas dari sikap paguyuban lama yang mengabaikan ancaman terhadap PKL ayam. HU begitu disegani oleh PKL bukan karena wewenang sebagai anggota marinir namun dikarenakan tindakannya pada waktu terjadi kasus perusakan terhadap PKL ayam.

Dalam satu kesempatan, peneliti sempat melihat HU melewati pasar dengan menggunakan pakaian dinas Angkatan laut. KA dengan penuh hormat menyapa HU yang menggunakan sepeda motor tersebut.

Peneliti masih belum bisa memastikan alasan yang tepat kenapa koramil digunakan oleh paguyuban sebagai pelindung atas aktivitas mereka. Menurut LI, hal tersebut dikarenakan aparat koramil seperti K sejak awal sudah terlibat dalam aktivitas Sy. Anggota koramil tersebut bahkan ikut membidani kelahiran paguyuban dibawah Sy. K menjadi pelindung ketika Sy masih berkuasa. Selain itu koramil dianggap LI sebagai aparat keamanan selain kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah tertentu. Buktinya ketika pasar permanen di Setonongulon masih ada, yang menjaga pasar tersebut secara legal-formal tidak

hanya anggota polisi namun juga anggota koramil. AN mengatakan bahwa digunakannya koramil sebagai beking setidaknya dapat mencegah kecemburuan antar aparat keamanan yang juga sama-sama membutuhkan 'uang tambahan'.

Peneliti juga sempat melihat pemberian salam tempel kepada PJ seorang anggota koramil. Pemberian ini dilakukan ketika peneliti sedang berbincang-bincang dengan PN. Menurut LI, sebagaimana aparat keamanan yang lain, dimungkinkan anggota koramil tersebut mendapatkan Rp 500.000.

Sebagaimana PN, PJ juga seringkali dijamu di warung giras oleh KA. Bahkan PN, PJ (dan juga peneliti) tidak diperbolehkan membayar apa yang telah dibeli di warung tersebut. Menurut LI, tamu dari aparat keamanan memang tidak pernah diperbolehkan membayar pembeliannya. Pembelian dari aparat yang menjadi beking ditanggung oleh paguyuban. Uang yang dipakai paguyuban untuk membayar PKL yang kedatangan tamu aparat, diambil dari hasil iuran pedagang.

Penghormatan dan keseganan yang ditunjukkan oleh KA pada PJ juga nampak sama ketika KA menghadapi PN. Berhubung PJ sendiri adalah orang Jawa maka komunikasi diantara mereka menggunakan bahasa jawa halus. KA sendiri walaupun orang madura cukup lancar dalam berbicara dengan bahasa jawa halus.

C.1.4. Interaksi dengan anak buah

Hasil penarikan iuran pedagang akan disetorkan pada KA dengan sistem setoran wajib. Ketika tarif iuran masih Rp. 1000 maka anak buah harus menyetor Rp. 90.000 tiap malam. Setiap anak buah bukan menyetor Rp 90.000 kepada KA,

namun total hasil pungutan pada PKL yang berjualan pada malam hari. Bila ada sisa, maka akan diambil oleh anak buah tersebut. Namun setoran wajib ini hanya berlaku untuk *shift* perdagangan kedua atau *shift* malam hari. Untuk shift perdagangan pertama, yaitu pada waktu sore hingga tengah malam, tidak diketahui berapa setoran wajib yang harus dibayarkan oleh anak buah preman.

Selain merekrut bekas anak buah dari Sy, KA juga merekrut MT. Menurut keterangan LI, KA cenderung lebih percaya untuk menggunakan orang yang satu suku dengannya yaitu orang Madura. Orang Madura dianggap memiliki ikatan kekeluargaan yang tinggi. Komunikasi yang ditunjukkan antara KA dengan anak buahnya atau antar anak buah memang lebih sering menggunakan bahasa madura.

Anak buah KA seringkali menunjukkan keseganan terhadap KA. Ketika KA berbincang-bincang dengan tamunya (tidak terkecuali dengan peneliti), anak buah mereka selalu menjadi pendengar dan tidak pernah memotong pembicaraan KA. Namun, KA bukanlah kepala paguyuban yang kaku. Ia sering terlihat bergurau dengan anak buahnya.

Dikatakan LI, D adalah orang pertama yang memanggil KA dengan sebutan abah, selanjutnya ia kemudian akrab dipanggil kaji (haji). Padahal menurut LI, KA sebenarnya belum haji. Panggilan pak kaji dimulai oleh anak buahnya sendiri. Istri dan keluarganya juga memanggil KA sebagai pak Kaji pula. Panggilan pak kaji KA ini mulai akrab ditelinga pedagang semenjak ia menjadi ketua paguyuban. Beberapa pedagang lama yang mengetahui seluk beluk KA biasanya hanya tersenyum saja ketika aparat kepolisian ataupun pedagang baru memanggil KA sebagai kaji/haji.

Kesetiaan anak buah terhadap KA diwujudkan pada perilaku mereka yang selalu menuruti kehendak KA. Hal ini dirasakan peneliti ketika anak buahnya selalu menguntit peneliti ketika mengambil foto lapangan. Sebelumnya KA sempat mengatakan kepada peneliti agar melapor sebelum mengambil foto lapangan. Tujuannya agar peneliti bisa diantar oleh KA sendiri atau oleh anak buahnya.

Namun, pernyataan berlawanan juga pernah diungkapkan KA ketika berbincang-bincang dengan PN. Ia mengatakan bahwa dedikasi anak buahnya rendah. Pernyataan ini diungkapkan KA jam setengah delapan pagi, ketika beberapa PKL masih tampak belum membubarkan diri.

C.2. Penarikan Iuran Pada Pedagang

Penarikan iuran pada pedagang dibagi dalam dua *shift*. *Shift* ini menunjukkan pada waktu berjualan PKL. *Shift* pertama untuk PKL yang berjualan pada sore hari sampai pada tengah malam jam 12. *Shift* kedua dilakukan pada PKL yang berjualan pada jam 12 malam hingga jam 7 pagi. Untuk *shift* pertama biasa dilakukan sehabis maghrib atau isya' sedangkan untuk *shift* kedua biasanya dilakukan pada jam 4 sampai jam 5 pagi.

Untuk pedagang yang berjualan sampai melewati dua kali *shift* maka iuran yang dibayar juga dua kali. Misalnya, bila ada PKL yang berjualan mulai dari sore hari sampai dengan pagi hari jam 7, maka ia akan mendapatkan penarikan iuran dua kali. Untuk PKL yang berjualan pada satu *shift* saja maka ia hanya membayar satu kali. Menurut pengalaman LI, pembagian tugas pada preman anak buah KA

sangat jelas sehingga tidak mungkin bagi PKL yang berjualan dalam satu *shift* untuk ditarik dua kali oleh anak buah KA yang berbeda.

Tarif Iuran yang harus dibayar adalah Rp. 2000. Iuran ini dibagikan dalam bentuk karcis. Karcisnya sendiri ada dua jenis, yang pertama adalah karcis kebersihan berjumlah Rp 1000 dan karcis keamanan yang juga Rp 1000. Sehingga setiap kali penarikan, PKL akan mendapatkan dua karcis, yaitu karcis kebersihan dan karcis keamanan. PKL bisa meminta karcis tersebut setiap usai membayar kepada anak buah KA, namun seringkali beberapa PKL *sungkan* untuk meminta karcis tersebut.

Penarikan iuran pada PKL dilakukan oleh anak buah KA, yaitu oleh SKR, D dan MT. KA tidak pernah menarik iuran langsung pada PKL, kecuali ketika ada permasalahan seperti ada PKL yang tidak mau membayar. Tidak jarang KA marah terhadap PKL yang tidak mau membayar. Ia selalu memperingatkan PKL tersebut terkait lahan yang ditempati untuk berjualan. Berdasarkan pengakuan KA, pasca dicabutnya perda dan SK yang mengatakan radius 100 m adalah wilayah pasar, maka lahan yang ditempati oleh PKL dapat dikatakan ilegal, apalagi pasar resmi telah pindah ke tempat penampungan sementara. Menurut KA, semestinya keadaan ini membuat PKL mengerti posisinya.

Bila PKL tadi tetap bersikukuh dan tidak mau membayar, biasanya KA hanya membiarkan dan tidak akan menarik iuran lagi pada mereka. Namun biasanya akan ada gangguan yang menimpa PKL tersebut. Gangguan tersebut tidak pernah dilakukan secara terang-terangan oleh KA dan anak buahnya seperti D, SKR, dan MT. Gangguan justru berasal dari orang-orang yang tidak jelas asal-

usulnya. Biasanya pengganggu tersebut adalah orang yang berpura-pura menjadi pembeli yang selalu mencari-cari kesalahan PKL yang tidak mau membayar tersebut. Tindakan tersebut kemudian akan dibarengi dengan perusakan dan pemukulan terhadap PKL.

D. Alasan Paguyuban Menarik Iuran Pada Pedagang

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh KA terkait dengan aktivitas penarikan iuran pada pedagang. Salah satunya terkait dengan lahan yang digunakan oleh PKL. KA sangat menyadari kebutuhan para pedagang terutama di pasar kaki lima yang membutuhkan rasa aman terkait lahan yang-tak-seharusnya ditempati.

KA menunjukkan kepada peneliti tentang beberapa orang PKL yang sudah melakukan aktivitas perdagangannya sejak dulu, bahkan sebelum SK walikota no 18/99 tersebut turun. Menurut KA, mayoritas PKL berada pada kalangan ekonomi menengah ke bawah dan minim kemampuan untuk dapat membeli stan di dalam pasar. Mereka menggantungkan kehidupan keluarganya dari pekerjaannya sebagai PKL. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, PKL menempati lahan-lahan yang ramai perekonomian. Lahan yang ramai perekonomian ini tentunya adalah di tempat padat penduduk atau di depan pasar. Menurut KA, keadaan tersebut semestinya membuat pemerintah lebih bijak dengan memberi ijin berjualan pada PKL di tempat-tempat tersebut pada malam hari. Ia beranggapan aktivitas perdagangan di bahu-bahu jalan pada waktu tersebut tidak akan terlalu mengganggu aktivitas penduduk.

Bagi KA, sejak dicabutnya SK walikota no 18/99, PKL seakan-akan hendak dihapus oleh pemerintah. Perda yang baru tentang pengelolaan PKL dari dinas koperasi juga dianggap masih belum jelas, kendati ia sendiri juga sudah melobi dinas koperasi. PD pasar dan Pemerintah Kota juga dianggapnya seringkali menggunakan cara-cara represif dengan menggunakan aparat keamanan seperti polisi dan satpol PP. Bagi KA, rakyat kecil seperti PKL seakan harus rela selalu dipersalahkan dan digusur terkait aktivitas perdagangan yang dianggap menimbulkan kemacetan dan kekumuhan. Pemerintah sendiri tidak pernah memberikan solusi yang memuaskan atas keberadaan PKL.

KA menyadari bahwa ada aparat lokal yang berwenang atas lahan yang ditempati oleh PKL. Disinilah KA kemudian menjadi penjembatan atas kepentingan PKL dengan menjadi penghubung antara aparat-aparat lokal yang mempunyai kewenangan legal formal atas aktivitas PKL tersebut *(KA0906WG:L212; LI2705WG:L250).*

> *kalau mereka-mereka nggak (di)minta(i) income ya otomatis... nah kita selaku koodinator itu untuk apa? (KA0906WG:L186)*

> *Otomatis kita selaku kepengurusan mau ngambil income itukan untuk satu contoh sampah. Kita juga butuh sarana dan prasana satu contoh kayak gerobak iya kan. terus pekerjanya, terus tenaga untuk pengaturan dalam artian orang-orang saya. Dalam artian koordinator saya, terus orang-orang dibawah saya. Dalam artian satu sistem. Kan nggak mungkin kita tinggal diam. Kita untuk mengatur. Karena apa kan untuk keselamatan kita bersama kan. (KA0906WG:L194)*

Terkait dengan aktivitasnya sebagai pengatur dan penjembatan tersebut, KA merasa bahwa PKL perlu memberikan kompensasi kepada paguyuban. Selain itu, pembayaran pedagang juga ditujukan untuk membiayai pengelolaan sampah

serta menggaji anak buahnya yang juga ikut berperan dalam mengatur dan menata PKL.

E. Persepsi Pedagang atas Aktivitas Paguyuban

Ketika awal penarikan iuran dimulai oleh Sy, pedagang menganggap bahwa Sy cenderung represif dengan mengandalkan kekuatan fisik. Walaupun beberapa dari mereka menggerutu, namun pedagang sesungguhnya tidak pernah menolak untuk membayar tarif iuran yang telah dibebankan kepadanya. Bila Sy dianggap semena-mena, maka pedagang menganggap bahwa paguyuban dibawah KA telah berusaha untuk melakukan fungsinya sebagai pengelola dan penjembatan, walaupun masih terdapat penyimpangan secara praktek.

Di luar interaksinya di pasar, pedagang menyebut paguyuban identik dengan preman. Sebutan preman tersebut didasari pada kekuasaan paguyuban atas lahan. Kekuasaan tersebut menyebabkan ia dapat bebas melakukan pungutan liar terhadap pedagang. Namun menurut mereka, preman paguyuban tidak dapat disamakan dengan penodong atau pemalak. Keberadaan preman paguyuban ini justru bermanfaat bagi PKL.

Paguyuban yang dikepalai KA, walaupun disinyalir PKL melakukan aksi teror terhadap PKL yang tidak mau membayar, namun keberadaannya justru bermanfaat terhadap eksistensi PKL, terkait akses informasi atas *obrakan* pemerintah. Selain itu, paguyuban dianggap sanggup menindaklanjuti permasalahan pedagang. Dengan kekuasaannya, KA mampu menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antar sesama PKL.

Tapi nek misale sing ndek PKL nggenanku iku mau (preman) yo malah melindungi pedagang. Tapi yo njaluk upeti. (LI2006WG: L42)

Menurut LI, beberapa pedagang memang memiliki kebencian terkait sikap KA yang arogan. Mereka menganggap sejak KA menjadi kepala paguyuban, ia berubah menjadi orang yang sombong. Kebencian terutama diungkapkan oleh pedagang yang telah berjualan sejak lama.

Keluhan dan kebencian pedagang terhadap paguyuban hanya disampaikan sebatas sinisme dan gunjingan. Tidak ada perlawanan dari pedagang. Mereka sangat menyadari bahwa kekuasaan paguyuban atau preman adalah paten dan tidak bisa diganti. Bahkan pada masa kekuasaan Sy, mereka tidak berani secara terang-terangan menggantikan kekuasaan Sy, walaupun dirasa ia tidak bertanggung jawab dan tidak dapat melindungi PKL. Kekuasaan Sy justru tergantikan dengan sendirinya, setelah ada dukungan aparat yang disegani di lingkungan pasar terhadap seorang pedagang.

Bagi pedagang, radikalisme dengan mengganti preman bisa berakibat fatal bagi *sandang pangan* dirinya. LI mengatakan bahwa bila berhasil belum tentu mereka akan mendapatkan akses kekuasaan dari para aparat. Selain itu, ketakutan akan hukuman dari preman menyebabkan mereka tidak berniat untuk mengganti preman tersebut. Hukuman berupa pukulan dan teror dari orang-orang yang tidak dikenal cukup membuat pedagang kaki lima berpikir dua kali sebelum melakukan aksinya.

PKL bahkan seringkali membenci sesamanya yang tidak mau membayar iuran paguyuban, terutama untuk PKL yang tempat berjualannya berdekatan dengan PKL pembangkang (PKL yang tidak mau membayar). Mereka khawatir

bahwa aksi pembangkangan salah satu PKL akan berimbas pula pada dagangannya yang berada di sekitar PKL pembangkang tersebut.

BAB VI

PEMBAHASAN

Bab ini merupakan interpretasi idiografik dan bukan menjadi interpretasi yang bersifat nomotetik. Sifat dari interpretasi ini adalah berlaku khusus dan tidak dapat digeneralisasikan pada kasus yang lain, sebagaimana sifat dari interpretasi penelitian naturalistik yang lebih menekankan pada interpretasi yang bersifat ideografik.

Interpretasi ini walaupun berusaha untuk mendasarkan diri pada logika induktif tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh kerangka pikir peneliti. Kerangka pikir yang telah dikonstruksikan oleh pengetahuan disengaja atau tidak telah memberikan pengaruh terhadap peneliti dalam mengarahkan interpretasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan, maka penelitian ini ingin menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam fokus kajian penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah atribut preman dalam komunitas pasar?
2. Bagaimanakah penyebab munculnya praktik premanisme di lingkungan pasar?
3. Bagaimanakah interaksi preman dalam jaringan kekuasaan?

Interpretasi A adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Interpretasi B untuk menjawab pertanyaan nomor 2, dan Interpretasi C untuk menjawab pertanyaan nomor 3.

Berbagai interpretasi yang ditampilkan walaupun ditampilkan terpisah tidak dapat dipahami sebagai penjelasan yang eksklusif, terpisah dari deskripsi

dan interpretasi yang lain. Sebaliknya, berbagai faktor dalam satu interpretasi berkaitan dengan faktor-faktor yang lain untuk saling memperkuat.

A. Atribut Preman dalam Komunitas Pasar

Interpretasi permasalahan dalam sub bab ini secara singkat akan digambarkan dalam bagan berikut :

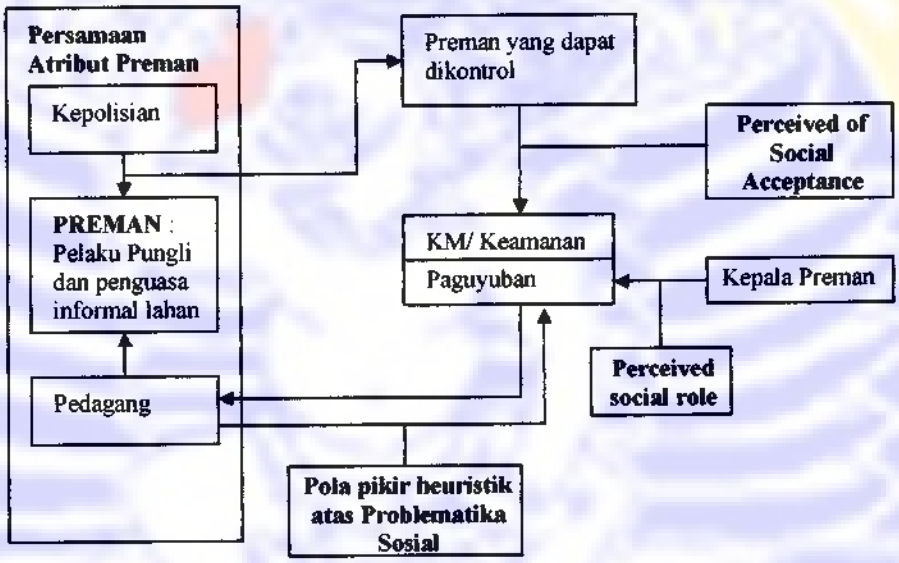

Gambar 1

Bagan Reproduksi Atribut Preman

Preman merujuk pada bermacam-macam pengertian. Ada preman pengangguran yang sukanya menganggu, mencopet, mengutil atau memalak pedagang. Namun apabila dikatakan sebagai preman Pasar Setonongulon, maka LI dan juga PKL lainnya akan merujuk pada paguyuban PKL. Berbagai istilah

lain yang disebut PKL identik dengan paguyuban adalah pengurus, panitia ataupun pengelola swasta.

Aparat kepolisian menggunakan istilah KM untuk merujuk kepada paguyuban atau preman yang dapat ditundukkan. Mereka menggunakannya dalam komunitas mereka sendiri. Sepengetahuan peneliti, istilah ini juga seringkali dijadikan bahan olok-olok (ejekan) diantara sesama polisi.

Istilah KM diproduksi oleh aparat kepolisian untuk merujuk pada preman yang dapat dikontrol. Dikontrol dimaksudkan dapat diberdayakan untuk membantu pekerjaan polisi seperti menertibkan, mengamankan wilayah (termasuk pasar), atau mendapatkan informasi atas tindakan kejahatan. Keberadaannya tidak lagi dianggap mengganggu namun justru membantu polisi. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa oknum kepolisian kemudian memanfaatkan para KM untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Menarik dicermati, atribut yang beragam atas diri preman adalah terkait dengan relasi kekuasaan yang ada dalam ranah pasar. Dalam jaringan kekuasaannya dengan aparat, posisi KA ataupun Sy hanyalah menjadi pihak terdominasi. Lisensi atas aktivitasnya sangat ditentukan oleh legitimasi aparat berwenang. Tanpa adanya legitimasi aparat maka aktivitas yang dilakukan akan tidak ada bedanya dengan pelaku kriminal yang melakukan pemajakan dan penodongan kepada pedagang.

Disatu sisi, pungutan liar yang dilakukan KA hanya untuk mengikuti aturan main dari pihak-pihak dominan. KA bahkan berasal dari PKL dan tak mempunyai latar belakang sebagai pelaku pemungutan liar. Ia justru berusaha

mengoptimalisasi fungsi dan peran paguyuban sebagai pengelola, pelindung, pemimpin, sekaligus penjembatan kepentingan PKL dengan aparat yang berwenang. Terkait dengan kemarahan dan tindakan teror atas PKL yang tidak mau membayar iuran, ia selalu mempertegas kepada PKL bahwa lahan yang ditempati PKL adalah lahan ilegal, sehingga mereka semestinya mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Konstruk pengetahuan telah memiliki stigma negatif atas pelaku pemajakan liar sebagai preman. Preman identik dengan perilaku pemerasan, kekerasan, dan kejahatan. KA menolak disebut sebagai preman, walaupun ia melakukan pungutan liar dan disinyalir melakukan teror terhadap pedagang yang membangkan terhadap aturan-aturan yang dibuatnya. Ia lebih menekankan aktivitasnya pada peran, fungsi, serta ketertundukannya terhadap aturan main. Ia mempersepsikan dirinya sebagai paguyuban sebagai bentuk *perceived social role* (persepsi atas peran sosial) terhadap PKL.

Untuk menjamin aturan main dan menjauhkan kesan kriminal pada pelaku, polisi memproduksi atribut KM. Atribut yang direproduksi tersebut menimbulkan pemahaman subjektif pada khalayak. Dalam hal ini, KM tidak dipahami pada aktivitasnya yang melanggar hukum dengan melakukan pungutan liar pada PKL dan menyetor pungutan tersebut pada oknum-oknum aparat saja, namun lebih pada aktivitasnya yang juga mengatur PKL dan membantu aparat dalam hal ketertiban dan keamanan.

Reproduksi atribut diharapkan secara hegemonik dapat memperkuat *perceived of social acceptance* (persepsi atas penerimaan sosial) terhadap

hubungan relasional antara polisi dan preman dalam komunitas. Sekaligus, secara tak langsung akan semakin mempertegas *perceived of social role* paguyuban.

Dengan penyebutan atribut yang berlangsung secara hegemonik dari pihak dominan (aparat) tersebut, istilah paguyuban kemudian semakin melekat dalam interaksi PKL ketika mereka masih berada dalam ruang-ruang pasar. Namun ketika interaksi sudah tidak lagi dilakukan di dalam pasar, para PKL tidak lagi menyebut preman sebagai paguyuban, pengurus, atau panitia, tetapi mereka menyebutnya dengan sebutan aslinya, yaitu "preman".

Sebagaimana dikatakan oleh LI, paguyuban disebutnya sebagai preman terkait dengan kekuasaannya secara informal atas lahan. Kekuasaannya tersebut membuat preman dapat bebas melakukan praktiknya termasuk melakukan pungutan liar kepada pedagang. Namun diakui LI, terdapat perbedaan antara preman pengangguran dan preman paguyuban. Preman pengangguran menurut LI selalu menganggu sedangkan paguyuban justru melindungi. Walaupun paguyuban juga melakukan teror dan pungutan liar, keberadaannya justru dibutuhkan oleh PKL terkait akses yang dimiliki paguyuban terhadap aparat.

Dikukuhkannya atribut pelindung atas diri preman, tidak lain disebabkan adanya pola pikir heuristik dari PKL terhadap berbagai problematika sosial yang menimpa dirinya. Kognisi PKL mencari berusaha mencari strategi atas penyelesaian masalah terkait dengan eksistensi perdagangan mereka yang terancam. Pola pikir heuristik mengidentifikasi berbagai proses kognitif dalam menterjemahkan berbagai informasi terkait relasi dan proses-proses sosial.

Pola pikir heuristik dimulai ketika PKL menyadari bahwa problem yang mereka alami berkaitan dengan adanya saling ketergantungan sosial. Problem relasi sosial ini merupakan masalah sosial yang dapat dikatakan fundamental. Secara lebih spesifik, masalah yang dimaksud menyangkut sifat represif kebijakan dan eksploitasi aparat terhadap PKL. PKL memperhatikan bagaimana aturan main (yang telah ditetapkan secara terselubung oleh pihak dominan melalui pemberian upeti terhadap aparat yang berwenang) dapat menjamin eksistensi perdagangan mereka dalam pasar.

Dari hal tersebut PKL mulai mengkaji perlakuan yang diterima dari preman. PKL akan mengkaji bagaimana otoritas dan pungutan liar yang dilakukan preman terhadap dirinya telah menjamin aktivitas perdagangannya di pasar tersebut. Secara lebih mendasar bahwa praktik pungutan liar ternyata tidak sekedar ditujukan preman untuk mengeksploitasi PKL namun sebagai penerapan aturan main agar PKL tidak *diobrak* dan dapat berdagang dengan aman dan tanpa rasa was-was. Dalam hal ini, preman dianggap telah mengoptimalisasi perannya sebagai pengelola dan penjembatan kepentingan PKL.

Bagi PKL, pelaku pemungutan liar terlanjur memiliki atribut sebagai preman. Padahal, aturan main mengharuskan terjadinya pemungutan liar atas sektor ilegal sebagai kompensasi *upeti* terhadap aparat lokal yang berwenang. Preman sebagai pelaku pemungutan liar dapat dikatakan hanyalah pelaku yang menjalankan aturan main untuk menjamin eksistensi perdagangan itu sendiri. Pola pikir heuristik tersebut kemudian memberikan atribut kepada preman sebagai pelindung PKL sekaligus memperkukuh istilah paguyuban di mata PKL.

Pemberian atribut ini dapat dikatakan sebagai dasar untuk bereaksi terhadap stimulus serupa yang datang pada PKL di kemudian hari. Sekali PKL menentukan atribut tersebut, maka ia akan menggunakan atribut ini untuk menginterpretasi berbagai hal yang terkait dan yang terjadi di kemudian hari.

B. Penyebab Munculnya Praktik Premanisme

Faktor yang menentukan kemunculan praktik premanisme adalah adanya habitus yang terbentuk karena struktur lingkungan. Namun struktur lingkungan bukanlah satu-satunya penentu praktik premanisme dalam ranah pasar. Seseorang yang kemudian dipersepsi sebagai preman memiliki kesadaran dalam menginterpretasi struktur lingkungan dan budaya kekuasaan lalu kemudian mewujudkannya dalam ekspresi yang masuk akal. Bila dalam perspektif teori medan, hal ini disebut sebagai daya. Namun bila merujuk pada konsep habitus, hal ini disebut sebagai disposisi.

Habitus dapat dikatakan sebagai *schemata* atau struktur mental yang menjadi dasar kepribadian yang digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi kehidupan sosial. Di sisi lain, habitus merupakan pengkondisian yang dikaitkan dengan oposisi internal antara pihak marginal dan dominan. Sebagian dari sifat habitus akan dilacak pada sub bab selanjutnya.

Dalam kasus Sy terdapat beberapa faktor pendorong Sy (preman lama) untuk melakukan praktik pungutan liar, yaitu :

1. legitimasi dan pengkondisian dari aparat lokal yang memiliki modal kekuasaan dan wewenang legal-formal

2. peluang atas kebijakan pemkot yang memutuskan bahwa PKL dalam radius 100 m dari wilayah pasar masuk dalam pengelolaan pasar.
3. sikap pedagang yang cenderung mengutamakan keselamatan sumber perekonomiannya
4. atribut Sy sebagai pegawai pasar yang memunculkan persepsi kepada pedagang bahwa apa yang dilakukan adalah atas kebijakan PD pasar.

Dalam kasus Sy terdapat faktor pendorong utama atas praktiknya, yaitu legitimasi aparat berwenang seperti anggota koramil dan anggota kepolisian setempat. Faktor pendorong yang lain adalah peluang atas kebijakan pemerintah. Namun peluang tersebut disinyalir diperoleh berdasarkan pertimbangan aparat yang menjadi bekingnya.

Sy tidak mempunyai modal kekuasaan yang membuat PKL dapat segan terhadap dirinya. Ia membutuhkan legitimasi aparat yang memiliki modal kekuasaan yang jauh lebih besar untuk mewujudkan lisensi atas praktiknya. Lisensi tersebut menimbulkan konsekuensi dengan membagikan hasil pungutan atas PKL kepada aparat yang menjadi bekingnya tersebut.

Antara KA dan Sy kemudian terdapat beberapa faktor pendorong yang mirip. Namun terdapat perbedaan situasi atas kemunculan KA sebagai kepala paguyuban dibandingkan Sy. Bila kemunculan Sy lebih dikarenakan faktor legitimasi aparat dan celah atas kebijakan, maka kemunculan KA lebih disebabkan oleh kecemasan terhadap struktur lingkungan yang labil. Dalam kecemasan tersebut, *schemata* KA mempersepsi berbagai kesempatan yang memungkinkan untuk menyelamatkan aktivitas perekonomiannya.

Kebijakan dan dinamika kehidupan pasar telah menimbulkan *disposisi* pada sebagian PKL. Selain itu, budaya korupsi penguasa justru memberikan pengkondisian terhadap munculnya praktik premanisme. Kesemua struktur tersebut saling berkait satu sama lain dan menghasilkan praktik premanisme.

Secara ringkas tema dalam sub bab ini akan digambarkan pada bagan dibawah ini. Selanjutnya untuk memperjelas pembacaan bagan tersebut akan dibahas berbagai struktur lingkungan yang menghasilkan disposisi pada KA yang kemudian hari disebut sebagai preman.

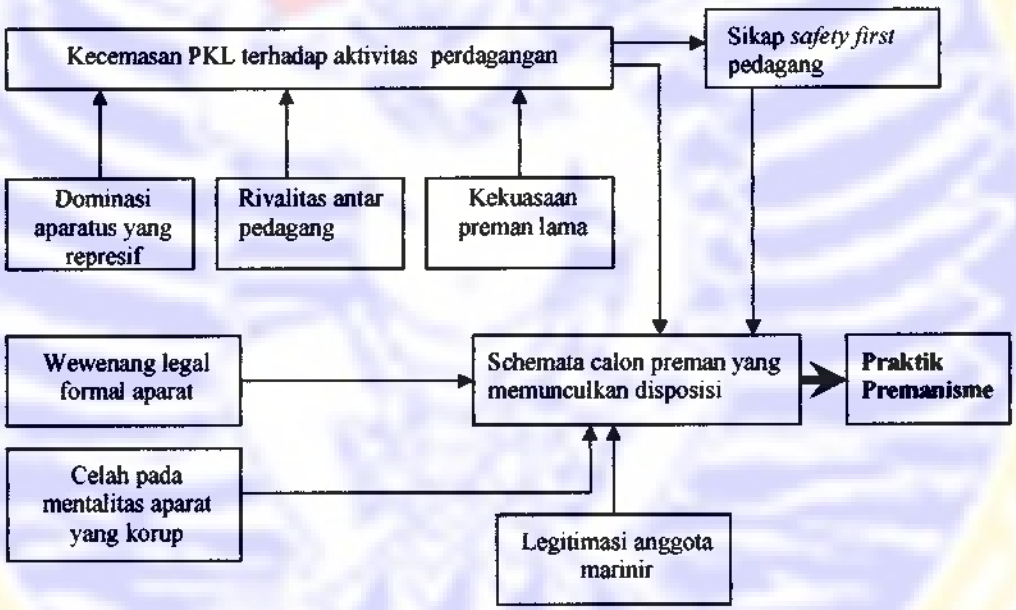

Gambar 2

Bagan Penyebab Munculnya Premanisme

B.1. Dinamika psikologis PKL

PKL hanyalah pihak marginal yang tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak akan mampu untuk mengganti kekuasaan preman, melawan teror dan

ancaman pedagang yang sah secara legal-formal atau bahkan melawan struktur pemerintahan yang cenderung represif terhadapnya.

Terdapat beberapa kasus yang patut dicermati terkait dengan dinamika kecemasan PKL. Pertama, terkait dinamika perdagangan pasar yang penuh intrik dan kompetisi diantara pelaku-pelakunya. Keberadaan PKL yang hanya mengeluarkan modal kecil untuk berjualan telah memunculkan rivalitas dan benih-benih kecemburuan bagi pedagang yang memiliki stan di dalam pasar (pedagang-dalam). Pedagang-dalam yang memiliki kekuatan legal formal untuk berjualan di dalam pasar menuding PKL telah merusak harga atau mencegat konsumen yang semula dianggap menjadi pelanggannya. Kasus perusakan dagangan PKL ayam pada tahun 2002 menjadi puncak rivalitas perdagangan tersebut.

Uniknya ketika kasus ini meletus, tak satupun PKL yang berani melawan aksi pedagang-dalam tersebut. Hal ini dikarenakan, walaupun eksistensi PKL secara legal masih berada dalam payung SK walikota no 18/99, namun secara akses kekuasaan mereka kalah dengan pedagang-dalam. Pedagang yang telah memiliki stan dalam pasar menjadi prioritas utama atas kebijakan pemerintah dan fasilitas PD pasar. Paguyuban PKL yang dianggap dapat melindungi PKL bahkan cenderung lepas tangan dengan mengungkapkan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan PD pasar. Kasus ini telah menimbulkan keresahan pada PKL, dikarenakan teror dan perusakan serupa dapat saja terjadi lagi.

Kedua, adalah berhubungan dengan kekuasaan preman. Walaupun paska teror pedagang-dalam, paguyuban dibawah kepemimpinan Sy terbukti tidak dapat

memberikan kompensasi berupa perlindungan terhadap aktivitas perdagangan PKL, mereka tetap menganggap bahwa kekuasaan Sy adalah paten dan tak tergantikan oleh PKL. Beberapa diantara mereka bahkan masih tetap membayar pungutan yang diberlakukan paguyuban. Bukti lain yang menunjukkan bahwa kekuasaan Sy telah mendominasi hingga ke dalam *schemata* PKL ialah permintaan salah satu PKL ayam terhadap anggota marinir semula tidak ditujukan secara frontal untuk menggantikan kekuasaan preman yang lama.

Radikalisme habitual PKL berupa penggalangan massa untuk melengserkan kekuasaan Sy dianggap PKL tidak akan efektif. Mereka beranggapan, PKL tidak mempunyai kemampuan dan wewenang apa-apa untuk menggantikan kekuasaan preman. Menurut mereka, yang dapat menggantikan kekuasaan preman adalah aparat yang mempunyai modal kekuasaan yang lebih tinggi. Radikalisme habitual dengan mengganti preman tanpa dukungan dari aparat bisa berakibat fatal bagi *sandang pangan* PKL.

Ketiga, berhubungan dengan dominasi aparatus. Secara institusional, segala aktivitas pedagangan kaki lima berada di bawah bayang-bayang kekuasaan aparatur pemerintahan. Secara dominan, struktur pemerintahan dari pemerintah kota sampai ke tingkat kecamatan, satpol PP, kepolisian dari wilayah hingga sektor, telah menguasai ruang-ruang aktivitas perekonomian PKL.

Seiring dengan dicabutnya SK Walikota nomor 18/1999 dan paska diberlakukannya Perda no 17 tahun 2003, posisi PKL semakin menjadi pihak marginal yang selalu dipersalahkan. Keberadaannya dalam radius 100 m wilayah pasar sudah tidak dapat dijadikan legalitas atas aktivitasnya. Sebagaimana

tertuang dalam Perda 17/2003 dalam pasal 5 ayat D bahwa "untuk menjalankan kegiatan usahanya pemegang Tanda daftar usaha diwajibkan : (d) mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian. Di satu sisi, tanda daftar usaha yang seharusnya diterbitkan oleh dinas koperasi masih sebatas wacana dikarenakan masih belum ada petunjuk teknis atas perda tersebut. Keberadaan Perda tersebut dianggap membatasi pilihan sekaligus mengancam eksistensi PKL yang terlanjur membludak.

Tidak hanya keberadaan Perda tersebut yang mengancam keberadaan PKL. Pemkot kini juga semakin berambisi untuk memodernkan setiap infrastruktur kota, termasuk diantaranya memodernkan pasar tradisional. Diakui oleh KA maupun LI, disulapnya sejumlah pasar tradisional menjadi pasar modern menjadikan mereka khawatir terhadap eksistensi PKL. Hal ini disebabkan areal tempat mereka berdagang juga sedang dibangun pasar modern. Mereka terlanjur berjualan di tengah hiruk pikuk pembangunan pasar modern tersebut.

Kutipan di bawah ini mencerminkan kekhawatiran mereka atas eksistensi PKL.

Berarti dadine koyok DTC lak'an? (RA2705WG : L 338)
Yo.. iku iso grosiran barang. Contone iku iso kyok pasar atom. Kon ngerti pasar atom. Ono hotel, ono permainan. Pedagang njobo jane yo kuatir. (LI2705WG : L 339)
Kuatire? (RA2705WG : L 341)
Kuatire nek pasar dadi. Otomatis nek pengelola pasar gak oleh (pedagang berjualan) nang ngarep-angarepan. Gak oleh ngrusui opo, gak oleh ngrusak pemandangan njero kan, contone koyok wonokromo. Wonokromo kan mbien luberan ndek njobo-njobo. Saiki kan wis gak ono. (LI2705WG : L 342)

PKL itu sendiri kalau dulu emang ada perda kan yang mengatakan radius 100 m .... Nah semenjak penataan perda yang baru... seakan-akan PKL itu maunya kan dihapus... ditiadakan. Dalam artian posisi salahkan, ya karena itu tadi mengena di fasilitas lahan umum. Tapi timbal baliknya sendiri.. Ya balik ke pemerintah sendiri kenapa pemerintah nggak mau menyediakan. (KA0906WG : L94)

Dari ketiga kasus tersebut terlihat bahwa dinamika psikologis PKL berada dalam kecemasan akibat struktur lingkungan yang mensubordinasi dan tidak berpihak terhadap aktivitasnya. Atas kecemasan tersebut, PKL dapat dikatakan selalu mendahulukan keselamatan *(safety first)*, menghindari resiko sanksi yang terkonsuensikan darinya dan yang bisa membuat siapapun mencabut fasilitas-fasilitas perdagangan yang bisa mereka dapatkan.

PKL menyadari membangkitkan aksi perlawanan atas kontrol serta dominasi yang massif bukanlah sesuatu yang mudah. Resistensi PKL dilakukan secara sembunyi-sembunyi, individual, untuk kepentingan pribadi, anonim, sporadik, serta kecil-kecilan. PKL mendahulukan keselamatan. Hukuman berupa teror, pengusiran cukup membuat pedagang kaki lima berpikir dua kali sebelum melakukan aksinya.

KA sebagai satu-satunya PKL yang berjualan daging juga mengalami kecemasan yang sama dengan PKL lainnya terkait dengan ancaman terhadap eksistensi sumber ekonominya. Kecemasan tersebut membuat KA berinisiatif untuk menanyakan bagaimana cara berdagang aman kepada pihak yang memiliki modal kekuasaan simbolik (anggota marinir) di wilayah pasar tersebut. Inisiatif tersebut dilakukan secara pribadi dikarenakan tidak ada rembug ataupun musyawarah antara para PKL sebelumnya. Tidak ada penunjukan dari komunitas PKL bahwa KA adalah wakilnya. Inisiatif KA juga dilakukan tanpa sepengetahuan preman lama.

Kemunculan KA sebagai ketua paguyuban juga tidak dilakukan dengan pemberontakan namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Legitimasi awal justru diperoleh dari anggota marinir yang disegani dan dihormati di kalangan komunitas pasar. Legitimasi ini kemudian semakin diperkuat oleh anggota koramil yang semula menjadi beking Sy berbalik mendukungnya. Setelah legitimasi diperoleh, maka KA mulai berani untuk menunjukkan dirinya sebagai penguasa baru di pasar tersebut.

B.2. Budaya Kekuasaan yang Korup

Dapat dikatakan, awal praktik premanisme yang dilakukan KA di pasar Setonongulon awalnya merupakan bentuk adaptasi untuk menyelamatkan sumber perekonomiannya di lahan tersebut. Aturan main mengharuskan bahwa untuk menjamin eksistensi PKL, mereka harus dapat memperoleh legitimasi dari pihak yang tepat. Seorang anggota marinir yang disegani komunitas pasar menunjukkan celah dari hierarki kekuasaan formal tersebut kepada KA.

Budaya kekuasaan menuntut seseorang atau komunitas yang ingin aktivitasnya dapat berjalan dengan aman untuk dapat menafsirkan makna budaya yang ada. Petunjuk anggota marinir merupakan syarat atau prosedur dalam menafsirkan budaya kekuasaan. Namun bukan berarti sebelumnya, *schemata* KA sama sekali tidak mengetahui akan budaya kekuasaan tersebut. Syarat atau prosedur yang diberikan tersebut hanya merupakan petunjuk baginya untuk mempertajam disposisinya dan memperkuat praktik yang akan dilakukannya.

Sehingga budaya kekuasaan dapat dikatakan memberikan pengkondisian secara tak langsung terhadap munculnya praktik premanisme.

Budaya kekuasaan tersebut tak lain adalah budaya suap menyuap atau budaya korupsi. Bentuk korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan aparat keamanan adalah korupsi upeti (Haryatmoko(2), 2003: 124). Korupsi upeti dimungkinkan karena jabatan strategis aparat tertentu. Berkat jabatan tersebut seseorang akan mendapatkan persentase dari kegiatan-kegiatan perekonomian ilegal yang dilakukan oleh PKL.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, pemkot berikut dengan aparat sering melakukan cara represif dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima. Namun KA mengetahui bahwa struktur aparat itu berjenjang. Bila menilik pada aparat kepolisian, instruksi akan dilakukan dengan cara berjenjang mulai dari polwiltabes, polres, lalu ke polsek (KA0906 WG : L157). Bila melihat dari aparat pemerintahan, instruksi dari pemkot akan turun ke kecamatan. Kewenangan terhadap Satpol PP pun telah didistribusikan pada kecamatan masing-masing. Struktur tugas kepolisian juga tak hanya terbagi berdasarkan teritori namun juga berdasarkan deskripsi tugas. Polisi lalu lintas tentunya berwenang atas pengaturan dan ketertiban jalan, dan bukannya intelejen atau reserse.

Strategi yang dilakukan KA adalah membuat jaringan pada aparat berwenang yang tepat. Pendekatan tersebut tidak hanya berupa permintaan ijin tapi juga dengan perilaku *nyangoni* (memberikan uang).

Ijin secara tidak resmi kemudian diberikan oleh aparat. Alih-alih aparat berwenang tersebut menyatakan bahwa pemberian ijin dilakukan karena kesulitan dalam mengatur sektor *underground economy* yang terlanjur membludak.

Dapat dikatakan bahwa aparat telah bermuka dua. Di satu sisi ia berada dalam wewenang aparatus (baik itu kebijakan atau pimpinan), namun disisi lain ia menghalalkan aktivitas PKL dan keberadaan preman. Sebagaimana dikatakan PN, bahwa kesulitan aparat dalam mengatur PKL membuat PN merasakan pentingnya keberadaan paguyuban untuk menertibkan PKL tanpa harus menggusur mereka.

> *Lho ini hidup saya disini kalau sampean salah ngatur saya... saya mau hidup mau mati. Lebih baik saya mati daripada saya hidup. Nggak tahu kehidupan saya. Karena memang kehidupan .. parkir sudah siap-siap digusur... nggak bisa. Itu kehidupannya dia, berapa orang yang nanti kehilangan mata pencaharian.(PN0906WG:L 287)*

> *Coba taruh disini polisi belum tentu bisa mengatur..(PN0906WG:L 384)*

Bila memang aparat membutuhkan paguyuban untuk dapat mengatur PKL, mestinya paguyuban tersebut yang digaji oleh aparat dan bukan sebaliknya. Imbal balik interaksi antar aparat dan paguyuban justru diwujudkan dalam praktik dimana paguyuban yang menyetor hasil pungutan dari pedagang kepada mereka, sedangkan kompensasi aparat adalah mengijinkan aktivitas paguyuban dan PKL yang ada.

Setoran yang diberikan oleh paguyuban kepada aparat ini diistilahkan sebagai *saling mengerti, tenggang rasa dan toleransi* atas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Istilah ini merupakan wujud dari perilaku yang telah berulang-ulang dilakukan. Kebiasaan akan menciptakan struktur hidup sehingga memudahkan untuk bertindak. Orang tidak perlu susah payah berpikir, mengambil jarak atau memberi makna setiap kali bertindak. Demikian juga dengan korupsi

yang dilakukan aparat yang berwenang, kalau mereka telah mengerti kebiasaan aparat dalam pemberian hasil pungutan liar, tidak perlu lagi berpikir, mengambil jarak, atau mempertanyakan dari tindakannya. Oleh karenanya semua tindakan penyetoran tersebut telah dilandasi dengan saling mengerti, tenggang rasa, dan toleransi.

Ada satu hal yang dapat ditarik terhadap permasalahan korupsi ini. Korupsi sebagai praktik penyelenggaraan negara yang sudah menyebar dan menjadi biasa menyebabkan distorsi di dalam pemaknaan perilaku, artinya pemaknaan yang baik dan yang buruk menjadi kabur. Dalam hal ini aparat dapat berdalih bahwa apa yang dilakukannya adalah menyelamatkan pedagang kecil, namun di sisi lain ia tetap menikmati uang hasil pungutan liar dari pedagang tersebut.

C. Pola Interaksi antara Preman dan Jaringan Kekuasaan

Sebagaimana dikatakan dalam sub bab sebelumnya, apa yang dilakukan KA (yang dipersepsikan pedagang sebagai bentuk premanisme) hanya merupakan suatu strategi bertahan untuk mengikuti aturan main pihak penguasa. Tanpa mengikuti aturan main tersebut, ia dan seluruh PKL yang ada akan diliputi oleh kecemasan kalau-kalau aktivitas perdagangannya akan diobrak. Pola pikir heuristik dalam menterjemahkan kondisi dan relasi sosial telah membuat KA berinisiatif untuk mendekati aparat-aparat yang memiliki modal kekuasaan.

Dalam sub bab ini akan dijelaskan bahwa dinamika oposisi internal yang berlaku dalam struktur memperlihatkan aturan main yang berkaitan dengan

tingkat kontrol atas modal sehubungan dengan interaksi preman, PKL, dan aparat. Interaksi kemudian membentuk simbiosis yang bersifat tarik-menarik kepentingan dan saling memanfaatkan antara berbagai pihak untuk menguasai modal-modal yang tersebar dalam habitus kekuasaan. Secara umum tema dalam bab ini akan digambarkan dalam bagan berikut ini:

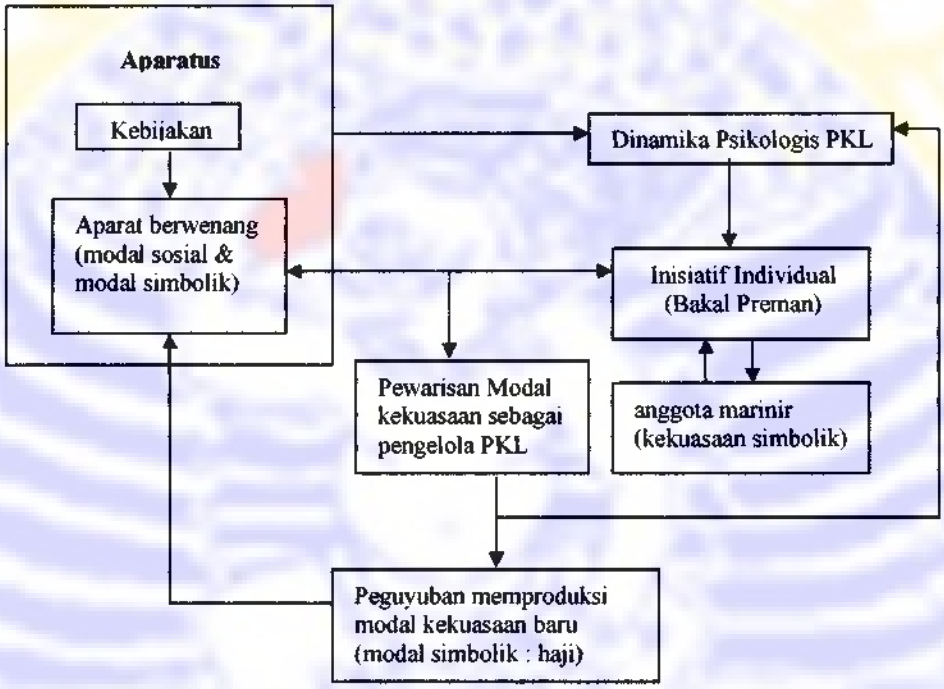

Gambar 3

Bagan Pola Interaksi Antara Preman dan Jaringan

PKL yang berada dalam wilayah ilegal untuk berdagang membutuhkan legitimasi dan lisensi dari pihak-pihak berwenang yang memiliki modal-modal kekuasaan untuk menjalankan aktivitasnya. Keberadaan preman sebagai koordinator PKL kemudian menjadi sebuah aturan main yang secara tidak langsung ditetapkan oleh pihak dominan agar eksistensi PKL dapat terjaga. Tanpa

adanya orang yang memiliki akses dengan aparat berwenang, maka keberadaan PKL di wilayah ilegal tersebut akan menjadi terancam. Posisi preman berada diantara aparat dan pedagang. Ia berperan dalam menjadikan sektor yang semula dianggap ilegal untuk melakukan aktivitas kaki lima menjadi sah untuk ditempati.

Sebagaimana praktik yang diawali dari pemaknaan terhadap struktur dan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka dalam struktur terdapat aturan main yang mengandaikan pola interaksi antara berbagai modal kekuasaan. Interaksi tersebut menghasilkan pewarisan modal kekuasaan dari pihak-pihak dominan dan reproduksi modal-modal baru dari pihak-pihak terdominasi.

Aparat memiliki modal sosial berupa kewenangan legal-formal atas lahan tertentu. Dalam modal sosial tersebut terdapat modal simbolik berupa status dan posisi yang dihormati oleh masyarakat. Anggota marinir walaupun tidak mempunyai kewenangan secara legal-formal atas lahan telah menunjukkan kekuasaan simboliknya ketika terjadi aksi perusakan terhadap PKL. Hampir seluruh pedagang pasar menaruh hormat dan segan terhadap anggota marinir tersebut.

Modal sosial berupa akses dan kewenangan legal-formal tidak dipunyai oleh KA yang semula hanya menjadi pedagang. KA kemudian mendapatkan legitimasi secara tidak langsung dari anggota marinir untuk menyelamatkan aktivitas perdagangan kaki lima. Selanjutnya legitimasi berupa lisensi secara informal untuk menyelamatkan aktivitas PKL diberikan oleh aparat yang memiliki kekuasaan legal-formal atas lahan. Aparat-aparat tersebut tak lain adalah anggota koramil, camat, pejabat polres, dan kapolsek. Akses preman dengan aparat

berwenang merupakan modal sosial dan simbolik yang diperoleh preman dari aparat untuk dapat mendominasi PKL.

Dominasi preman terhadap PKL diwujudkan dalam bentuk pungutan uang terhadap PKL. Hasil dari pungutan tersebut akan digunakan untuk mengelola operasional PKL dan juga memperkuat kualitas jaringannya dengan aparat berwenang. Dalih preman dalam memungut iuran pada pedagang adalah terkait dengan lahan ilegal yang ditempati PKL. Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya budaya kekuasaan telah memunculkan aturan main untuk memberikan hasil pungutan kepada aparat pemberi lisensi yang memiliki jabatan strategis.

Sementara, bagi PKL menyisihkan uang untuk membayar iuran yang ditetapkan oleh paguyuban merupakan suatu hal yang biasa. PKL selalu mendahulukan keselamatan, asal eksistensinya tetap terjaga. Modal ekonomi yang sebagian disisihkan untuk membayar iuran justru menjadi penyelamat atas aktivitas perekonomiannya di lahan ilegal tersebut.

PKL mengakui dominasi preman sekaligus memanfaatkannya. Mereka tak lagi memusingkan tindakan represif kepada PKL yang tidak mau membayar iuran lagi. Justru PKL yang tidak mau membayar akan dibenci oleh sesamanya karena imbasnya akan berefek pada mereka yang rajin membayar. Mereka lebih menganggap bahwa paguyuban adalah pelindung dikarenakan akses yang dipunyainya terhadap aparat yang berwenang. Dengan adanya preman tersebut, PKL untuk sementara dapat berdagang tanpa rasa was-was, informasi atas kebijakan Muspika terkait eksistensi PKL juga dapat diketahui dengan cepat.

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Menarik dicermati bahwa dalam menerima pewarisan modal kekuasaan dari aparat yang berwenang, preman bukanlah subjek yang pasif. Untuk memperkukuh dominasinya serta mempererat kualitas jaringannya, maka preman memproduksi modal-modal kekuasaan baru. Kesadaran preman bahwa budaya masyarakat sangat menghormati seseorang yang berpredikat haji membuat ia memproduksi modal simbolik dengan menyebut dirinya sebagai *haji*, sekalipun hal tersebut dilakukan dengan cara yang deseptif. Singkatnya, KA belum pernah pergi ke tanah suci.

Predikat haji merupakan modal simbolik bahwa ia adalah orang yang layak dihormati oleh komunitas. Beberapa aparat yang baru bertugas di daerah Setonongulon seperti PN bahkan memanggil KA sebagai "Pak Haji". Produksi modal simbolik tersebut secara diam-diam dan halus merupakan bentuk pertarungan antara preman sebagai pihak terdominasi dan aparat sebagai pihak pendominasi. Sekaligus dalam wujud yang tidak kentara, preman ingin memperkukuh dominasinya terhadap PKL melalui modal simbolik yang diproduksinya.

Kesadaran akan budaya telah membuat preman dapat menginterpretasi bentuk-bentuk pertarungan 'kehormatan' secara halus dan tak kentara melalui ekspresi produksi modal simbolik. Dalam hal ini, eksistensi kesadaran preman secara subjektif telah menterjemahkan struktur lingkungan agar kemungkinan-kemungkinan objektif (*subjective expectation of objective probabilities*) yang tersedia dapat terjadi sesuai dengan harapannya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hal terpenting dari penelitian ini berkaitan dengan penemuan tema-tema sehingga membentuk praktik pemungutan liar oleh preman pada pedagang kaki lima. Dari pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Relasi kekuasaan yang ada dalam ranah pasar menentukan reproduksi atribut preman. Untuk menjamin aturan main dan menjauhkan kesan kriminal pada pelaku pemungutan liar yang telah berada dalam kontrol aparat keamanan, polisi memproduksi atribut KM yang merupakan singkatan dari keamanan. Atribut yang direproduksi tersebut menimbulkan pemahaman subjektif pada khalayak, bahwa KM tidak boleh dipahami pada aktivitasnya yang melanggar hukum dengan melakukan pungutan liar pada PKL dan menyetor pungutan tersebut pada oknum-oknum aparat saja. Namun lebih pada aktivitasnya yang juga mengatur PKL dan membantu aparat dalam hal ketertiban dan keamanan. Atribut tersebut dipersepsikan dapat diterima secara sosial sehingga secara hegemonik memperkuat penerimaan sosial terhadap hubungan relasional antara polisi dengan preman dalam komunitas.
2. Seseorang yang dipersepsikan pedagang dan aparat sebagai preman memberikan atribut kepada dirinya sebagai paguyuban. Ia menekankan pada fungsi dan perannya sebagai pengelola, pelindung, pemimpin, sekaligus penjembatan kepentingan PKL. Praktik pungutan liar dan teror yang dilakukan

hanya merupakan bentuk dari ketertundukan preman terhadap aturan main. Hal tersebut dilakukan untuk mempertegas *perceived social role* (persepsi atas peran sosial) sebagai paguyuban dihadapan komunitas.

3. Pola pikir heuristik PKL terhadap berbagai problematika sosial memperkukuh atribut pelindung terhadap preman. PKL memperhatikan bagaimana aturan main (yang telah ditetapkan secara terselubung oleh pihak dominan melalui pemberian upeti terhadap aparat yang berwenang) dapat menjamin eksistensi perdagangan mereka dalam pasar. Preman sebagai pelaku pemungutan liar dapat dikatakan hanyalah pelaku yang menjalankan aturan main untuk menjamin eksistensi perdagangan kaki lima.
4. Dinamika psikologis PKL berada dalam kecemasan akibat struktur lingkungan yang mensubordinasi dan tidak berpihak terhadap aktivitasnya. Atas kecemasan tersebut, PKL dapat dikatakan selalu mendahulukan keselamatan *(safety first)*, menghindari resiko sanksi yang terkonsuensikan darinya dan yang bisa membuat siapapun mencabut fasilitas-fasilitas perdagangan yang bisa mereka dapatkan. Konsekuensi dari sikap PKL tersebut adalah sikap terbiasa pedagang terhadap praktik premanisme yang menimpa dirinya asal eksistensi perdagangannya tetap dapat dijalankan.
5. Kemunculan preman-baru bermula dari inisiatif secara individual dan diam-diam dari salah seorang PKL yang ingin sumber ekonominya terselamatkan. Kemunculannya yang dilakukan secara individual dan diam-diam merupakan karakteristik PKL yang cenderung mendahulukan keselamatan. Legitimasi atas praktiknya tidak ditentukan dari inisiatif pribadinya, namun dari

legitimasi pihak yang memiliki modal kekuasaan simbolik di kalangan komunitas pasar.

6. Korupsi yang sudah menjadi biasa dilakukan telah menyebabkan distorsi di dalam pemaknaan perilaku, dimana yang baik dan yang buruk menjadi kabur. Distorsi ini terlihat dalam idiom "*saling mengerti, tenggang rasa dan toleransi atas tugas dan tanggung jawab masing-masing*" yang digunakan untuk memahami setoran atau upeti yang diberikan preman kepada aparat. Idiom ini merupakan wujud dari perilaku yang telah berulang-ulang dilakukan dan menciptakan struktur hidup yang memudahkan tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan premanisme. Mereka yang terlibat dalam jaringan tersebut, tidak perlu lagi berpikir, mengambil jarak, atau mempertanyakan dari tindakan bagi hasil pungutan pedagang terhadap aparat. Dengan kata lain, semua telah dimaknai sebagai sikap saling mengerti, tenggang rasa dan toleransi.
7. Dinamika oposisi internal yang berlaku dalam struktur memperlihatkan aturan main yang berkaitan dengan tingkat kontrol atas modal sehubungan dengan interaksi preman, PKL, dan aparat. Interaksi kemudian membentuk simbiosis yang bersifat tarik-menarik kepentingan dan saling memanfaatkan antara berbagai pihak untuk menguasai modal-modal yang tersebar dalam habitus kekuasaan. Dinamika tersebut dapat terlihat pada pewarisan modal-modal kekuasaan dari aparat berikut konsekuensi atas pewarisan modal tersebut. Dengan pewarisan modal kekuasaan berupa akses kekuasaan preman secara sosial dan simbolik menjadikan preman menjadi pihak dominan dan disegani

oleh kalangan PKL. Pewarisan modal kekuasaan tersebut terjadi melalui dua tahap, yaitu :

a. tahap pertama, didapatkannya legitimasi atas praktiknya melalui petunjuk untuk mendekati aparat yang berwenang dari figur yang disegani oleh komunitas pasar. Figur yang memberikan petunjuk tersebut tak lain adalah anggota marinir.
b. tahap kedua, didapatkannya legitimasi secara informal dari aparat yang memiliki modal kekuasaan berupa status dan kewenangan legal-formal atas lahan. Aparat yang dianggap berwenang atas lahan adalah camat, kapolsek, pejabat lantas polres, beserta anggota koramil.

8. Penyebutan diri preman sebagai "haji" walaupun belum pernah berangkat ke tanah suci merupakan produksi modal simbolik. Produksi modal simbolik ini menunjukkan bahwa preman bukanlah subjek yang pasif atas kekuasaan pihak dominan. Walaupun dilakukan dengan cara deseptif, kesadaran akan budaya telah membuat preman dapat menginterpretasi bentuk-bentuk pertarungan 'kehormatan' secara halus melalui ekspresi produksi modal simbolik. Sekaligus dalam dalam wujud yang tidak kentara, preman ingin memperkukuh dominasinya terhadap PKL melalui kehormatan yang telah diproduksinya.
9. Modal ekonomi yang dikumpulkan melalui dominasi preman atas pedagang hanya merupakan konsekuensi atas legitimasi dan lisensi aktivitas perdagangan di pasar tersebut.

B. Saran

Dari temuan-temuan penelitian ini, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya dialog antara aparat pembuat kebijakan dan komunitas PKL terkait pengaturan lahan yang ditempati untuk perdagangan mereka. Pengaturan lahan tersebut harus dapat menjamin kepentingan ekonomi pedagang kaki lima dikarenakan berbagai situasi, kondisi, dan kekuasaan kota berikut dengan regulasi-regulasinya secara tidak langsung telah menyebabkan membludaknya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan valensi positif terhadap meningkatnya urbanisasi. Sebelum krisis moneter, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat jumlah 27 juta penduduk miskin di Indonesia, pada pertengahan tahun 1998 angka itu telah menjadi delapan puluh juta jiwa, atau hampir separuh dari total penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ini, permasalahan membludaknya perdagangan kaki lima tidak dapat ditimpakan semata-mata sebagai kesalahan pedagangnya namun juga terkait kebijakan berikut situasi dan kondisi sosial yang mengarahkan mereka untuk bekerja pada sektor tersebut.
2. Beberapa pasal dalam Perda no 17 tahun 2003 terutama pasal 5 ayat D perlu ditinjau kembali. Pasal tersebut cenderung memarginalisasi keberadaan PKL. Posisi tawar PKL yang lemah terlihat pada kewenangan pemerintah daerah yang dapat mengosongkan lahan PKL yang telah

memiliki ijin secara formal tanpa ganti rugi. Keberadaan PKL yang terlanjur membludak hendaknya diselesaikan secara arif dengan menjadikan pelaku *underground economy* sebagai mitra bisnis dan bukan sebagai pihak marginal. Jaminan dan dukungan maksimal pemerintah terhadap mitra kerja dari sektor *underground economy* seperti PKL diharapkan dapat meminimalisir praktik pungutan liar, serta memberikan sumbangan ekonomi yang besar, berupa kontribusi bagi pajak lokal dan penciptaan lapangan kerja.

3. Perlu adanya *political will* terhadap pemberantasan praktik suap atau korupsi upeti pada oknum aparat pemerintahan mulai dari tingkatan yang tertinggi. Hal ini dikarenakan korupsi upeti yang dilakukan oleh pejabat tinggi telah memberikan model bagi aparat-aparat yang berada di bawahnya. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, praktik pungutan liar dari paguyuban atas pedagang ternyata hanya merupakan bentuk adaptasi atas aturan main yang telah ditetapkan secara terselubung oleh pihak dominan yaitu aparat agar dapat menjamin eksistensi perdagangan mereka.
4. Informan kunci dalam penelitian ini adalah preman namun peneliti merasa kurang maksimal dalam mendapatkan keterangan dari preman tersebut. Hal ini dikarenakan preman memiliki resistensi yang tinggi terkait dengan resiko profesi yang dilakukan. Dapat dikatakan, ia harus selalu menjaga nama baik aparat yang telah menjadi bekingnya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menggali data dari informan kunci yang lain yaitu

pedagang, ataupun polisi yang bertugas atau pernah bertugas di daerah tersebut. Karena itu, diharapkan penelitian berikutnya dapat mengisi kekurangan ini agar dapat mencerminkan seluruh karakteristik preman dalam lingkungan pasar. Strategi yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memperpanjang waktu tinggal tanpa memperlihatkan tendensi sebagai seorang peneliti.

5. Penggunaan metode etnografi dalam psikologi, sebagai varian dari penelitian kualitatif masih jarang dilakukan. Penelitian ini sangat cocok untuk memahami bentuk-bentuk perilaku sosial yang penuh muatan prasangka dan stereotip negatif. Dengan metode ini, kita dapat memahami secara langsung dan "hidup" bagaimana mereka mengkontruksi dunia pengalamannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2005). *Penghakiman Massa.* Jakarta: Accomply Publishing

Atmasasmita, R. (1995, Juli). *Preman Dan Masyarakat, Sebuah Tinjauan Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi.* Prisma 7. Jakarta: LP3ES.

Audifax. (2004). *Etika Dan Kekuasaan: Suatu Kajian Etika Berkaitan dengan Pemuatan Tulisan dalam Jurnal Anima.* Surabaya : Penelitian Komunitas Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Surabaya

Bourdieu, P. (1994). *Structures, Habitus and Practices.* dalam Anthony Giddens (eds). *The Polity Reader in Social Theory.* Cambridge: The Polity Press

Brennan, J. (1991). *History and Sistem of Psychology.* New Jersey. Prentice Hall, Inc

Burhani, M.F.. (2001). *Studi Etnografi Tentang Strategi Adaptasi Preman Terhadap Lingkungan Sosialnya di Kawasan Terminal Joyoboyo.* Surabaya : Skripsi Fisip Unair.

De Soto, H. (1991, Mei). *Pertumbuhan Ekonomi Bawah Tanah di Peru.* Prisma 5. Jakarta: LP3ES.

De Soto, H. (1992). *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga.* Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

Detik.com. (2001). Suwarjono. *Preman Jakarta, Kabarmu Kini (1) : Proyek Rp 12 Miliar Basmi Preman Jakarta.* 19 April. http://jkt.detik.com/ Diakses 20 April 2005

Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1994). *Competing Paradigm in Qualitative Research.* Dalam N.K Denzin dan Yvonna, S.L. (Eds). *Handbook Of Qualitative Research.* Thousand Oaks: Sage Publisher. Hal :105-106

Hall, C.S. & Gardner, L. (1993). *Theories of Personality.* John Willey & Sons. New York. Penerjemah : Dr. A Supratiknya. 1993. *Psikologi Kepribadian 2. Teori-teori holistik (Organismik-Fenomenologis).* Yogyakarta: Kanisius

Atkinson, P. dan Hammersley, M. (1994). *Ethnography and Participant Observation.* Dalam N.K. Denzin dan Y.K. Lincoln (Eds). *Handbook of Qualitatif Research* (Hal 248). Thousand Oaks: Sage Publisher.

Harker, R & Mahar, C & Wilkes,C . (1990). *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu : The Practice Theory.* London : The Macmillan Press Ltd

Haryatmoko. (2003, November-Desember). *Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bordieu, Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa.* Basis, Hal : 11-12,52

Haryatmoko(2). (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan.* Jakarta : Kompas

Jawa Pos. (2004). *Catatan Penting dari Seminar Berseri dan Berpola Penataan PKL (2)*. 27 januari. http://search.jawapos.com/ Diakses 5 Maret 2005

Jawa Pos. (2004). *Masih Takut Hadapi Preman.* 16 Maret. http://search.jawapos.com/ Diakses 5 Maret 2005.

Jawa Pos. (2004). *Penguasa Keputran kepas tangan.* 27 Maret. http://search.jawapos.com/ Diakses 5 Maret 2005.

Jawa Pos. (2004). *Dinas Koperasi Belum Siap.* 12 April. http://search.jawapos.com/. Diakses 5 maret 2005

Jawa Pos. (2004). *Ungkap Lurah dan Camat yang Jadi Mafia.* 9 Mei. http://search.jawapos.com/ Diakses 5 Maret 2005.

Jawa Pos. (2004). *Ritel Asing Tak Matikan Pasar Lokal.* 29 Mei. http://search.jawapos.com/ Diakses 5 Maret 2005

Jenkins, R. (1992). *Pierre Bourdieu.* London : Routledge

Kohler, W. (1970). *Gestalt Psychology*. United States of America: Liveright Publishing Corporation

Kompas. (1999). *Terminal Sarang Penjahat dan Preman.* 6 Februari. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005

Kompas. (2000). *Tanah Abang ."Emang Abang Yang Punye?".* 29 Juni. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005.

Kompas. (2000). *Preman Tanah Abang Aktif Lagi.* 28 Agustus. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005

Kompas. (2000). *Vrijman yang Preman.* 2 September. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005

Kompas. (2001). *Preman Diberi Seragam oleh Pemda DKI.* 6 April. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005.

Kompas. (2001). Bagong Suyanto. *Preman: Korban dan Bentuk Perlawanan Proses Stigmatisasi.* 25 April. Diakses 20 April 2005.

Kompas. (2001). *Surabaya di Tengah Menggeliatnya Pasar Tradisional.* 18 Juli. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005.

Kompas. (2003). B. Herry Priyono. *Premanisme di Mesopotamia.* 22 April. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005.

Kompas. (2003). *Pasar Tradisional Masih Dominan di Asia Tenggara.* 8 Agustus. http://kompas.com/ Diakses 20 April 2005

Mohammad, G. (1996). *Zarathustra di Tengah Pasar.* Jurnal Kebudayaan Kalam, 7. Jakarta: Graffiti Press. Hal :110-124.

Muhadjir, N. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi IV.* Yogyakarta : Rake Sarasin

Nasution, A.K. (1982, Mei). *Kriminalitas dan Pembangunan, Pencegahan dan Pengendaliannya. Prisma* 5. Jakarta : LP3ES

Nasution S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik.* Bandung : Tarsito

Nordholt, H.S. (2002). *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Nugroho, G, (2002). *Dominasi-Habitasi Pasar dan Integrasi-Resistensi Struktural Wong Cilik: Diskursus Ekonomi Politik Pasar (Alokasi-Konsumsi) dan Wong Cilik di Mojokuto.* Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Nugroho, G (2). (2002). *Dominasi-Habitasi Pasar dan Integrasi-Resistensi Struktural wong cilik: Relasi Diskursif antara Pasar (Alokasi-Konsumsi) dan Wong Cilik di Mojokuto.* Workshop Asian Studying Asia: Cultural Studies in Asian Context. Yogyakarta: Kunci Cultural Studies Center

Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Poerwandari, E.K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi.* Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran & Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi UI.

Priyono, B.H. (2002). *Psikologi Di Bawah Bayang-Bayang Ekonomi.* Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Psikologi Transformatif: Psikologi Tekstual ke Psikologi Kontekstual. Surabaya : Universitas Surabaya.

Purwanto, D. (2004, Oktober). *Menguak Kriminalitas Di Wilayah Hukum Kota Besar Surabaya.* Makalah dipresentasikan pada seminar persoalan aktual Kota dan Kriminalitas: Suatu Kajian Multi Perspektif, Surabaya, Fakultas Psikologi Unair.

Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2003). *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam.* Jakarta : Kencana

Santoso, T. (2002) *Kekuasaan dan Kekerasan.* dalam Santoso, Thomas, (Eds) Teori Kekerasan 2002:163). Jakarta : Ghalia Indonesia

Schellenberg, J.A. (1978). *Master of Social Psychology.* Oxford University Press. Penerjemah : Nancy Simanjuntak. 1997. Tokoh-tokoh Psikologi Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

Scott, J. 2000 (1985). *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Shaw, M.E. (1970). *Theories of Social Psychology.* New York. Mc Graw Hill Book Co.Penerjemah : Salito Wirawan Sarwono. 1998. *Teori-teori Psikologi Sosial.* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

Schwandt., T.A. (1994). Constructivist, Interpretivist Aprroaches to Human Inquiry. Dalam N.K. Denzin dan Yvonna. S.L. (Eds). *Handbook Of*

Spradley, J.P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugiharto, B. (2003). *Foucault dan Postmodernisme*. http://filsafatkita.f2g.net/mich6.htm. diakses tanggal 20 mei 2005

Suhartono. (1996, Februari). *Preman: Potret Dislokasi Sosio-Kultural*. Prisma 2. Jakarta: LP3ES.

Suhardono, E. (1995, Juni). *Logika Pemenjaraan Kita. Basis.*

Takwin, B. (2005). *Proyek Intelektual Pierre Bourdieu Melacak asal usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial.* Dalam *Kata* pengantar, (Ed), (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik : Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta : Jalasutra

Tellis, W. (1997). Application of a Case Study Methodology. *The qualitative report*, (online) Vol. 3, No. 3, september, http://www.nova.edu/ssss/qr-3-3/tellis2.html diakses tanggal 20 maret 2003

Waseso, M.G. 1986. *Dimensi-Dimensi Psikologi Sosial*. Yogyakarta: PT Hanindita